

VOL 3 NO 5 OKTOBER-NOVEMBER 2018
LITBANG.KEMENDAGRI.GO.ID
MAJALAH DWI BULANAN
P-ISSN 2503 3352
E-ISSN 2528 4181

GENCIL, PLATFORM UNGGULAN
SMART CITY PONTIANAK

YANG BERTAHAN DAN BERINOVASI

MEDIA BPP

J E N D E L A I N F O R M A S I K E L I T B A N G A N



**REFORMASI
BIROKRASI
BPP KEMENDAGRI**



9 1772528 418001

Call for Papers

BPP
KEMENDAGRI

Terbit Setiap Maret, Juli, November

“INOVASI KEBIJAKAN PEMERINTAH”

Naskah merupakan karya ilmiah orisinal yang belum pernah dipublikasikan dan tidak memuat unsur plagiat.

Naskah ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris sebanyak 38.000 s.d 40.000 karakter (tanpa spasi) sudah termasuk referensi, daftar pustaka, dan tabel (jika ada). Naskah dalam Bahasa Indonesia disertai abstrak Bahasa Inggris, dan sebaliknya.

Lampirkan alamat dan nomor telepon penulis.

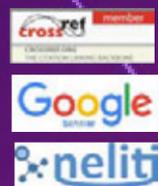
Jl. Kramat Raya, No 132,
Senen, Jakarta Pusat
0821 1139 3927 (Whatsapp Only)
matrapembaruan@gmail.com

Naskah yang dikirimkan berupa resume hasil penelitian, bagian dari skripsi, tesis, atau disertasi yang telah mengalami penyesuaian untuk standar jurnal ilmiah. Artikel mengandung unsur temuan baru, yang merespons isu-isu dan wacana kontemporer terkait inovasi kebijakan dalam berbagai perspektif.

Sumber referensi minimal 10 buah dan 80% di antaranya harus berasal dari sumber primer, seperti: jurnal ilmiah, skripsi, tesis, dan/atau disertasi.

Sistematika penulisan terdiri dari empat pembabakan: Pendahuluan, Metode, Hasil dan Pembahasan, dan Kesimpulan. Sedangkan gaya penulisan referensi dan kutipan MP menggunakan gaya APA (*American Psychological Association*) style.

DIBERIKAN IMBALAN
SEPANTASNYA BAGI
NASKAH YANG DIMUAT



JURNAL MATRA PEMBARUAN

<http://jurnal.kemendagri.go.id/index.php/mp>

Memasuki periode kedua, pelaksanaan reformasi birokrasi di Kemendagri, masih belum menunjukkan hasil memuaskan. Indeks penilaian yang dilakukan KemenPAN-RB menunjukkan Kemendagri belum mencapai target dan nilai indikasi yang ditetapkan. Untuk mengejar ketertinggalan itu, Kemendagri membentuk Tim Reformasi Birokrasi yang terbagi ke dalam beberapa Pokja. BPP Kemendagri sebagai institusi kelibangan di Kemendagri juga menjadi salah satu pokja yang tidak lepas dari evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi oleh KemenPAN-RB tersebut.

Tim percepatan reformasi birokrasi dibentuk sejatinya bukan hanya untuk meningkatkan tunjangan kinerja, namun untuk memperbaiki cara kerja di Kemendagri khususnya dalam hal pelayanan publik.

Untuk itu, pada edisi kali ini, *Media BPP* mengulas sejauh mana pelaksanaan reformasi birokrasi di BPP Kemendagri.

Sebelumnya, untuk menyajikan laporan utama mengenai reformasi birokrasi. Tim *Media BPP* melakukan riset awal tentang unit layanan di BPP Kemendagri, mengikuti berbagai pertemuan

yang membahas reformasi birokrasi, serta mewawancarai beberapa orang yang terlibat langsung dalam mensukseskan pelaksanaan reformasi birokrasi di BPP Kemendagri.

Selain laporan utama yang mengulas reformasi birokrasi. Pada edisi kali ini, *Media BPP* juga mengulas inovasi pelayanan publik yang dilakukan oleh Kota Pontianak, berupa teknologi pengaduan, aspirasi, dan informasi yang dihimpun dalam sebuah sistem yang disebut "Gencil". Salah satu contoh pengembangan inovasi yang bisa dikatakan efektif dalam menunjang pelayanan publik. Kehadiran Gencil menjadi jalan tepat di tengah minimnya tenaga sumber daya manusia yang mengelola pemerintahan.

Media BPP juga mengulas profil Bidang Litbang Banjarbaru dan BPP Kalimantan Selatan. Menghadirkan potensi wisata di Kalimantan Selatan, serta Profil Profesor Riset dari LIPI yang diharapkan bisa menjadi inspirasi bagi para peneliti di BPP Kemendagri, di tengah minimnya profesor riset yang ada di Kementerian/Lembaga.

Akhir kata, semoga sajian *Media BPP* kali ini bisa memberikan informasi yang bermanfaat..



Redaksi...

MEDIA BPP

PELINDUNG MENTERI DALAM NEGERI TJAHO KUMOLO
PENANGGUNG JAWAB DODI RIYADMADJI

PEMIMPIN REDAKSI	LITA DEWI WULANTIKA
REDAKTUR PELAKSANA	MOH. ILHAM A. HAMUDY
REDAKTUR	ANSELMUS TAN KURNIASIH SYABNIKMAT NIZAM HORAS MAURITZ PANJAITAN SAFRIZAL LITA DEWI WULANTIKA MOH. ILHAM A. HAMUDY
PENYUNTING	FRISCA NATALIA RAHAYU KELANA
PELIPUTAN	INDAH F. ROSALINA SAIDI RIFKY
PENATA LETAK DAN GRAFIS	SAIDI RIFKY

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

ALAMAT REDAKSI
JALAN KRAMAT RAYA NO. 132, JAKARTA PUSAT
REDAKSIMEDIABPP@GMAIL.COM

Pendampingan Pengelolaan Jurnal

Beberapa waktu lalu, Media BPP memuat laporan utama tentang akreditasi Jurnal Ilmiah, yang mulai dilakukan satu pintu dalam sistem yang disebut Arjuna (Akreditasi Jurnal Nasional). Saya pribadi sebagai pegiat kelitbangan di daerah merasa ketinggalan informasi, karena ternyata lompatan publikasi ilmiah sudah sangat jauh. Sangat miris ketika kita melihat kondisi kelitbangan di daerah. Yang mungkin tidak banyak yang peduli terhadap keberadaan jurnal ilmiah. Padahal jurnal ilmiah adalah kunci. Karena semua hasil kelitbangan harus bermuara di situ. Berbicara pengelolaan jurnal ilmiah yang berkualitas, rasanya tidak ada yang tidak mungkin. Tetapi memang sulit juga dikerjakan. Sumber daya manusia yang minim, memang menjadi alasan. Kita tidak bisa berbicara pengelola, keberadaan peneliti dan bahkan produktivitas mereka saja masih kita pertanyakan. Rupanya hal itu juga ternyata tidak jauh berbeda dengan para peneliti di BPP Kemendagri. Dari data yang saya dapat, peneliti BPP Kemendagri pun sangat minim terpublikasi di jurnal ilmiah terakreditasi. Dengan kondisi demikian bagaimana bisa kita berbicara pengelolaan. Ke depan kami berharap kepada pengelola Jurnal di BPP Kemendagri agar tidak bosan memberikan supervisi terkait penulisan artikel jurnal atau pengelolaan jurnal ilmiah.

- Peneliti di BPP Daerah-

Terima kasih atas segala masukannya. Memang menjadi kewajiban BPP Kemendagri melakukan pendampingan dan supervisi ke daerah yang memiliki keinginan mengelola jurnal. Redaksi berharap beberapa daerah yang sudah memiliki jurnal ilmiah terus dikembangkan. Miris memang ketika banyak peneliti justru tidak memiliki karya yang dipublikasi atau bahkan di diseminasi oleh publik. Kualitas peneliti memang harus ditingkatkan dan keluar dari zona stagnasi. Perubahan-perubahan itu harus diimbangi. Karena kalau kita ketinggalan jauh, kita juga akan sulit mengejar. Pengelola jurnal di BPP Kemendagri sebenarnya terbuka menerima konsultasi bagi pengelolaan dan penulisan dari siapa pun, tak terkecuali dari BPP Daerah. BPP Kemendagri juga menyediakan sarana khusus untuk melayani konsultasi dan pengaduan. Konsultasi tersebut saat ini lebih mudah ketimbang dulu. Konsultasi bisa dilakukan melalui daring, hal itu untuk memudahkan para pegiat kelitbangan di daerah dan tidak perlu datang langsung ke Jakarta. Unit layanan itu sendiri bisa diakses oleh khalayak di web litbang.kemendagri.go.id.

Redaksi

Perpustakaan Belum Rapi

Sudah hampir setahun ketika saya pertama kali menginjakkan kaki ke perpustakaan BPP Kemendagri, keadaannya tidak pernah berubah. Beberapa buku masih belum tersusun, sedikit membingungkan ketika melakukan pencarian. Belakangan ada informasi jika pelayanan peminjaman buku bisa dilakukan melalui *website* perpustakaan yang saat ini diberi nama Soepardjo Roestam. Tetapi itu juga belum sepenuhnya baik. Beberapa kali saya mencari buku yang saya butuhkan belum ada. Tapi saya sangat memaklumi, karena perpustakaan dalam masa penataan. Namun bagi saya penataan perpustakaan khusus, untuk koleksi buku yang tidak terlalu banyak terlalu memakan waktu jika dikerjakan hampir satu tahun. Padahal untuk ukuran perpustakaan komponen dengan jumlah buku yang relatif sedikit bisa dilakukan tidak perlu setahun. Ke depan semoga perpustakaan bisa berjalan normal dan pelayanan bisa dilakukan secara maksimal.

- Ray, Peneliti BPP Kemendagri-

Terimakasih atas masukan Saudara, semoga ke depan perpustakaan Soepardjo Roestam BPP Kemendagri bisa memberikan pelayanan yang maksimal, secepat mungkin. Redaksi berharap semua pemustaka bersabar, dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia yang ada. Untuk jumlah buku yang ribuan, penginputan buku di Perpustakaan Soepardjo Roestam hanya dilakukan oleh dua orang. Selain itu, Perpustakaan BPP Kemendagri juga tidak memiliki pustakawan dari kalangan PNS. Ini tentu menjadi catatan bagi Kemendagri khususnya untuk menyediakan pustakawan di BPP Kemendagri. Hal itu sangat urgen jika melihat pekerjaan yang dilakukan oleh Sub Bagian Perpustakaan yang tidak hanya mengurus perpustakaan. Pustakawan akan sangat membantu dan bisa fokus melakukan pekerjaan terkait perpustakaan. Tidak seperti saat ini yang pekerjaan staf yang ada melakukan pekerjaan rangkap antara pustakawan, pengelola jurnal, atau juga sebagai staf administrasi yang mengurus surat menyurat dan keuangan.

Redaksi

Opini dan Cerpen dapat dikirim melalui email redaksimediabpp@gmail.com atau melalui whatsapp di 085711576273

MEDIA BPP

VOLUME 3 NO 5 | OKTOBER-NOVEMBER 2018

DAERAH 32
INOVASI KOTA PONTIANAK
GENCIL, PLATFORM UNGGULAN SMART CITY PONTIANAK

Gencil merupakan salah satu contoh pengembangan inovasi yang bisa dikatakan efektif dalam menunjang pelayanan publik di Kota Pontianak. Pemanfaatan teknologi menjadi jalan tepat di tengah minimnya tenaga sumber daya manusia yang mengelola pemerintahan.

LEBIH DEKAT 36
SYARIF HIDAYAT, PROFESOR RISET LIPI
MEMBACA KONSEP 20 TAHUN OTONOMI DAERAH

Otonomi Daerah mulai digaungkan sejak tumbanganya Orde Baru, tapi jauh sebelum Orde Baru seorang pemuda bernama Syarif Hidayat sudah memperkirakan konsep desentralisasi menjadi isu yang penting dalam agenda reformasi bangsa Indonesia pasca Orde Baru dan tumbanganya rezim Presiden Soeharto.

JENDELA BPP 6-13

KOMIK 35

GAYA HIDUP 40

SAINS DAN
TEKNOLOGI 41

RESENSI BUKU 42

RESENSI FILM 46

SASTRA 50

KILAS BERITA 52-53

OPINI

MEMBANGUN SINERGITAS
ANTARKOMPONEN KEMENDAGRI 54

DIGITAL CAREER CHROMOSOME
56

CATATAN
DPD 58



BPP KALIMANTAN SELATAN
& BIDANG LITBANG BANJAR BARU 26
YANG BERTAHAN DAN BERINOVASI

Pertengahan September lalu, Tim Media BPP mengunjungi Kalimantan Selatan. Di sana, kami menjumpai beragam informasi menarik mengenai Badan Penelitian dan Pengembangan Kalimantan Selatan, dan Bidang Penelitian Banjarbaru dengan segala keterbatasan namun mampu mengembangkan potensi yang ada.

DAERAH 30
MENJEJAKI PASAR APUNG
MULTI GENERASI

Generasi 80'an tentu masih ingat sepenggal iklan stasiun TV swasta yang menggambarkan suasana pasar di atas sungai dengan beragam jajanan dagangan sayur, buah, ikan, dan hasil bumi lainnya di atas kapal. Visualisasi itu kemudian dipertegas dengan gambar seorang ibu tua yang menunjukkan jempolnya diiringi jingle "RCTI Oke" tentu mengingatkan kita akan suasana pasar terapung tersebut.

LAPORAN UTAMA 14-23

REFORMASI BIROKRASI BPP KEMENDAGRI

Sejatinya Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) merupakan sebuah lembaga bergengsi, yang bisa menjadi lembaga *think tank* suatu negara. Setiap kebijakan yang lahir mestinya berdasarkan hasil kajian dan penelitian BPP. Sehingga suatu kebijakan tidak terkesan menimbulkan 'uji coba' di tengah masyarakat dengan hadirnya berulang kali revisi kebijakan. Namun sayangnya cita-cita tersebut masih sangat jauh dari apa yang diharapkan. Permasalahan klasik seperti anggaran terbatas atau Sumber Daya Manusia (SDM) yang tidak mumpuni kerap menyelubungi berbagai persoalan BPP. Lantas bagaimana sebaiknya?



SKEMA BARU INNOVATIVE GOVERNMENT AWARD

Pusat Litbang Inovasi Daerah membuat skema baru terkait pemberian penghargaan IGA (*Innovation Government Award*), hal itu dilontarkan langsung oleh Kepala Pusat Litbang Inovasi Daerah, Safrizal saat ditemui di ruangannya.

Menurut Safrizal, IGA yang akan dilaksanakan tiap tahun itu, rencananya berdasarkan penghitungan Indeks Inovasi Daerah meliputi tahapan input data berbasis komputer, lalu tahapan pengukuran, dan terakhir tahapan penilaian. “Pada tahap pertama kami akan mengirim surat edaran ke seluruh Kepala Daerah untuk memasukkan data tentang inovasi daerahnya masing-masing pada sistem yang telah tersedia. Sistem akan melakukan penilaian secara komputer,” terang Safrizal.

Sistem komputer itu akan menilai administrasi yang sudah dimasukan oleh pemerintah daerah secara kuantitas dan kualitas tergantung pada 35 indikator yang sudah dirumuskan oleh tim Indeks Inovasi Daerah.

Peneliti Puslitbang Inovasi Daerah, Adi Suhendra menambahkan, masing-masing 35 indikator umum itu seperti visi misi, pelayanan perizinan, peningkatan inovasi, dan IPM (Indeks Pembangunan Manusia). “Selain itu, juga ada indikator khusus bagi daerah yang sudah berinovasi. Setelah itu semua selesai dinilai secara sistem komputer, maka tahap selanjutnya adalah pengukuran skor dan urutan *ranking* yang dirumuskan oleh tim Kemendagri, Kemenristek Dikti, LAN (Lembaga Administrasi Negara), STIS (Sekolah Tinggi Ilmu Statistik), dan Kemenpan RB,” terang Adi.

Dari hasil pengukuran, nantinya diverifikasilah data persentase dan kunjungan faktual untuk ditetapkan pemenang IGA 2018 pada Desember mendatang. “Ada ragam kategori yang akan menjadi pemenang IGA tahun ini, yakni juara umum provinsi, juara umum kabupaten, dan juara umum kota. Lalu nanti juga ada kelas untuk penghargaan IGA bagi daerah yang tertinggal, perbatasan, serta Papua dan Papua Barat,” ungkapnya.

Mengapa ada kategori kelas tertentu? Dikatakan Adi, cara ini merupakan pemantik semangat bagi daerah tertinggal dan daerah timur yang notabene sulit melakukan inovasi karena keterbatasan demografi dan ekonomi. Untuk itu, tidak hanya dalam bentuk penghargaan, tetapi Puslitbang Inovasi Daerah juga melakukan tindak lanjut dari IGA tersebut. “Bagi daerah yang sudah maju diberi penghargaan IGA, bagi daerah yang sedang berkembang akan diterapkan replikasi inovasi, dan bagi daerah yang belum berkembang akan dilakukan pembinaan inovasi,” jelasnya.

Pembinaan inovasi diungkapkan Adi, juga sedang diupayakan perumusan payung hukum Permendagri tentang Penilaian, Penghargaan, dan Insentif Daerah. “Harapannya Permendagri itu terbit tahun ini dan bisa menjadi payung hukum kami melakukan pembinaan inovasi ke daerah tertinggal,” bebernya.

Replikasi Jeneponto

Sementara itu, untuk daerah yang sedang berkembang, Puslitbang Inovda juga melakukan replikasi inovasi di dua daerah. Menurut Perpres No 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal, terdapat 122 daerah tertinggal, salah satunya Lampung Barat dan Jeneponto, Sulawesi Selatan.

“Kedua daerah ini yang menjadi objek replikasi kita tahun ini, kita pilih secara acak, kalau kemarin Lebak dan Musirawas, sekarang Lampung Barat dan Jeneponto. *Nah*, kalau untuk Jeneponto kita sudah jalan, nanti coba tanya Pak Marlon, kalau Lampung Barat kita belum jalan,” kata Adi saat ditemui *Media BPP*, Kamis (6/9) di ruangannya



Saat *Tim Media BPP* menemui Marlon H. Naibaho Kasubbid Kelembagaan Puslitbang Inovasi Daerah, Jeneponto memang sudah melakukan beragam inovasi PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu). “Dari 46 inovasi yang dilakukan, mereka mengintegrasikannya menjadi 15 PTSP, terdiri dari pelayanan perizinan usaha, IMB (Izin Mendirikan Bangunan), uji KIR (uji kendaraan bermotor), izin penelitian, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain,” terangnya.

Jeneponto sendiri sebenarnya merupakan daerah Sulawesi Selatan yang jauh dari pantai, sehingga mayoritas penduduknya merupakan petani (holtikultura) dan rata-rata berpendidikan SMP (Sekolah Menengah Pertama). “Oleh karena itu, inovasi komoditi nanti yang lebih ditekankan, seperti masalah ternak, dan bibit unggul padi, karena di sana kebanyakan dataran pertanian,” bebernya.

Menurut Marlon, meskipun Jeneponto masuk dalam kategori daerah tertinggal, tapi pemerintah daerahnya sigap menerima inovasi dan replikasi dari Puslitbang Inovasi Daerah, apalagi hal itu juga didukung penuh dari pelayanan inovasi berbasis internet berupa server yang kuat dari Kementerian Komunikasi dan Informatika.

“Harapannya Jeneponto bisa berkembang dari daerah yang tertinggal menjadi daerah yang berinovasi, untuk itu dalam IGA 2018 nanti, Jeneponto akan menjadi salah satu penerima penghargaan dari kami di kelas daerah tertinggal,” tandas Marlon. (IFR)

Indeks Inovasi Daerah, Upaya Untuk Dorong Tingkat Daya Saing Daerah

JAKARTA - Daya saing saat ini menjadi salah satu parameter dalam konsep kota berkelanjutan. Tingkat daya saing suatu daerah juga menjadi salah satu ukuran kesejahteraan. Pemerintah dalam beberapa regulasi juga menekankan pentingnya kepala daerah melakukan inovasi untuk mendorong efektivitas pelayanan publik, menciptakan nilai tambah, serta tetap terbuka pada persaingan domestik dan internasional.

Terlebih dalam hal daya saing, jika dibanding negara-negara lain, Indonesia saat ini berada di posisi yang jauh tertinggal. Global Competitiveness Index baru-baru ini merilis tingkat daya saing negara-negara di dunia untuk 2017. Dalam data tersebut Indonesia masih berada di peringkat ke 36 dari 136 negara.

Berkaitan dengan hal itu, untuk mendorong tingkat daya saing dan optimalisasi otonomi daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kemendagri, melalui Pusat Litbang Inovasi Daerah BPP Kemendagri akan mengukur tingkat inovasi di suatu daerah, melalui indeks inovasi daerah.

Kepala Pusat Litbang Inovasi Daerah BPP Kemendagri **Safrizal** mengatakan, indeks inovasi daerah, selain mendorong daya saing daerah juga upaya untuk mewujudkan kemandirian daerah.

“Karena melalui indeks inovasi akan dipetakan daerah-daerah mana saja yang inovatif. Kemudian daerah inovatif tersebut akan diberikan penghargaan nantinya melalui *Innovative Government Award (IGA)*,” ucapnya dalam acara Sosialisasi Indeks Inovasi Daerah yang dihadiri 100 peserta dari organisasi perangkat daerah, yang diselenggarakan di Hotel Novotel Jakarta (17/9).

Menurutnya, penghargaan IGA pada tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Jika pada tahun sebelumnya IGA diberikan kepada 23 daerah inovatif yang terdiri dari 10 provinsi dan 10 kabupaten dan 3 kota, maka tahun ini nominasi penghargaan akan diberikan tidak hanya kepada provinsi, kabupaten dan kota, melainkan juga untuk kategori wilayah timur Indonesia, daerah tertinggal, dan daerah perbatasan.

“Penilaian pada tahun akan sangat jelas karena semua menggunakan teknologi. Indeks inovasi daerah nantinya juga bisa dimanfaatkan tidak hanya untuk menilai penghargaan IGA, tetapi bisa menjadi basis data yang untuk pemerintah, Kementerian/Lembaga lainnya. Dan semoga juga pada masa



yang akan datang akan ada ukuran kemandirian daerah,” tuturnya.

Tahapan IGA

Adi Suhendra Peneliti BPP Kemendagri dalam acara sosialisasi pengisian indeks inovasi daerah tersebut mengatakan, akan ada beberapa tahapan hingga pelaksanaan IGA. Beberapa tahapan tersebut dimulai dari pengisian indeks inovasi daerah oleh pemerintah di daerah sebagai tahapan penjurian, yang akan dilaksanakan selama satu bulan yaitu pada September – Oktober 2018.

“Seminggu kemudian akan dilakukan pengukuran indeks. Pengukuran tersebut akan dilakukan otomatis oleh komputer. Kemudian selanjutnya tahap presentasi oleh Kepala Daerah nominasi dengan penilaian tertinggi. Selanjutnya akan dilakukan validasi ke daerah, baru kemudian akan ditetapkan sebagai pemenang dalam IGA,” terang Adi.

Adapun menurut Adi, indikator yang digunakan dalam penilaian IGA, yang ada dalam sistem indeks inovasi daerah terdapat 35 indikator. 35 indikator tersebut, menurut Adi sudah dihimpun dari ratusan indikator dalam semua penilaian, yang dilakukan pemerintah ketika menilai pemerintahan daerah dari berbagai kementerian/lembaga.

Adapun dari 35 indikator tersebut, hanya poin visi misi yang peilaiannya dilakukan oleh para juri. Pasalnya visi misi merupakan data kualitatif.

“Apakah nantinya visi misi ini mengandung unsur kebaruan/inovasi atau tidak, ini akan dilakukan oleh juri. Sementara sisanya akan otomatis terhitung melalui teknologi,” tegasnya ketika menjadi narasumber acara tersebut.

Acara juga diisi dengan praktik pengisian data-data yang harus dimasukkan peserta dalam aplikasi indeks inovasi daerah. (MSR)

KPBU Pengelolaan Sampah Perlu Kejelasan Regulasi

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Pembangunan dan Keuangan Daerah Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri (BPP Kemendagri) menyimpulkan, kerja sama pengelolaan sampah melalui skema KPBU (Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha) di daerah selama ini belum cukup optimal. Hal itu disampaikan oleh Kepala Puslitbang Pembangunan dan Keuda BPP Kemendagri Horas Mauritz Panjaitan dalam acara Seminar Laporan Akhir Kerja Sama Pengelolaan Sampah di Aula BPP Kemendagri 12/9.

Penelitian yang dilakukan Puslitbang Pembangunan dan Keuda, menyatakan dari 6 lokasi penelitian di daerah, sejauh ini hanya Kota Surabaya dan DKI Jakarta yang sudah memasuki tahap operasi. Puslitbang Pembangunan dan Keuda melakukan penelitian KPBU pengelolaan sampah di 6 lokasi penelitian di antaranya, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Kota Batam, Kota Surabaya, dan Kota Tangerang.

“Sejauh ini hanya *Intermediate Treatment Facility (ITF)* Sunter di Jakarta dan TPPAS Bendowo di Surabaya yang sudah beroperasi. Sementara untuk Jawa Barat baru memasuki tahap konstruksi. Sisanya masih dalam tahap perencanaan dan penyiapan,” ucapnya.

Belum optimalnya pengelolaan sampah melalui skema KPBU, juga diakui Ray Ferza Ketua Tim Penelitian ini. Menurut Ray, dikarenakan kurangnya regulasi yang memayungi kerja sama tersebut. Sebagai contoh TPPAS Nam-

bo di Jawa Barat harus menunggu satu tahun untuk bisa beroperasi pada akhir tahun ini. Kesepakatan *tipping fee* yang belum tercapai, serta *financial close* antara bank dengan konsorsium yang terhambat, menyebabkan pengelolaan TPPAS Nambo masih jalan di tempat.

Agung Mulyana dari PPPLI (Persatuan Pengusaha Pengolah Limbah Indonesia) membenarkan. Menurut Agung ada tiga hal tantangan kerja sama pengelolaan sampah. *Pertama* dari sisi hukum, perlu kejelasan landasan hukum kerja sama yang dilakukan pemerintah dengan KPBU. *Kedua* di bidang teknologi, diperlukan teknologi canggih yang mudah dipahami dan dioperasikan, tidak lekas usang dan relatif murah dibandingkan dengan teknologi sejenis. *Ketiga*, bidang pembiayaan. Perlu kredit jangka panjang dengan suku bunga tinggi, selain itu harus diikuti oleh kurs nilai tukar yang stabil.

“Perlu diatur kejelasan regulasi sehingga tidak meragukan konsorsium. Seperti unsur harga hasil produksi pengolahan, serta harga *tipping fee* yang dibayarkan. Kenapa harus sama dan berbeda di setiap daerah. Nominalnya harus jelas alasannya,” katanya.

Terkait hal itu, Reghi Perdana Kepala Sub Direktorat Kerjasama Pemerintah Swasta dan Rancang Bangun Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasi-



onal menyarankan, agar KPBU berjalan sukses, pemerintah harus bisa memastikan beberapa hal di antaranya; Tersedianya alokasi kebutuhan pendanaan yang cukup untuk pelaksanaan tahap perencanaan, penyiapan, dan transaksi KPBU; Proses perencanaan yang baik dan identifikasi proyek infrastruktur yang tepat. Proses penyiapan KPBU yang baik dengan didukung dengan dokumen studi yang dapat dipertanggungjawabkan; Alokasi risiko yang tepat beserta rencana mitigasinya; Proses pengadaan KPBU transparan, cepat dan akuntabel; dan Pemberian dukungan pemerintah yang tepat untuk meningkatkan kelayakan proyek KPBU.

“Selama ini belum ada pedoman skema KPBU dalam pengelolaan sampah. Sejauh ini baru ada 2 pedoman skema KPBU yaitu KPBU bidang kesehatan di Kementerian Kesehatan, dan KPBU bidang air minum,” terangnya.

Dari hasil penelitian tersebut, Ray menegaskan, Puslitbang Pembangunan dan Keuda merekomendasikan beberapa hal di antaranya, diperlukan peraturan menteri mengenai *tipping fee*, dan memastikan pembinaan dan pengawasan KPBU. Selain itu, perlunya mengoptimalkan BPP di daerah dan pembentukan Badan Pengelola Sampah di tingkat nasional.

“Pemerintah juga harus menerbitkan peraturan untuk inovasi teknologi produk akhir sampah, seperti RDF,” jelas Ray.

Mauritz juga berharap, hasil kajian BPP Kemendagri bisa memberikan rekomendasi bagi Kementerian Dalam Negeri. Beberapa rekomendasi tersebut di antaranya; pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM perlu menyusun produk hukum tingkat kementerian, yang dapat menjadi dasar pedoman harga jual-beli *Refuse Derived Fuel (RDF)*.

“Di sisi lain melalui Kementerian Dalam Negeri, Permendagri No 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah perlu direvisi dengan penekanan memperbaharui kesinambungan dengan peraturan terbaru. Seperti Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri LH yang telah terbit setelah tahun 2010 sebagai turunan dari UU No 18 Tahun 2008. Selain itu, perlu menambah ketentuan yang

mampu menjadi pedoman pembiayaan pengelolaan sampah (*tipping fee*), serta mendelegasikan ketentuan tersebut pada produk hukum setingkat regulasi provinsi, mengingat variasi antar kabupaten kota dalam besaran angka *tipping fee*,” terangnya.

Variasi besaran *tipping fee* sendiri telah menjadi fenomena global sehingga perlu dilakukan sistem kluster penentuan besaran *tipping fee* kabupaten/kota yang diletakkan di tingkat Provinsi.

“Pemerintah harus memastikan fungsi pembinaan dan pengawasan kerja sama yang dilakukan pemerintah daerah berjalan optimal dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, terutama pelaksanaan simpul KPBU yang merupakan mandat dari prosedur KPBU, Perpres No 38 Tahun 2015, serta perlu mengoordinasikan dengan K/L terkait dalam rangka penyediaan dana tambahan bagi pembiayaan KPBU dalam instrumen dana transfer pusat ke daerah,” tutupnya. (MSR)

“
PEMERINTAH
JUGA HARUS
MENERBITKAN
PERATURAN UNTUK
INOVASI TEKNOLOGI
PRODUK AKHIR
SAMPAH, SEPERTI
RDF

MENCARI SOLUSI PERMASALAHAN PILKADA PAPUA

Dalam kehidupan politik, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan pemenuhan hak politik masyarakat dan hak otonomi yang diberikan kepada daerah dalam memilih Kepala Daerahnya sendiri. Di Papua, Pilkada dimaknai tidak hanya sebatas pesta demokrasi penduduk setempat, tetapi juga diselimuti dengan tradisi budaya warga sekitar.

Papua memiliki karakteristik berdemokrasi yang berbeda dengan wilayah lainnya. Sistem pemilunya tidak sama, mereka diatur dalam otonomi khusus (otsus) sebagai daerah istimewa Papua. Sistem itu yang dikenal banyak pihak dengan sebutan sistem Noken, (sistem menggunakan kotak suara Noken/benda berupa wadah/tas khas Papua yang digunakan sebagai simbol ke-khas-an Pilkada Papua).

Dalam sistem ini, kepala suku memiliki hak penuh untuk menyalurkan suara warganya. Hal ini merupakan konsekuensi sang kepala suku sebagai pemimpin politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

“Ketidakpatuhan pada keputusan kepala suku akan menjadi pemicu konflik Pilkada di Papua,” kata Syabnikmat Kepala Puslitbang Otda, Kesatuan, Politik dan PUM BPP Kemendagri dalam acara Seminar Laporan Akhir Kajian Strategis mengenai Strategi Kebijakan Pemilihan Kepala Daerah di Papua dan Papua Barat pada Kamis (30/8) di Aula BPP.

Tidak hanya sistem noken yang berpotensi konflik dalam Pilkada Papua, fenomena yang terjadi di lapangan seringkali menunjukkan bahwa penyelenggara pemilu di Papua cenderung tidak bersikap independen sebagai lembaga negara yang sejatinya men-

jadi tumpuan peradilan permasalahan Pilkada. Menurut Bupati Mimika Eltinus Omaleng, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua cenderung tidak independen.

“Di sana itu, KPU cenderung tidak independen, sering terjadi yang menang seharusnya nomor urut 1 tapi malah nomor 3 yang dilantik, kalau sudah begitu, biasanya ketegangan antarsuku juga bermain,” terangnya.

Selain itu, masalah di Papua dan Papua Barat menurut Eltinus, juga terkait Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tidak sesuai dan sulitnya akses Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP El) sebagai dokumen resmi pendataan DPT. “Di kami juga kadang-kadang sudah didata 500 orang misalnya, tapi nanti pas hari H bisa 15 ribu pemilih, entahlah mereka menyebutnya dengan istilah DPT jadi. Pokoknya jadinya seperti itu. Itulah yang menyebabkan kerusuhan dan ketegangan menjelang Pilkada,” paparnya.

Dia juga menambahkan, biasanya kalau sudah ribut-ribut begitu, pemerintah setempat perlu mengeluarkan biaya tambahan lagi untuk anggaran pengamanan. “Jadi tidak hanya soal persiapan distribusi dan TPS segala macam, tetapi juga dana pengamanan dari pemerintah dan perwakilan tiap suku yang bisa meredam konflik juga perlu biaya lagi,” terangnya.

Syabnikmat menjelaskan, penyelenggara Pilkada Papua, pada 2018 bahkan hingga menelan angka Rp 1,33 triliun, anggaran itu terdiri dari KPU Rp 850 miliar, Banwaslu Rp 230 miliar, dan Polda (pengamanan) Rp 230 miliar. “Konflik di sana terlalu fanatik, bahkan terjadi pembakaran rumah Gubernur Papua Barat pada 2011,” jelasnya.

Oleh karena itu, Puslitbang Otda, Kesatuan, Politik dan PUM memberikan saran akan pentingnya pendekatan budaya sebagai pijakan, dalam pembangunan dan edukasi politik masyarakat lokal.

“Kapasitas masyarakat perlu ditingkatkan, khususnya dalam pendidikan politik agar partisipasi bukan semata mobilisasi. Dalam hal ini partai politik memiliki tanggung jawab moral melaksanakan fungsinya sebagai pilar penting demokrasi sekaligus aset negara untuk melakukan pencerahan dan edukasi kepada masyarakat lokal, se-

lain itu perlu pembenahan daftar pemilih dan pemenuhan KTP El sebagai dokumen resmi,” tambahnya.

Syabnikmat menilai, pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur selama ini tidak relevan dan signifikan bila dilaksanakan secara langsung, mengingat beragam persoalan yang terjadi di Papua dan Papua Barat yang juga menghabiskan banyak anggaran.

“Kepala Daerah adalah wakil dari pemerintah pusat di daerah, oleh karena itu pemilihan Kepala Daerah cukup dengan dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Papua, hal ini sesuai dengan UU No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua,” katanya.

Namun, hal ini mendapat masukan dari berbagai pihak, termasuk Eltinus. Ia meragukan kualitas independensi parpol dalam DPRD jika Pilkada Papua dan Papua Barat dilakukan secara

tidak langsung. “Apakah bisa anggota dewan itu melepas baju kepentingan parpolnya? Saya rasa tidak, yang perlu dibenahi justru adalah bagaimana menciptakan demokrasi tanpa konflik, bukan membunuh demokrasi Papua itu sendiri. Kemendagri juga perlu berbenah dalam hal DPT dan rekam KTP el agar tidak terjadi kecurangan,” tandasnya.

Mendengar hal tersebut, Syabnikmat menerima masukan dari peserta yang hadir, secara pribadi ia menyampaikan, sebenarnya penelitian ini bertujuan untuk menciptakan Pilkada yang damai, aman, efisien, dan terciptanya demokrasi yang tidak kebablasan di tengah masyarakat Papua. “Kami berharap kedamaian dan kemudahan pilkada di beberapa tempat yang berhasil juga tercipta di Papua,” harapnya.

Berkaca pada hasil kajian

Sebelumnya, Hasil kajian Puslitbang Otda, Politik, dan PUM BPP Kemendagri menemukan belum efektifnya penyelenggaraan pilkada di Papua dan Papua Barat.

Pilkada di Papua dan Papua Barat belum menunjukkan hasil yang substantif, yang justru malah menciptakan konflik antarkelompok. Di sisi lain, Pilkada belum merepresentasikan prinsip jurdil. Partisipasi masyarakat juga terbilang rendah.

Selain itu, sistem *noken* yang berlaku ternyata juga memberikan edukasi politik yang negatif. Belum mampu merepresentasikan realitas kekhasan nilai-nilai budaya masyarakat lokal. Malah disinyalasi terjadi manipulasi.

Hasil penelitian yang dilakukan Puslitbang Otda, Politik, PUM merekomendasikan beberapa hal di antaranya; pemilihan gubernur dan wakil gubernur Papua dan Papua Barat bisa dilakukan dengan musyawarah mufakat melalui Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), yang mendapat rekomendasi dari Majelis Permusyawaratan Rakyat Papua (MPRP). Sebagaimana amanat UUD Tahun 1945 dan UU No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua.

Selain itu, rekomendasi juga menekankan Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri harus memfasilitasi penyiapan draft naskah akademis dan draft revisi peraturan perundang-undangan pelaksanaan pemilihan kepala daerah Papua dan Papua Barat.

Rekomendasi selanjutnya menekankan agar Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri dapat memprioritaskan/memfasilitasi pendidikan politik agar partisipasi politik lebih meningkat.

“Tentu hal itu harus didukung pula oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri agar memprioritaskan pembenahan daftar pemilih tetap serta memenuhi KTP elektronik bagi masyarakat Papua sebagai prasyarat peserta pilkada,” tutup Syabnikmat. (IFR/MSR)



PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN DI DAERAH PERLU DIOPTIMALKAN



JAKARTA - Dalam seminar “Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PWK)” yang diselenggarakan Puslitbang Otda, Politik dan Pemerintahan Umum BPP Kemendagri, peneliti BPP Kemendagri Catur Wibowo mengatakan pelaksanaan kebijakan pendidikan wawasan kebangsaan di daerah belum optimal. Pernyataan tersebut mengacu pada hasil penelitian yang dilakukan Puslitbang Otda, Politik, dan PUM BPP di lima daerah di Indonesia.

“Kita melakukan penelitian di lima provinsi, yaitu Provinsi Banten, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi NTT, dan Provinsi Kalimantan Selatan. Adapun beberapa faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan PWK ini bisa dilihat dari struktur birokrasi, sumber daya, disposisi, dan komunikasi, “ucapnya di Aula BPP Kemendagri pada Selasa (3/10).

Dari lima lokus yang menjadi objek kajian, Puslitbang Otda, Politik, dan PUM BPP menyimpulkan, kebijakan pendidikan PWK di provinsi Kepulauan Riau, NTT, dan Banten tergolong buruk. Adapun dua provinsi seperti Kalimantan Selatan dan Jawa Tengah dikatakan baik.

Menurut Catur beberapa faktor penghambat pelaksanaan kebijakan pendidikan wawasan kebangsaan (PWK) di daerah, misalnya dalam hal birokrasi, kerja sama antara Ditjen Polpum Kemendagri, Gubernur, Badan Kesbangpol Provinsi, para Pengurus PPWK di daerah, termasuk DPRD tidak terlaksana.

Catur juga menambahkan, permasalahan lainnya seperti SOP pelaksanaan kebijakan PWK di Provinsi yang belum dibuat, belum terlihatnya penyebaran tugas dan tanggung jawab Gubernur dan DPRD setempat, serta belum adanya koordinasi yang dilakukan Gubernur dan DPRD setempat.

Direktur Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan Kemendagri Prabawa Eka Soesanta menyangkal pernyataan Catur yang menyatakan, tidak terlaksananya koordinasi yang dilakukan Ditjen Polpum dengan daerah.

Menurut Prabawa, selama ini Ditjen Polpum aktif melakukan pembinaan kepada daerah dengan indeks demokrasi dan toleransi yang paling rendah. “Tidak mungkin Ditjen Polpum melakukan turun langsung ke semua daerah, karena dana kita juga terbatas. Jika tidak melakukan pembi-

naan itu juga salah, karena belum lama ini kita baru saja melaksanakan Rakor di Bali dan mengundang lembaga kesbangpol se-Indonesia,” tuturnya.

Prabawa menyarankan beberapa hal terkait hasil kajian peneliti BPP Kemendagri. Menurutnya sebelum menyimpulkan kebijakan PWK di daerah, harus disebutkan dulu berapa indeks demokrasi, indeks toleransi di daerah yang menjadi lokus kajian. “Di dalam kajian belum muncul itu, bagaimana indeks demokrasi, bagaimana pusat pendidikan PWK di daerah, itu harus dikupas dulu. Baru berbicara kebijakan PWK,” sarannya.

Hasil penelitian Puslitbang Otda, Politik, dan PUM memberikan rekomendasi, pendanaan PWK perlu dialokasikan secara tersendiri dan memadai dalam APBD Provinsi, agar seluruh kegiatan PWK di Provinsi (khususnya kegiatan *training of facilitator*, *outbound*, permainan, dan cerdas cermat) dapat dilaksanakan.

“Rekomendasi berikutnya adalah pendanaan pelaksanaan kegiatan PWK di Provinsi jangan hanya ditempelkan pada pendanaan anggaran rutin di Badan Kesbangpol Provinsi. Gubernur perlu melakukan peninjauan terhadap pelaksanaan PPWK di daerah ini, walaupun para Pengurus PPWK di daerah bersifat “*ex officio*”, tetapi komitmennya untuk melaksanakan pelaksanaan kebijakan PWK di daerah harus tetap tinggi,” ucap Catur.

Dalam Permendagri No 71 Tahun 2012 Tentang Pedoman PWK, salah satu tujuan dari pelaksanaan kebijakan PWK di daerah adalah mengoptimalkan pengembangan dan pelaksanaan nilai kebangsaan guna pemberdayaan dan penguatan kesadaran berbangsa dan bernegara yang berlandaskan pada nilai Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. (MSR)

PENTINGNYA GERAKAN INDONESIA SADAR ADMINDUK

Saat ini pemanfaatan data kependudukan untuk semua keperluan, baik di pemerintahan maupun di lembaga sudah semakin meningkat. Tidak berlebihan pula, jika ada yang mengatakan “kualitas penduduk suatu masyarakat/bangsa, berkorelasi positif dengan tertib administrasi kependudukan”. Namun sayangnya, permasalahan kepemilikan dokumen kependudukan masih belum dianggap penting bagi sebagian masyarakat Indonesia. Hal itu perlu menjadi perhatian bersama, selain untuk menjamin hak-hak sebagai warga negara juga dibutuhkan untuk pemutakhiran data kependudukan, dalam rangka tersedianya data kependudukan yang valid.

Salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan bagi masyarakat, dapat dilakukan dengan program Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA).

Menurut **Gatot Tri Laksono, Kepala Bidang Penelitian Kependudukan dan Pencatatan Sipil, BPP Kemendagri**, GISA merupakan salah satu langkah yang efektif, selain untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan. Gerakan ini juga bisa membantu meningkatkan akurasi data kependudukan yang terintegrasi dengan Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK).

Kesadaran tersebut ditunjukkan dengan 4 hal, yakni kesadaran akan pentingnya dokumen kependudukan, pentingnya pemanfaatan data kependudukan, pentingnya pemutakhiran



data kependudukan, dan pentingnya pelayanan administrasi kependudukan yang membahagiakan rakyat. “Targetnya adalah masyarakat, aparatur pelayanan Dukcapil, dan lembaga pengguna (pemerintah dan swasta) yang mulai ditingkatkan di desa/kelurahan, kabupaten/kota, dan provinsi,” tuturnya.

Teknis penerapan GISA adalah 1 kecamatan minimal harus terbentuk 1 desa/kelurahan sadar Adminduk, 1 kabupaten/kota minimal terbentuk 1 kecamatan sadar Adminduk, dan 1 provinsi minimal terbentuk 1 kabupaten/kota sadar Adminduk.

Puncak akhir dari GISA adalah terwujudnya Indonesia yang sadar administrasi kependudukan, sehingga terwujud tertib administrasi kependudukan sebagaimana amanat UU No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Gatot mengatakan, GISA sepatutnya menjadi gerakan nasional yang diperjuangkan oleh Presiden RI. “Mengedepankan upaya promosi dan pembinaan sadar hak-hak sipil, tanpa mengesampingkan upaya penegakan hukum kewajiban-kewajiban penduduk dan tanggung jawab sebagai

warga negara Indonesia dengan melibatkan seluruh komponen bangsa dalam memasyarakatkan paradigma tertib dokumen kependudukan,” jelasnya.

Selain itu, menurut Gatot, untuk menyukseskan GISA, tidak bisa hanya mengandalkan peran Ditjen Dukcapil Kemendagri semata, tapi peran Kementerian dan Lembaga di sektor lainnya juga turut menentukan. “Dengan ditunjang peran serta seluruh lapisan masyarakat, mulai dari individu, keluarga, dan masyarakat, akademisi, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi profesi dalam menggerakkan anggotanya, agar berperilaku tertib dalam kepemilikan dokumen kependudukan dan tertib hukum,” paparnya.

Oleh karena itu, sudah sepatutnya kita (pemerintah-*red*) mengingatkan masyarakat untuk memahami hak-hak sipilnya dan bagaimana untuk efektif mengakses GISA, yaitu dengan melalui gerakan masyarakat sadar akan manfaat kepemilikan dokumen-dokumen kependudukan/akta catatan sipil yang relevan dengan peristiwa yang dialaminya, guna mewujudkan Indonesia Tertib Administrasi Kependudukan. (IFR)



LAPORAN UTAMA

REFORMASI BIROKRASI BPP KEMENDAGRI

Sejatinya Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) merupakan sebuah lembaga bergengsi, yang bisa menjadi lembaga think tank suatu negara. Setiap kebijakan yang lahir mestinya berdasarkan hasil kajian dan penelitian BPP. Sehingga suatu kebijakan tidak terkesan menimbulkan 'uji coba' di tengah masyarakat dengan hadirnya berulang kali revisi kebijakan. Namun sayangnya cita-cita tersebut masih jauh dari apa yang diharapkan. Permasalahan klasik seperti anggaran terbatas atau Sumber Daya Manusia (SDM) yang tidak mumpuni kerap menyelimuti berbagai persoalan BPP. Lantas bagaimana sebaiknya?

Pada pertengahan Agustus lalu, tepatnya sehari sebelum memperingati Kemerdekaan Indonesia yang ke-73, Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri (BPP Kemendagri) kedatangan tamu dari Kementerian Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) untuk evaluasi kinerja tahunan seperti tahun-tahun sebelumnya.

Seluruh Kepala Pusat Litbang, Pejabat Eselon I hingga IV diundang dalam rapat evaluasi tersebut, termasuk Mohammad Noval, Kepala Bagian Perencanaan BPP Kemendagri. Sebagai 'penjaga gawang' seluruh kegiatan yang ada di BPP, tentu Noval tahu betul apa dan bagaimana progres kerja seluruh pegawai BPP Kemendagri, terutama yang ada pada ke-empat pusat litbang BPP.

Pada kesempatan itu, Noval banyak memberikan gambaran bagaimana kondisi BPP Kemendagri sebagai lembaga *think tank* negara, dan juga solusi bagaimana menghadapi beragam permasalahan yang kerap dilanda oleh BPP, baik BPP pusat maupun daerah.

"Pertama kita harus tahu apa fungsi dan jenis kelitbangan," katanya mengawali pembicaraan.

Menurut Noval, secara tegas sebenarnya fungsi kelitbangan adalah terkait (1) Penelitian dengan *output*-nya berupa rekomendasi, (2) Pengkajian (baik pengkajian strategis, aktual, maupun kompetitif) dengan *output*-nya berupa rekomendasi, (3) Pengembangan dengan *output*-nya berupa naskah akademik dan rancangan regulasi permodelan kebijakan/program, (4) Perencanaan dengan *output*-nya berupa pedoman umum/teknis pelaksanaan, hingga (5) Evaluasi kebijakan dengan *output*-nya berupa rekomendasi apakah kebijakan ini dilanjutkan atau dicabut. Fungsi ini jelas tercatat pada UU No 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional, Litbang & Penerapan Iptek.



"Peran dan fungsi Badan Litbang, yakni untuk mengorganisasikan pembentukan SDM kelitbangan, lalu untuk membentuk iklim dan memberikan dukungan penyelenggaraan kelitbangan, dan terakhir untuk memajukan kelitbangan, serta mencari invensi dan potensi pendaftarannya," paparnya.

Selain itu, dalam UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menjelaskan, BPP berperan menyediakan naskah akademis dan Pokok Pemikiran berbasis ilmiah sebagai bahan baku penyusunan peraturan perundang-undangan guna efektivitas dan meminima-

lisasi dampak negatif suatu kebijakan.

"Tapi sayangnya itu masih jauh dari harapan kita, makanya dalam rapat kali ini mari kita coba klasifikasikan terlebih dahulu permasalahan selama ini, agar juga jelas bagaimana solusi lembaga litbang di masa yang akan datang," terangnya.

Noval menjelaskan, permasalahan yang selama ini kerap menempel pada BPP adalah terkait struktur lembaga dan nomenklatur tugas fungsi (tusi) yang tidak jelas. "Struktur lembaganya bersifat struktural, padahal kita lembaga fungsional. Namun porsi jabatan struktural jauh lebih besar," jelasnya.

Dia juga menambahkan, masalah penataan dan pemfungsian SDM yang

kurang kompeten di tataran internal kerap terjadi, sehingga membuat kinerja BPP menjadi tidak optimal. Hal itu menurut Noval hampir terjadi bahkan di semua komponen. "Terbukti dari hasil dari program/kegiatan kelitbangan yang belum fokus dan terarah sehingga belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan dan harapan Kemendagri," terangnya.

Apalagi diakui Noval peningkatan kualitas SDM juga terlihat dari pelatihan/diklat. Di BPP, kebanyakan yang mengikuti diklat itu ialah orang yang kurang berkontribusi dalam kinerja sehari-hari. "Daripada dia mengganggu pekerjaan sehari-hari, lebih baik diikutkan diklat saja, makanya di sini *tuh*, justru yang jarang bekerja sertifikat

diklatnya lebih banyak," cerita Noval.

Selain itu, masalah eksternal meliputi dukungan *stakeholder* (komponen dan mitra kerja) juga masih lemah dimanfaatkan hasil kelitbangannya.

"Jadi terkesan, ya dimanfaatkan syukur, *nggak* dimanfaatkan *nggak* apa-apa," selorohnya.

Anggaran BPP yang kurang memadai diakui Noval juga menjadi salah satu permasalahan eksternal dalam hal dukungan dana. "Dana yang diberikan kurang memadai, baik dari segi pelaksanaan sarana dan prasarana kerja," katanya.

Strategi tindak lanjut

Untuk mendorong peningkatan kinerja dan meminimalisasi berbagai persoalan di atas, Noval menyarankan agar BPP perlu ditata kembali organisasinya agar lebih berorientasi kinerja, berbasis fungsional dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM BPP, terutama untuk jabatan fungsional peneliti serta peningkatan anggaran BPP diiringi dengan peningkatan kualitas program yang lebih implementatif.

Hal ini perlu dilakukan mengingat posisi strategis BPP sebagai posisi sentral dalam memantapkan kualitas kebijakan Pemerintahan Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

"BPP itu punya peran di awal, di tengah dan di akhir. Di awal itu sebagai formulator dan motivator, artinya merumuskan kebijakan. Selain itu juga bertugas memotivasi BPP Daerah supaya bisa berkembang menjadi lembaga strategis. BPP juga bersifat katalisator, artinya memantau supaya kebijakan-kebijakan ini tidak berhenti di tengah jalan, bisa terimplementasi dengan baik, jangan ada yang melencong. Di akhir katalisator, kita mendampingi komponen lain atau BPP Daerah bagaimana supaya mereka bisa implementatif dan memonitor kebijakan dalam negeri. jadi kita se-

benarnya juga merupakan pendamping para komponen di Kemendagri," jelas Noval.

Makanya kita melihat tinjauan perubahan yang paling prinsip di litbang, kata Noval. Yang dimaksud paling prinsip itu adalah perlu menetapkan dulu kontribusi dan capaian kinerja yang diharapkan oleh Kemendagri. "Kalau memang tidak ada yang berfungsi dari litbang itu, ya sudah hapus saja. Dripada lahir tapi tidak bermanfaat," paparnya.

Tapi Noval tetap mengatakan bahwa keberadaan BPP masih penting, hanya saja pemerintah harus pandai memberdayakannya. "Pertama yang harus dilakukan adalah menetapkan nomenklatur yang jelas. Nomenklatur BPP harus secara jelas disertai dengan fungsi dan tugas yang jelas agar tidak sekadar mengikuti Kementerian/Lembaga (K/L) lain, Jangan misalnya K/L lain punya BPP, kita terus harus punya BPP. Bukan sekadar itu, tapi tusi BPP yang sebenarnya adalah melaksanakan penelitian dan pengembangan di Kementerian Dalam Negeri. Karena nomenklaturnya di bidang Pemerintahan Dalam Negeri, sekaligus untuk membantu presiden, maka kita harus rumuskan operasional kegiatannya seperti apa," jelas Noval kepada seluruh peserta rapat.

Kemudian menurut Noval, tusi BPP sebenarnya tidak harus diparalelkan atau menjadi miniatur dari Ditjen lain di Kemendagri, tapi lebih difungsikan kinerjanya. Misalnya, Pusat Litbang (Puslitbang) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum), itu *kan* merupakan miniatur dari komponen Ditjen Otonomi Daerah (Otda) dan Polpum, termasuk juga dengan Puslitbang lainnya. "Tidak harus seperti itu, tekankan dulu kinerjanya, sehingga membentuk arah. Apakah sebagai fungsi miniatur atau fungsi yang lain," imbuhnya.

Lalu terkait pendalaman substansi, apakah *output* BPP hanya sebatas rekomendasi atau fungsi yang lainnya, itu juga yang harus dipertegas menurut

Noval. “Kemudian kita lihat kedalaman substansi yang diharapkan, apakah cukup tindakan regulasi atau kebijakan dasar saja? Apakah sebagai Badan Litbang atau Badan Pengkajian? Karena rata-rata *output* kita hanya berupa rekomendasi, padahal kita sebenarnya di tataran penelitian kebijakan, yang tidak hanya berperan sebagai litbang di Kemendagri, namun juga disusun sampai penyusunan kebijakan,” tandasnya.

Penjelasan nomenklatur itu juga harus disertai dengan penyusunan tisi yang jelas, dengan menghindari kalimat general agar tidak ada penafsiran yang berbeda antara tugas satu dengan yang lainnya, semuanya harus spesifik, seperti yang terjadi pada Kementerian Keuangan menurut Noval. “Di Kemenkeu ada spesifikasinya, ada yang namanya BKF (Badan Kebijakan Fiskal) dalam Permenkeu mereka BKF diatur sendiri, tidak masuk dalam komponen lain,” terangnya.

Apalagi Permendagri No 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendagri, menyebutkan bahwa salah satu fungsi BPP adalah “koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah”, hal itu tentu melekat di fungsi bidang, namun fungsi ini tidak terperinci pada fungsi di tingkat pelaksanaannya. “Fungsi itu hanya melekat di Eselon I. Jadi terkesan liar, kalau ada yang membutuhkan kajian tentang A, kita cari *lah* Puslitbang yang mirip A,” tuturnya.

Selain itu, fungsi BPP juga harus terkait pengelolaan data, bukan di Pusat Data Informasi (Pusdatin) “Kalau Pusdatin dalam masalah jaringan oke *lah*, tapi pengelolaan datanya seharusnya ada di BPP. Karena sampai sekarang kami mengonsolidasi data tidak ketemu. Datanya adalah hasil penelitian dan pengembangan BPP itu sendiri, karena pada saat BPP diminta data, tidak pernah siap soal data. Datanya semua ada di komponen. Kayak misalnya waktu itu, Pak Gamawan (Mantan Mendagri) meminta data terkait jumlah Provinsi/Kabupaten/Kota versi

Kemendagri sendiri, bukan Badan Pusat Statistik (BPS) ke BPP, BPP tidak punya datanya, akhirnya kami cari ke semua komponen, dan itu kebetulan ada di Ditjen Otda,” ceritanya.

Soal SDM

Ketegasan soal nomenklatur dan fungsi memang menjadi unsur yang paling prinsipil untuk mereformasi birokrasi BPP, tapi persoalan kapasitas SDM juga penting direformasi meski sudah memiliki nomenklatur yang jelas. Di BPP sendiri, terdapat 4 Puslitbang, yakni Puslitbang Pembangunan dan Keuangan Daerah, Puslitbang Inovasi Daerah, Puslitbang Otonomi Daerah, Kesatuan, Politik, dan Pemerintahan Umum, dan Puslitbang Administrasi

“PENJELASAN NOMENKLATUR ITU JUGA HARUS DISERTAI DENGAN PENYUSUNAN TISI YANG JELAS, DENGAN MENGHINDARI KALIMAT GENERAL AGAR TIDAK ADA PENAFSIRAN YANG BERBEDA ANTARA TUGAS SATU DENGAN YANG LAINNYA

Kewilayahan, Pemerintah Desa, dan Kependudukan. Dari ke-4 Puslitbang tersebut, terdiri dari 12 Pejabat Eselon III (Kabid), dan 52 Pejabat Eselon IV (Kasubbid termasuk structural).

“Komposisi jabatan struktural dimaksud perlu dicermati kembali terkait dengan capaian kinerja yang diharapkan dari keberadaan suatu BPP. Struktur organisasi BPP seyogyanya berorientasi atau bertumpu pada ketersediaan dan keberadaan Jabatan Fungsional Keahlian secara memadai,” tandasnya.

Alternatifnya, dari komposisi tersebut, BPP harus mempertegas pembagian

fungsi jabatan struktural (lebih pada fungsi manajemen dan fasilitasi) dan kelompok jabatan fungsional (sebagai pelaksana kegiatan kelitbangan), dan juga merampingkan rumpun jabatan struktural di setiap Puslitbang. “Dengan cara terus mendorong ketersediaan personil pada kelompok jabatan fungsional keahlian,” katanya.

Jadi secara menyeluruh, kalau ditanya mana lebih dulu yang seharusnya direformasi, Noval mengatakan sebaiknya lihat dulu fungsi BPP. Kalau memang BPP dibutuhkan, pertegas dulu fungsi dan nomenklatur seperti Badan Pengkajian Pemerintah misalnya, barulah SDM-nya disiapkan. “Anggapan jangan seperti ini: *Ah*, karena orangnya (penelitiannya) tidak ada (tidak berkapasitas), kita bubarkan saja lembaganya. Jangan begitu, kita *kan* pemerintah, seharusnya soal Aparatur Sipil Negara (ASN) bisa kita atur dengan mudah,” tutupnya.

Mendengar pendapat tersebut, tim dari KemanPAN RB sebenarnya tidak banyak berbicara terkait beragam pemaparan yang diucapkan Noval. Tim KemenPAN-RB seolah seperti *sponsor* yang menyerap informasi dalam rapat penilaian kinerja 17 Kementerian dan Lembaga itu. Belakangan *Tim Media BPP* baru memahami, bahwa utusan yang datang adalah bukan orang asli KemenPAN-RB, melainkan konsultan yang sudah sering bekerja sama dengan KemenPAN-RB dalam upaya independensi pada tataran evaluasi dan penilaian.

“Apa yang disampaikan Pak Noval ini saya sepakat, lembaga seperti BPP memang semestinya tetap ada, namun fungsinya yang harus dioptimalkan, untuk itu kami ingin mendengar terlebih dahulu segala penjelasan dan masukan dari bapak/ibu,” terang Chandra Wuitono, ketua tim evaluasi BPP Kemendagri dari KemenPAN-RB. (IFR)



LAPORAN UTAMA

EVALUASI SECARA MENYELURUH

Guna menilai dan mengawal pelaksanaan RB (Reformasi Birokrasi) di Kementerian/Lembaga dan Pemda, Kementerian PAN-RB memandang perlu dilakukan evaluasi dan penilaian secara mandiri terhadap pelaksanaan RB oleh masing-masing K/L.

“Kenapa lembaga perlu dievaluasi? Karena menuju 100 tahun Indonesia (2045) yang menggencarkan banyak pembangunan, di antaranya di bidang SDM (Sumber Daya Manusia), ekonomi, pemerataan dan pembangunan, serta ketahanan nasional,” kata Dyah Laksita, Koordinator Pelaksana Reformasi Birokrasi BPP Kemendagri yang sempat mengikuti rutin kegiatan yang dilaksanakan KemenPAN-RB pada 10-12 September lalu di Hotel Alila, Jakarta.

Menurut Dyah, pertemuan seluruh Komponen Kemendagri dengan KemenPAN-RB sejatinya lebih kepada seminar reformasi birokrasi yang dibawakan oleh beberapa narasumber ahli yang telah disediakan, bukan merupakan tindak lanjut rapat evaluasi di Ruang Rapat BPP Kemendagri pada medio Agustus lalu. “Jadi kami pikir itu, kami diundang untuk mendengarkan bagaimana hasil kerjanya, serta langsung me-

ngonfirmasi di tempat dengan dihadirkan kami,

rupanya isinya lebih banyak mendengarkan arahan dari narasumber,” terangnya.

Namun satu hal yang pasti, Dyah dan beberapa pejabat BPP Kemendagri yang turut hadir jadi memahami betul bagaimana seharusnya lembaganya direformasi. Sesuai dengan semangat 100 tahun Indonesia itu, pemerintah perlu menata kembali struktur organisasi yang meliputi aspek; Kompleksitas, formalisasi, dan sentralisasi menjadi aspek penting dalam evaluasi kelembagaan instansi pemerintah.

“Dalam pertemuan itu, kita jadi memahami bagaimana sebetulnya proses organisasi yang meliputi: keselarasan; tata kelola dan kepatuhan; perbaikan dan peningkatan proses; manajemen resiko; dan teknologi informasi menjadi program prioritas pemerintah saat ini,” katanya.

Dalam Peraturan Menteri PAN-RB No 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah menurut Dyah, menggunakan dua dimensi penting dalam organisasi, yaitu struktur organisasi dan proses bisnis secara internal. Pembaruan dimensi tersebut dimaksudkan untuk mempermudah bagi para pejabat perancang organisasi dan pengambil keputusan dalam menentukan struktur dan proses organisasi sesuai dengan kondisi internal dan eksternal. Kedua dimensi tersebut, merupakan hal penting untuk memotret keberadaan lembaga pemerintah yang dinamis dalam rangka meningkatkan pencapaian kinerja organisasi.

“Proses bisnis sebagaimana diatur dalam PermenPAN-RB No 19 Tahun 2018 juga disebutkan, hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi untuk menghasilkan kinerja

sesuai tujuan organisasi,” paparnya.

Untuk itu, narasumber yang hadir menurut Dyah menyarankan, kerangka penataan kelembagaan Kemendagri semestinya bisa disesuaikan dengan identitas. “Ada narasumber dari M. Nuh UGM (Universitas Gajah Mada) yang saya ingat, perlunya kerangka penataan Kemendagri, baik koordinasi antarkomponen dengan pemerintah daerah, ruang lingkupnya harus dijaga arah koordinasinya. Koordinasi horizontal yaitu antar pejabat yang memiliki hierarki sama, koordinasi vertikal dengan pejabat di bawahnya, koordinasi diagonal yakni antarpejabat atau unit yang berbeda, koordinasi fungsional yakni dengan pejabat antarunit atau antarorganisasi,” untkannya.

Kemendagri diminta fokus saja pada aspek pembangunan nasional yang sudah disebutkan barusan, “Dari semangat membangun pembangunan tersebut, masing-masing komponen di Kemendagri diminta untuk memperbaiki kualitas SDM, bisnis prosesnya, serta struktur kelembagaan melalui pemaksimalan tugas pokok dan fungsi,” kata Dyah.

Sementara itu, tugas dan fungsi (tusi) Kemendagri sebenarnya sudah termaktub dalam UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang mengatur tentang 32 urusan yang harus dilaksanakan Kemendagri (baik pemerintah pusat maupun daerah).

“Urusan ini terdiri dari urusan absolut, konkuren, dan pemerintahan. *Nah*, KemenPAN-RB sendiri sebenarnya ingin melihat apakah sudah tepat atau belum tiap fungsi di komponen itu sendiri, kalau belum tepat maka wacana merumpunkan lembaga dalam rangka efisiensi akan kembali digencarkan,” terangnya.



Evaluasi 4 Pusat

Hasil evaluasi ini akan berjangka panjang, tidak hanya memengaruhi tunjangan gaji setiap karyawannya, tetapi juga soal anggaran setiap lembaganya, dan eksistensi suatu lembaga. Apalagi ada wacana 2019 lembaga-lembaga pemerintah dirumpunkan dalam satu lembaga guna efisiensi anggaran dan fungsi.

Untuk menilai itu semua, menurut informasi dari Dyah, Chandra Wuitono, Ketua Tim Evaluasi BPP Kemendagri dari KemenPAN-RB sebenarnya sudah banyak mewawancarai pejabat Eselon II dan Kabag Perencanaan BPP Kemendagri. Pertanyaan yang diajukan dari KemenPAN-RB ke pimpinan Pusat Litbang itu meliputi soal jelaskan pemaparan tugas dan fungsi saat ini yang sesuai dalam mendukung pelaksanaan Renstra (Rencana Strategis), apa tugas fungsi yang belum optimal, apa tugas fungsi yang dapat mendukung pelaksanaan rencana pembangunan nasional ke arah 2020-2025, serta apa rekomendasi tugas fungsi dalam jabatan yang harus ada untuk arah pembangunan nasional ke depan.

Dalam jawaban yang dilontarkan oleh Kapus Litbang Adwil, Pemdes dan Kependudukan, Kurniasih mengatakan, pemerintah perlu *re-design* atau rekonsepsi terhadap mekanisme penyusunan Restra Kementerian atau RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional). “Karena selama ini penyusunan Restra Kementerian atau RPJMN tidak didasari dengan hasil kajian atau penelitian, artinya Restra Kementerian atau RPJMN yang disusun mengesampingkan kaidah-kaidah ilmiah untuk itu proses penyusunan Restra Kementerian/RPJMN perlu ditelaah kembali,” katanya.

Kurniasih juga menyarankan, untuk menjalankan arah/sasaran pembangunan nasional pada 2020-2025 secara optimal perlu dilakukan kegiatan pengkajian dan penelitian secara komprehensif terlebih dahulu sehingga penetapan arah/sasaran kebijakan pembangunan nasional ke depan hen-

daknya didasari dengan pengkajian kebijakan, penelitian yang melibatkan *stakeholder* terkait, di samping juga melalui forum diskusi publik, antara lain terkait dengan percepatan pembangunan dan pertumbuhan strategis yang cepat dan tumbuh didorong. “Keberpihakan pemerintah terhadap BPP semestinya juga perlu ditingkatkan untuk mengembangkan kajian-kajian yang kami lakukan,” terang perempuan yang baru setahun bergabung di BPP Kemendagri tersebut.

Untuk itu, ia berharap sekali hadirnya tim evaluasi KemenPAN-RB dapat mendengar segala dinamika permasalahan dan pentingnya peran BPP sebagai lembaga yang berperan dalam melahirkan kebijakan, bukan lembaga yang perlu dibubarkan karena fungsinya tidak optimal.

“Perlu membangun penggunaan jaringan teknologi informasi kelitbang antar-Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, selain itu hasil-hasil kajian dan penelitian perlu disosialisasikan/didiseminasikan secara luas sehingga keberadaan Lembaga Litbang Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat melalui publikasi hasil-hasil kajian dan penelitian,” katanya.

Sementara itu, Kepala Puslitbang Otonomi Daerah, Kesatuan Politik dan Pemerintahan Umum, Syabnikmat Nizam mengatakan, selama ini tusi Puslitbang yang dipimpennya belum sesuai dengan Restra, sebab terkendala anggaran dan SDM.

“Pemerintah sebaiknya mendukung penuh dan melibatkan BPP dalam hal kebijakan, masalah seperti anggaran dan keterbatasan SDM seharusnya tidak terjadi lagi, memaksimalkan peran peneliti dengan kualitas dan kuantitas yang terbatas tentu akan menyebabkan kinerja tidak optimal. Selain itu, kalau hendak melaksanakan pembangunan nasional, sebaiknya membuat sistem pemetaan data berkenaan dengan rencana pembangunan nasional ke depan terlebih dahulu, sebagai dasar analisis perkiraan pembangunan nasional ke



depan mencakup ipoleksbud (ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya) yang sesuai dengan bidang tugas pokok dan fungsi kami,” terangnya.

Apalagi Syabnikmat melihat, selama ini peran BPP sebagai *think tank* pembuat kebijakan belum berjalan. “BPP seharusnya bukan lagi sebagai unsur penunjang, melainkan sebagai partner bagi komponen mitra kerja yang lain. Inilah yang belum berjalan di Kemendagri,” paparnya.

Sementara itu, menurut Syafrizal, Kepala Puslitbang Inovasi Daerah, memang ada banyak sekali permasalahan yang sudah mengakar di BPP, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya oleh Syabnikmat dan Kurniasih, namun Syafrizal juga lebih menyoroti

perihal rumpun struktur birokrasi yang kurang tepat di tempatnya dengan PP No 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah yang ia pimpin.

“Ada 3 kewenangan dalam PP tersebut, yakni tata kelola, pelayanan publik, dan inovasi lainnya. Kalau melihat struktur dalam Puslitbang Inovda sendiri, ada Bidang Pengembangan Inovasi Daerah, Bidang Sumber Daya Manusia, dan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan. Dua bidang itu tidak tepat, karena fungsinya semua sudah ada di Sekretariat Bidang Kepegawaian atau yang kita kenal PJKSE (Pembinaan Jabatan Fungsional, Kepegawaian, dan Sisdur, serta Evaluasi ASN),” jelasnya.

Safrizal juga berharap restruktur sesuai dengan PP Inovasi Daerah perlu

dilakukan secepatnya, karena banyak tugas dan fungsi yang mengambang di pusat yang ia pimpin. “Pohon kinerja perlu dilakukan beberapa perubahan. Sebaiknya kita langsung memusatkan pada peran peneliti dan mempertegas nomenklatur secara benar, agar tumpang tindih kewenangan tugas dan fungsi antarkomponen tidak terjadi,” ungkapnya.

Hal itu juga dibenarkan oleh Kapuslitbang Pembangunan dan Keuangan Daerah, Horas Mauritz Panjaitan, menurutnya, peran BPP sebenarnya cukup strategis untuk merumuskan kebijakan yang selaras dengan visi misi Kemendagri, namun perannya memang belum optimal akibat lemahnya penguatan organisasi, SDM, dan pen-

danaan.

“Dari organisasi, kami melihat memang ada tumpang tindih, misalnya fungsi Biro Hukum Kemendagri, sebenarnya bisa ditopang dari BPP, karena semestinya produk hukum itu lahirnya dari BPP, karena fungsi kita jelas, mendorong, membantu kinerja Kemendagri melahirkan dan mengevaluasi kebijakan berdasarkan hasil-hasil penelitian. Tapi fungsinya belum tegas, karena setiap penelitian yang kami lakukan hanya mentah di rekomendasikan, tidak ada tindak lanjutnya,” kata Mauritz saat diwawancara Chandra.

Tugas dan Fungsi BPP sendiri juga sebenarnya dipertegas dalam Permenagri No 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengemba-

ngan di Kemendagri. “Mulai dari penyusunan riset desain sampai sidang pengendalian mutu tergambar jelas dalam Permendagri tersebut, jadi jelas tugas dan fungsinya. Namun lagi-lagi, pertanyaan benar tidak BPP ini diperlukan masukannya? Karena selama ini hasil kajiannya hanya mentah begitu saja. Jadi intinya sebenarnya untuk memajukan kami juga tidak bisa terlepas dari peran komponen, dan K/L lain dalam menjalin koordinasi itu tadi,” serunya.

Dalam wawancara tersebut Mauritz juga menyarankan kepada KemenPAN-RB, agar memerhatikan masalah SDM, minimnya peneliti baik dari segi kuantitas dan kualitas juga perlu diperhatikan oleh pihak KemenPAN-RB. “KemenPAN-RB juga kami mohon sedikit perhatiannya, kalau orangnya sedikit yang berkualitas seperti ini, ya mohon maaf mendorong ke arah pembangunan juga sulit, apalagi *image* orang-orang BPP adalah orang buangan juga tidak bisa terlepas,” tutur Mauritz.

Sementara itu, Chandra yang banyak menyimak itu sebenarnya saat ditemui Media BPP tidak banyak berkomentar terkait beberapa hasil wawancaranya dengan ke-empat Puslitbang BPP.

“Dari kami sendiri, belum bisa memberikan masukan atau gambaran terhadap hasil wawancara ini, karena saya takut subyektif. Dalam satu tim ini kami ada 30 orang, hasil wawancara akan dirumuskan bersama dengan tim dan KemenPAN-RB, hasil pembahasan pertama akan dilaksanakan pada 19 Oktober mendatang, kami juga perlu bertemu Kepala BPP dan Sekretaris BPP, bahkan akhirnya pada Desember kami juga akan bertemu Menteri Dalam Negeri, baru setelah itu kami gantikan memberikan masukan untuk lembaga ini, tetapi secara garis besar saya sendiri setuju kalau BPP ini tetap ada dan penting,” kata Chandra. (IFR)



TENTUKAN TARGET AGENDA REFORMASI BIROKRASI

Pada Maret lalu, Kemendagri juga menggelar Rapat Rencana Kerja Pelaksanaan reformasi birokrasi di Hotel Aryaduta. Rapat ini sebenarnya lebih mengevaluasi kinerja Kemendagri yang nantinya berkaitan dengan Tunjangan Kinerja setiap pegawai

Kepala Bagian Reformasi Birokrasi Kemendagri, Budi Utomo, memaparkan delapan area perubahan sebagai

agenda prioritas yang harus dilakukan oleh masing-masing Pokja (Kelompok Kerja) di Kemendagri guna mencapai tungkir 80 persen dari sebelumnya hasil evaluasi RB 2016, Kemendagri memperoleh nilai 69,23 persen. “Untuk bisa naik tungkir 80 persen tersebut, penilain kinerja Kemendagri pada 2017 minimal mencapai 75,03 persen,” katanya.

Pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Neg-

eri dari hasil penilaian KemenPAN-RB belum bisa dikatakan maksimal. Terbukti menurut Budi, tunjangan kinerja yang diberikan masih belum mencapai 100 persen. Namun, menurutnya agenda reformasi birokrasi bukan soal tunjangan kinerja, tetapi pelaksanaan tersebut untuk memperbaiki cara kerja dan tata kelola pemerintahan yang baik di Kemendagri.

Budi bersama tim dari Biro Organisasi Tata Laksana Kemendagri juga tidak tinggal diam, ia terus mengupayakan agar reformasi birokrasi bisa terwujud sehingga tunjangan kinerja juga bisa diberikan maksimal. “Saya tidak tinggal diam, bersama Tim saya terus bekerja sampai malam hingga akhirnya keluar tunjangan 80 persen,” terangnya.

Sementara itu, menurut Dyah Laksita,

mantan staf Sub Bagian Sistem dan Prosedur serta Evaluasi Kinerja BPP Kemendagri yang sempat mengikuti secara rutin kegiatan yang dilaksanakan KemenPAN-RB tersebut, delapan area perubahan yang mesti dibenahi Kemendagri itu mencakup manajemen perubahan, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas, penguatan kelembagaan, penguatan tatalaksana, penguatan sistem manajemen SDM-Aparatur Sipil Negara (ASN), penguatan peraturan perundang-undangan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Sebagai bagian dari Pokja, Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kemendagri bersama Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dalam acara tersebut menentukan target agenda prioritas yang akan dilaksanakan dalam men-

dukung reformasi birokrasi. “Target tersebut harus jelas, berapa jumlah target yang akan dilaksanakan pada April 2018 hingga akhir 2018 nanti pada Desember,” ucap Dyah.

Beberapa target agenda prioritas tersebut meliputi penguatan integritas, pembangunan zona integritas, penanganan pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil pemeriksaan, kualitas pengelolaan keuangan dan sebagainya. “Masing-masing telah ditentukan ketua Pokjanya dari setiap tugas fungsi dan komponen yang ada. Namun sangat disayangkan memang, BPP tidak terlibat dalam ketua Pokja tersebut, hanya masuk dalam bagian anggota setiap Pokja,” kata Dyah.

Dyah menjelaskan, seperti di ranah manajemen pengawasan, Inspektorat Jenderal *lah* yang menjadi ketua pokjanya dalam melaksanakan pengawasan terkait LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) PNS. “Juga terkait manajemen risiko, ini sedang dibuatkan Permendagrinya, mereka akan mengatur bahkan memetakan manajemen kegiatan berdasarkan risikonya,” ungkap Dyah.

Selain itu terkait Tata Laksana, setiap komponen semestinya memiliki pohon kinerja sesuai dengan tugasnya, bukan sesuai dengan kondisi sekarang. “Karena ada beberapa yang tugasnya kurang tepat di beberapa komponen, BPP sendiri telah membuatnya, kebetulan yang membuat Pak Noval (Kabag Perencanaan),” paparnya.

Lalu soal manajemen perubahan, Kemendagri diminta harus menyai agen perubahan setiap komponen, agen perubahan ini sebagai katalisator reformasi birokrasi dan penyebar virus RB ke pegawai sekitarnya.

“Dia harus bisa menjadi *role model* bagi sekitarnya, kami berharap ini segera hadir di BPP, terutama di pimpinnya, karena sejatinya pemimpinlah yang memegang kewenangan dan lebih berperan dalam agen perubahan,” kata Dyah. (IFR)



KUBURAN BATU, tengkorak manusia, dan ritual kematian, telah mendarah daging sebagai tradisi yang diyakini leluhur masyarakat Toraja, Sulawesi Selatan. FOTO | SAIDIRIFKY/MEDIABPP

BPP DAERAH

BPP Kalimantan Selatan & Bidang Litbang Banjar Baru YANG BERTAHAN DAN BERINOVASI

Pertengahan September lalu, Tim Media BPP mengunjungi Kalimantan Selatan. Di sana, kami menjumpai beragam informasi menarik mengenai Badan Penelitian dan Pengembangan Kalimantan Selatan, dan Bidang Penelitian Banjarbaru dengan segala keterbatasan namun mampu mengembangkan potensi yang ada.

Udara pagi masih menusuk hidung di tengah sebagian penduduk DKI yang masih terlelap. Tim Media BPP bergegas menuju Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta untuk mengejar penerbangan pagi Pesawat Garuda 05.55, kami bergegas menuju petugas pencetak tiket pesawat setelah melakukan *mobile chek-in* sehari sebelumnya. “Di *gate 24 ya bu*,” kata petugas tiket Garuda.

Jarak dari loket *chek-in* tiket dengan 24 Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta kurang lebih 10 km lebih, dengan membawa seluruh tas tanpa ada yang masuk bagasi, dengan sigap kami ter-gopoh-gopoh mengejar pesawat yang 15 menit lagi akan *boarding* tersebut. Dinginnya ruangan Terminal 3 tidak mengalahkan panasnya keringat kami yang menyusuri *gate 1* hingga *gate 24*. Beruntung hingga *gate 18* kami berjalan ada *golf car* yang disediakan oleh petugas bandara, kami lantas memilih mengantre dan menunggu *golf car* yang setiap 5 menit itu hadir.



Pukul 05.45 kami tiba di *gate 24*, di sana sudah banyak penumpang pesawat satu tujuan dengan kami menunggu di jejeran bangku tersebut, ada yang menunggu dengan tertidur, ada yang sambil sarapan, begitulah risiko penerbangan pagi, rata-rata dari mereka harus sudah siap dari tengah malam dan meninggalkan sarapan demi tidak tertinggal dengan pesawat mereka.

Pukul 05.55 terdengar pengumuman dari petugas bandara yang semula kami kira pesawat kami akan segera *boarding*, rupanya pengumuman itu tentang keterlambatan pesawat selama 30 menit ke depan, akhirnya kami memutuskan untuk mencari sarapan dan shalat subuh yang belum sempat terlaksana selama 30 menit pesawat *delay*. Saat 30 menit berlalu, pengumuman kembali didengarkan, rupanya pesawat kami lagi-lagi harus *delay* hingga pukul 07.30, penambahan *delay* satu jam dari sebelumnya. Kami para penumpang sebenarnya sudah mulai kecewa akibat tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu melalui pesan singkat ke masing-masing penumpang minimal semalam sebelum keberangkatan. Hal ini biasa dilakukan oleh maskapai terpercaya seperti Garuda yang kami tumpangi.

Kami akhirnya memutuskan untuk tidur, melengkapi rasa kurang tidur semalam untuk perjalanan hari itu. Namun meski mata sudah diusahakan untuk terlelap, rasa was-was akan pengumuman keberangkatan pesawat tetap kami jaga, akibatnya selama proses menunggu kami tetap tidak bisa tidur dengan pulas. Pukul 07.30 terdengar kembali pengumuman petugas bandara, rupanya pesawat kami kembali *delay* sampai pukul 08.00, seluruh penumpang sudah mulai emosi dengan ketidakpastian itu, mereka lantas protes apa yang menyebabkan pesawat kami terus menerus ditunda, rupanya petugas mengatakan cuaca buruk akibat kabut asap di Banjarmasin menyebabkan seluruh penerbangan ke Banjarmasin harus ditunda. “Mere-

ka belum membuka akses untuk masuk kalau sepagi ini pak/bu,” kata petugas.

Demi menenangkan penumpang, petugas Garuda lantas memberikan *snack* untuk sekadar mengganjal rasa lapar bercampur bosan para penumpang itu. Setelah menghabiskan *snack* mereka, ada pengumuman lagi datang bahwa pesawat kami kembali ditunda hingga pukul 09.00. Kalau dilihat dari jadwal pertama penerbangan, kami terhitung sudah 3 jam lebih *delay*, kalau dalam Peraturan Menteri Perhubungan No 89 Tahun 2015 tentang Penanganan Keterlambatan Penerbangan, baik itu akibat cuaca, keterlambatan penerbangan di atas 240 menit maka penumpang berhak mendapat ganti rugi sebesar Rp 300 ribu, sedangkan di bawah itu penumpang hanya berhak mendapat ganti rugi berupa *snack* atau makanan ringan. *Snack* memang sudah diberikan pada penumpang sebagai bukti ganti rugi maskapai yang kami tumpangi, namun sebelum masuk ke 240 menit menunggu seluruh penumpang diminta untuk masuk ke pesawat. Di pesawat ternyata kami masih harus menunggu kurang lebih 1 jam lagi. Menurut kebanyakan penumpang, cara ini mereka lakukan untuk menghindari ganti rugi uang kepada penumpang yang sudah masuk dalam pesawat.

Kira-kira pukul 10.00 WIB pesawat kami baru diterbangkan dari Bandara Soekarno Hatta menuju Bandara Syamsudin Noor. Pukul 12.00 WITA kami tiba di Bandara Banjarmasin, masih ada sekelabat kabut asap yang sempat menghalangi kami berangkat tepat waktu pada saat itu, kami lantas dijemput oleh peneliti BPP Kalimantan Restu, menuju kantor BPP Provinsi Kalimantan Selatan.

Kantor BPP Provinsi Kalimantan Sela-

tan cukup jauh. Dari bandara ke kantor sekira 20 menit perjalanan menggunakan mobil. Kantor ini baru beberapa tahun dihuni, sebelumnya pusat pemerintahan berada di Banjarmasin. “Karena Banjarmasin sudah penuh makanya kami dipindahkan ke Banjarbaru,” terang Restu

Setibanya di BPP Provinsi, kami bertemu dengan Sekretaris Badan, Kepala Badan, Kepala Bidang, dan beberapa peneliti yang ada di sana. Tim Media BPP pertama kali menceritakan perjalanan yang panjang selama di bandara akibat kabut asap. Menurut M. Amin, Kepala BPP Provinsi Kalimantan Selatan, kabut asap di Kalimantan memang sedang tebal-tebalnya dalam sebulan belakangan ini. “Sulit sekali memberantas kabut di sini, karena di sini banyak lahan gambut dan lahan kosong, jadi bisa terbakar sendiri tanpa adanya pembakaran dari oknum. Misalnya ilalang itu saling bergesekkan karena angin, lama-lama akan menjadi api. Kalau sudah begitu, petugas pemadam kebakaran bersama kepolisian bahkan ada satuan khusus yang menanganinya itu dari warga langsung bergegas ke lokasi titik kebakaran,” terangnya.

Menurut Amin, yang menjadi kendala pemadaman selama ini adalah medan yang terjal yang kadang terjadi di pegunungan tinggi atau hutan liar. “Kami kadang memadamkannya pakai motor *trail* menuju pegunungan, bahkan pemadaman dari udara kalau dirasa memang perlu,” jelasnya.

Persiapan Hari Pangan Sedunia

Pemerintah setempat bahkan sudah menyiapkan seluruh amunisi untuk memadamkan kebakaran hutan tersebut, terlebih pada 18-20 Oktober nanti Kalimantan Selatan bakal terpilih menjadi tuan rumah Hari Pangan Sedunia. “Nanti acara ini akan dihadiri Presiden Joko Widodo, belasan duta besar, Menteri Pertanian, dan seluruh



pejabat lainnya. Dalam acara tersebut kami akan memanen hasil seluruh bumi yang sudah dipersiapkan. Mulai dari sayur, buah hingga jenis padi tanah pasang surut yang dimiliki Banjarmasin,” katanya.

BPP Provinsi Kalimantan Selatan memang disibukkan dengan persiapan untuk Hari Pangan Sedunia nanti, mulai dari booth pameran, bahan pangan yang hendak dipamerkan, hingga masalah keamanan dan penerbangan agar tidak terjadi lagi keterlambatan akibat kabut asap.

BPP Provinsi Kalimantan Selatan juga banyak bekerja sama dengan BPP Pertanian dalam mempersiapkan Hari Pangan Sedunia ini. Sejak 2007 hingga 2016 mereka telah melepas berbagai Varietas Unggul Baru (VUB) padi spesifik lokasi untuk semua agroekosistem budidaya padi. Peningkatan produksi dan perluasan areal tanam padi dilakukan secara besar-besaran dalam menyabut acara itu. Pasalnya, kontur tanah di Banjarmasin berbeda dengan kontur tanah di Jawa. “Di Banjarmasin itu tanahnya naik turun airnya, jadi harus dipersiapkan varietas jika air sedang pasang maupun surut,” terang Amin

Selain menghasilkan varietas dengan produktivitas tinggi, pemulia tanaman juga memberikan perhatian terhadap sifat-sifat khusus tanaman, seperti toleransi terhadap tanah dan iklim yang tidak optimal, serta toleransi terhadap hama dan penyakit. Perkembangan permintaan pasar juga semakin mendapat perhatian.

Menurut Amin, berdasarkan produksi dan penggunaannya tercatat ada 42 varietas padi unggul yang berkembang di Kalimantan Selatan, ada yang cocok dan bertahan hingga saat ini, contohnya seperti PB 42, IR 66, Mekongga, Ciherang, Cibogo dan IR 64 tetapi ada juga beberapa varietas yang tidak bisa bertahan/berkembang karena ada beberapa faktor antara lain, rasa nasi yang tidak sesuai dengan selera masyarakat Kalimantan Selatan. “Ma-



syarakat Kalimantan Selatan terbiasa mengkonsumsi nasi yang pera dari kontur tanah pasang-surut, namun bukan itu masalah kita, kita berharap saat Hari Pangan Sedunia nanti dan seterusnya kuantitas panen kita meningkat, yang tadinya setahun sekali minimal bisa setahun 3x seperti di Jawa, harapannya kita bisa secara mandiri dalam ketahanan pangan,” paparnya.

Ragam kegiatan

Selain sibuk dengan persiapan Hari Pangan Sedunia, BPP Kalsel juga berperan aktif dalam memberikan masukan kepada Gubernur terkait perencanaan pembangunan, anggaran, dan rencana strategis daerah, serta permasalahan aktual dalam bentuk rekomendasi kebijakan (*policy brief*).

“Hasil-hasil riset kami biasanya berdasarkan apa yang dibutuhkan oleh Gubernur maupun Pemerintah Kabupaten/Kota, mulai dari masalah kajian keuangan, lingkungan (kabut asap), dan perencanaan serta pembangunan daerah,” kata kepala dari lembaga yang berdiri sejak 2001 itu.

Meski mengalami pasang surut anggaran BPP Provinsi Kalsel, misalnya pada 2017 memiliki anggaran 6 miliar, 2018 berkisar 5 Miliar, dan 2019 kemungkinan akan terjadi kenaikan

menjadi 7 miliar. Segala kegiatan BPP Kalsel cukup banyak. Rumusan kebijakan dan hasil penelitian BPP Provinsi Kalsel digunakan sebagai bahan rekomendasi untuk pemerintah daerah (Gubernur), sampai tahun 2018 sudah ada 103 hasil kajian penelitian yang dihasilkan, dari hasil kajian tersebut beberapa sudah ada yang berdampak bagi pembangunan daerah di Kalimantan Selatan.

“Kami juga membantu SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) lainnya dalam melaksanakan kegiatan berbasis riset dan pengembangan untuk pencapaian tujuan pembangunan daerah,” tambah Nurmansyah, Sekretaris BPP Kalsel yang baru bergabung 3 bulan ini.

Terkait dengan Peneliti dan Media Publikasi, BPP Provinsi Kalsel memiliki 16 orang Pejabat Fungsional Peneliti (JFP) dan 2 orang calon peneliti. “Kita bersyukur, kehadiran BPP ini didukung oleh Gubernur yang memercayai BPP Provinsi Kalsel sebagai lembaga teknis untuk membantu Gubernur di bidang penelitian untuk kebijakan,” ungkapnya.

Selain itu, publikasi BPP Kalsel juga sudah ditunjukkan dengan Jurnal Kebijakan Pembangunan. Jurnal ini su-

dah terakreditasi dan dibentuk sejak 2010 dan terbit dua kali dalam setahun.

“Saat ini, masih dalam proses penerimaan naskah, dan rencananya terbit masih dengan versi cetak. Pasalnya, pengelola jurnal mengalami kesulitan untuk menjaring naskah,” tuturnya.

Bidang Litbang Banjarbaru

Setelah dari BPP Provinsi, kami bergegas ke Bidang Litbang Kota Banjarbaru yang masih melekat dengan Bappeda (Badan Pembangunan Daerah). Di Bidang Litbang Banjarbaru kami bertemu dengan Kepala Bidang Litbang Muhammad Barzani dan Kepala Bappeda Kota Banjarbaru, Kanafi.

Secara historis Bappeda berdiri pada 2000 seiring dengan definitifnya Kota Administratif Banjarbaru menjadi Kotamadya pada 1999, kemudian berubah nomenklatur menjadi Bappeda dan Penanaman Modal pada 2008. Namun atas beberapa pertimbangan bahwa Penanaman Modal perlu melebur sendiri, barulah pada Januari 2014 kembali menjadi Bappeda.

“Bappeda Kota Banjarbaru adalah salah satu satuan kerja perangkat daer-

ah Kota Banjarbaru yang secara umum membantu kepala daerah dalam perencanaan pembangunan di Kota Banjarbaru,” kata Kanafi.

Tugas Bidang Litbang Bappeda Kota Banjarbaru sebenarnya lebih aktif berperan dalam Bidang Perencanaan menyusun kebijakan dan pengembangan yang terjadi di Banjarbaru. “Penelitian kami lebih membantu perencanaan, pengembangan dan statistik, penyusunan program dan evaluasi, fisik, prasarana dan tata ruang, ekonomi dan sosial budaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Upaya-upaya itu dalam rangka membantu tugas Walikota dalam pelaksanaan penyusunan kebijakan daerah melalui penelitian,” tutur Barzani.

Kegiatan penelitian yang dilakukan Bappeda Kota Banjarbaru melibatkan pihak eksternal seperti Perguruan Tinggi Negeri/Swasta dan litbang instansi vertikal di daerah. Hal ini dikarenakan, tidak adanya peneliti di Bappeda Kota Banjarbaru. Sehingga, Bidang Litbang Kota Banjarbaru bisa dibilang belum mampu menjadi lembaga *think tank* di kotanya. “Karena kuantitas dan kualitas SDM yang tersedia terbatas seperti belum adanya tenaga fungsional peneliti tersebut, tetapi hanya ada fungsional perencana saja. Maka tugas kami hanya sebatas membantu perencanaan saja,” ungkap Barzani.

Menghidupkan pasar tradisional

Meski begitu, Khanafi mengaku ada beberapa kegiatan prospek ke depan dari Bidang Litbang Kota Banjarbaru yang dipimpinnnya, mereka hendak menghidupkan kembali pasar tradisional di Banjarbaru dengan memberikan fasilitas serta pinjaman modal bagi para pedagang kecil.

“Kita mau relokasi dan menatanya seperti pasar modern BSD di Tangerang

Selatan, konsepnya kurang lebih seperti itu. Karena banyak di sini pasar tradisional yang tidak tertata dengan baik, tumpah ruah di jalan, dan tidak tertib,” katanya.

Apalagi segala pusat perbelanjaan itu sengaja dibangun di dekat daerah bandara, mengingat lokasi bandara juga masuk dalam Kota Banjarbaru.

“Kami berharap siapa pun yang berkunjung ke sini nantinya bisa menikmati daya tarik dan keunikan dari Banjarbaru ini. Kita juga mau menciptakan semacam tempat pertemuan bagi para pendatang yang sibuk dan tidak punya waktu lebih di Banjarbaru, jadi akses *meeting* lebih mudah, sambil belanja oleh-oleh khas Banjar,” selorohnya.

Cara ini menurutnya cukup baik, apalagi Bidang Litbang telah melakukan secara terperinci daya jual yang akan ditawarkan dengan persaingan yang ada.

“Kami juga sudah meneliti terkait banyaknya persaingan dengan pasar modern atau minimarket yang baru 3 bulan belakangan ini mulai diizinkan di Kalsel. Begitu masuk, dua waralaba itu langsung menaruh di 50 titik Kota Banjarbaru, ini tentu mematikan usaha kecil, dan itu yang ingin kita bangun,” tandasnya.

Kanafi dan Barzani berharap dengan mendorong dan membentuk program yang terasa langsung di tengah masyarakat, Bidang Litbang di Banjarbaru, pada masa yang akan datang pemerintah pusat dapat lebih menyokong kegiatan-kegiatan semacam ini.

“Kami akui, keterbatasan SDM kami juga hanya 240 ribu penduduk, dan 5 kecamatan, kalau memang lembaganya dirasa tidak perlu membesar, yang terpenting fungsinya yang tetap membesar. Mau tetap atau tidak menempel dengan Bappeda, yang penting kehadiran litbang jangan sampai hilang,” harap Khanafi. (IFR)

MENJEJAKI PASAR APUNG MULTI GENERASI



Generasi 80'an tentu masih ingat sepenggal iklan stasiun TV swasta yang menggambarkan suasana pasar di atas sungai dengan beragam jajakan dagangan sayur, buah, ikan, dan hasil bumi lainnya di atas kapal. Visualisasi itu kemudian dipertegas dengan gambar seorang ibu tua yang menunjukkan jempolnya diiringi jingle "RCTI Oke" tentu mengingatkan kita akan suasana pasar terapung tersebut.

Matahari pagi sayup-sayup mulai memancarkan cahayanya, setelah semalaman ia menemani bumi berputar pada porosnya. Langit Banjarmasin kala itu begitu terang, namun bukan karena cahaya matahari yang sayup-sayup dalam peraduan ayam berkokok, melainkan dibantu dengan pemantulan kabut asap yang sudah menyelimuti langit Kalimantan selama sebulan belakangan ini.

Dua pasang kaki perempuan paruh baya, dan dua pasang kaki perempuan muda keluar dari hotel persinggahan-

nya di bawah langit Banjarmasin yang tertutup kabut namun terang. Mereka beriringan menuju mobil jemputan melalui aplikasi taksi *online* yang dipesannya menuju sebuah hotel lain dengan fasilitas kapal dalam perjalanan susur Sungai Martapura, Banjarmasin ke Pasar Terapung Lok Baintan.

Sesampainya di hotel tujuan, dirogohnya uang selebar 10 ribu dan 5 ribu untuk membayar taksi *online* yang sudah mengantarkannya menuju hotel dekat persinggahan kapal yang siap mengantarkan tamu-tamunya.

"Untuk pemesanan klotok/kapal ke Pasar Terapung, silakan langsung saja

ke *lobby* bu," terang petugas keamanan hotel.

Kami lantas masuk dalam hotel tua dan ternama di Banjarmasin tersebut itu, disapanya kami, *Tim Media BPP* dengan hangat layaknya petugas resepsionis hotel lainnya. "Untuk pemesanan klotok/kapal, harganya Rp 400 ribu bu, tapi harus menunggu 10-15 menit lagi ya," katanya.

Lebih dari 15 menit kami telah menunggu di ruang tunggu *lobby* hotel, tapi tidak kunjung juga ada kabar bahwa kapal atau klotok kami sudah siap. Jarum jam sudah menunjukkan pukul 06.45, kami sudah cemas kalau

kedatangan kami ke Pasar Terapung bakal kesiangan. Pasalnya, menurut beberapa informasi, Pasar Terapung Lok Baintan akan tutup dalam 15 menit ke depan, padahal perjalanan menuju Pasar Terapung Lok Baintan membutuhkan waktu 1-2 jam dengan klotok sewaan.

Sepuluh menit kemudian, satpam barusan mengabarkan kami, "Bu klotok-nya sudah siap," jelasnya. Segera kami bergegas menuju pelabuhan kecil kapal depan hotel tersebut. Disapanya kami yang masih merasa cemas akan kegiatan pasar yang sudah usai.

"Silahkan masuk lewat depan bu," kata pengemudi klotok

Klotok itu panjang, tidak ada bangku di dalamnya, hanya ada tempat untuk lesehan yang sebenarnya cukup menampung 24 orang. Untuk menuju pasar terapung Lok Baintan dari pusat kota sebenarnya bisa ditempuh dengan dua alternatif. Alternatif pertama menyusuri sungai Martapura dengan menggunakan klotok. Dengan klotok, perjalanan dari pusat kota menuju pasar terapung terbilang cepat karena tidak harus beradu dengan transportasi darat Banjarmasin yang semakin hari semakin macet. Alternatif kedua dengan menggunakan kendaraan darat seperti mobil. Namun, untuk alternatif kedua membutuhkan waktu lebih panjang, bisa dua jam lebih untuk mencapai pasar terapung dari Kota Banjarmasin.

Di sepanjang pesisir aliran Sungai Martapura Lok Baintan mulai terlihat konvoi perahu sampan menuju lokasi pasar terapung. Perahu ini milik pedagang dan petani yang akan memasarkan hasil kebun mereka. Mereka berasal dari berbagai anak Sungai Martapura, seperti Sungai Lenge, Sungai Bakung, Sungai Paku Alam, Sungai Saka Bunut, Sungai Madang, Sungai Tanifah, dan Sungai Lok Baintan.

Pedagangnya didominasi perempuan dengan memakai tutup kepala atau yang dikenal dengan *tanggui*, sebagian dari mereka juga melumuri wajahnya dengan ramuan putih semacam be-



dad agar melindungi cahaya matahari di tengah sungai katanya, mereka menyebutnya pupur dingin.

Mereka menjual berbagai dagangan, seperti sayur-mayur, buah-buahan, kue-kue tradisional, dan lain-lain. Di pasar terapung ini masih berlaku sistem barter, terutama untuk para pedagangnya. Namun untuk wisatawan macam kami, jangan kaget kalau mereka menjajakan dengan harga cukup fantastis.

Sepanjang mata memandang, para pedagang ibu-ibu secara agresif langsung menjajakan dagangannya. "Bu ibu ayo Bu ini jeruknya bagus," kata penjual jeruk. Tidak kalah lagi dengan pedagang ikan "Bu ibu, belilah ikan saya Bu," kata penjual ikan. Begitulah mereka saling bersahutan merayu agar barang dagangannya bisa membawa hasil agar dapur tetap mengepul.

Dari jauh ada pula di antara mereka yang datang tergopoh-gopoh sambil mendayung sampannya sambil membawa banyak jajakan makanan, ada yang mendayung seorang diri, adapula yang menumpang perahu sampan dengan kerabat atau suami/isterinya. "Di sini penjualnya rata-rata sudah tua Bu, karena generasi mereka meninggalkan budaya kami, budaya pasar apung. Mereka pada sekolah, merantau, banyak yang tidak kembali, apalagi hanya menjajakan makanan di atas kapal," terang pengemudi klotok.

Waktu terus berjalan. Perahu klotok membawa rombongan wisatawan semakin bertambah ke Lok Baintan. Jumlah pedagang pun tak kalah banyak. Mereka menawarkan hal serupa kepada penumpang perahu klotok lainnya. Kami pun membeli beberapa

barang yang mereka jajakan, terutama makanan. Ada buah mentega yang bentuk fisiknya seperti apel merah, namun di dalamnya lembut seperti mentega. Aromanya begitu khas seperti durian, begitu pula rasanya, persis seperti perpaduan antara durian dan sirsak. "Berapa ini bu," tanya kami. "Satu keranjang isi 6, hanya 50 ribu saja bu," jelasnya.

Untuk buah khas Kalimantan, mungkin ada banyak sebagian yang menganggap itu buah kampung yang murah yang disuguhkan begitu mahal dari pedagang di Pasar Terapung, tapi untuk oleh-oleh khas Kalimantan, apalagi melihat perjuangan para pedagang itu sejak subuh menjajakan dagangannya, rasanya kurang pas kalau wisatawan masih menawar harga yang keterlaluan pada mereka.

Apalagi kurang lengkap rasanya apabila wisatawan tidak mencicipi langsung sensasi menumpang perahu mereka yang terombang-ambing dengan barang dagangannya. Tidak jarang mereka menawarkan dengan cara cuma-cuma, asal belanjaan mereka dibeli, pengunjung sudah bisa menumpang sampan penuh sayur mayur lengkap dengan topi mereka sambil bersel-fie ria. "Silakan naik ke perahu saya, seikhlasnya saja, mari sini," ajak mereka.

Inilah daya tarik pasar terapung di Lok Baintan. Sambil diombang-ambing gelombang Sungai Martapura, penjual dan pembeli saling berinteraksi. Tawar menawar pun terjadi. Untuk melihat langsung kehidupan pasar terapung di Lok Baintan, yang unik dan harus dilestarikan, sejauh manapun peradaban zaman mulai berubah. (IFR)

GENCIL, FLATFOrm UNGGULAN SMART CITY PONTIANAK

Gencil merupakan salah satu contoh pengembangan inovasi yang bisa dikatakan efektif dalam menunjang pelayanan publik di Kota Pontianak. Pemanfaatan teknologi menjadi jalan tepat di tengah minimnya tenaga sumber daya manusia yang mengelola pemerintahan.

Sejak moratorium Pegawai Negeri Sipil (PNS) beberapa tahun terakhir, pemerintah daerah mengeluhkan keterbatasan pegawai yang mengelola pemerintahan. Keterbatasan pegawai tersebut dianggap menghambat kinerja pemerintah di daerah. Kebijakan moratorium juga tidak diimbangi dengan banyaknya PNS yang pensiun serta cakupan luas wilayah yang dikelola suatu daerah. Namun, kebijakan tersebut tidak serta merta membawa dampak negatif. Bagi pemerintah Kota Pontianak, moratorium dan kekurangan pegawai menjadi tantangan tersendiri untuk tidak mengendurkan pelayanan publik sedikit pun. Pelayanan publik justru semakin efektif dengan hadirnya inovasi yang digagas Pontianak setahun terakhir.

Revolusi industri 4.0 telah mengubah cara kerja pelayanan publik. Efisiensi tata kelola pemerintahan pun dituntut berubah lebih cepat. Penggunaan sistem digital bukan lagi barang baru, teknologi menjadi pemecah kebuntuan sistem birokrasi yang selama ini dianggap rigid. *Smart city* kemudian menjadi *trend* baru di dunia, termasuk di Indonesia. Pengembangan *smart city* tidak hanya menjadi gengsi bagi pemerintah di suatu daerah untuk disebut kota cerdas, namun teknologi informasi menjadi langkah tepat dalam memajukan kota atau daerah.

Pengembang *smart city* di beberapa daerah di Indonesia saat ini cukup bervariasi. *Smart city* juga disesuaikan dengan sumber daya dan karakteristik wilayah. Seperti halnya Pontianak. *Smart city* di kota ini hanya difokuskan untuk menopang efektivitas pembangunan di sektor strategis, seperti ekonomi, kuliner, dan jasa perhotelan, yang selama ini menjadi pendapatan asli daerah terbesar di kota itu.

Pada Mei lalu *Media BPP* menyambangi pusat pengendali *smart city* di Pontianak tepatnya di Kompleks Kantor Pemerintah Kota Pontianak. Sebuah layar raksasa di ruangan seluas 10 meter x 5 meter menampilkan banyak video di setiap titik lalulintas di kota Pontianak. Beberapa layar digital berukuran besar juga terpampang di setiap dinding ruang itu. Di depan layar itu sebuah sofa dan beberapa furnitur minimalis tertata rapi, begitu juga dengan beberapa komputer besar melengkapi nuansa kecanggihan teknologi ruang itu.

Tiga ruang pimpinan itu diubah menjadi pusat teknologi informasi atau *smart city* Pontianak. Ruang itu berada di dalam Dinas Kominfo Kota Pontianak dibawah kendali Kepala Bidang Pelayanan Elektronik dan Telematika. *Media BPP* siang itu berkesempatan mengenal lebih jauh pengembangan *smart city* di kota khatulistiwa itu.



Penggunaan teknologi untuk melayani beberapa bidang tersebut terbukti efektif. Salah bentuk inovasi yang dikembangkan oleh pemerintah kota berupa *dashboard smart city* yang dinamakan Gencil (*Government Smart City Landmark*). Gencil menjadi *platform* utama *smart city* Pontianak selain pengembangan *command center* yang dikembangkan lebih dulu.

Aplikasi ragam fitur

Aplikasi tersebut menampilkan beberapa fitur seperti kuliner, fitur ini menyediakan informasi tempat makan terlengkap. Tempat *hangout* yang sedang naik daun, makanan khas Pontianak lengkap dengan *review* dari warganet. Selain kuliner, fitur lainnya yang dikembangkan adalah fitur

tempat, fitur ini menawarkan tempat-tempat penting seperti tempat wisata, ATM, Bank, Rumah Sakit, Kantor Polisi dan lain-lain. Selain itu, terdapat pula fitur *event*, berita, harga pangan, serta pengaduan.

“Fitur *event* untuk memudahkan pengguna mencari *event* terbaru yang akan hadir di Pontianak lengkap dengan lokasi, harga tiket, dan *list* bintang tamu yang akan datang, kemudian fitur harga pangan untuk melihat harga bahan-bahan pokok di kota Pontianak, dan pengaduan sebagai sarana pe-



ngaduan, baik hal-hal yang mencurigakan ataupun fasilitas yang kurang memadai yang ada di masyarakat,” ucap Akbar Kepala Bidang Pelayanan Elektronik dan Telematika Kota Pontianak.

Fitur harga pangan, misalnya, dikembangkan untuk memberikan informasi harga sembako lebih dari 20 pasar tradisional yang ada di Pontianak. Informasi tersebut diperbarui setiap hari. Akbar menuturkan, Dinas Kominfo bekerja sama dengan Dinas Perdagangan Pontianak untuk mengecek setiap hari harga kebutuhan pokok. “Fitur ini sekaligus menjadi pengendali inflasi di Pontianak,” tuturnya.

Dengan fitur ini, kebutuhan pokok juga bisa terkontrol. Contohnya ketika terjadi kenaikan harga bawang pu-

tih pada Mei 2017 lalu, harga bawang putih mencapai Rp 40 ribu mendekati harga daging saat itu. Karena harga bisa dipantau, pemerintah merespon dengan cepat. Pemkot Pontianak akhirnya harus meminta pasokan dari pusat, dalam waktu cepat harga bawang putih kembali stabil.

“Begitu ada kejadian tersebut, sistem akan langsung notifikasi ke bagian masing-masing yang berhubungan dengan ini. Pada waktu itu, Walikota segera minta dirapatkan, kemudian Pemkot meminta bantuan ke Kementerian Perindagkop. Akhirnya turun 120 ton, dan harga terkendali. Artinya, aplikasi ini cukup berpengaruh. Dengan mekanisme ini inflasi bisa terkendali di sini,” terang Akbar.



Gencil juga mengandalkan fitur pengaduan masyarakat yang berbeda dengan aplikasi pengaduan yang dikembangkan di beberapa kota. Umumnya pengaduan di beberapa kota seperti *Qlue* di Jakarta, hanya ditangani oleh pusat pengendali pengaduan. Tindak lanjut pengaduan juga tidak sepenuhnya diketahui oleh masyarakat pengadu.

Gencil berbeda, pengaduan yang masuk tidak sebatas ditanggapi dengan kata-kata saja, namun juga bisa dipantau sejauh mana proses pengaduan tersebut hingga *finishing*. Misalnya, ketika seseorang mengadukan jalanan rusak di kota Pontianak, mereka akan tahu sejauh mana pengerjaan jalan tersebut hingga selesai dikerjakan.

Pengerjaan juga dilakukan oleh berbagai unit kerja yang memiliki tupoksi yang sama dengan pengaduan. Sebagai contoh, Dinas PU akan melaksanakan urusan pengaduan yang berkaitan dengan infrastruktur, begitu juga dengan Dinas Dukcapil yang khusus menangani permasalahan terkait kependudukan. "Contoh pada September 2017 kita bisa lihat laporan, kemudian di mana tempatnya. Sesudah itu, kita disposisikan ke Dinas PU dan ke Dinas Bina Marga. Kedua bidang itu harus memberikan bukti proses pengerjaan. Penyelesaiannya juga hanya dua hari. Kita bentuk Tim penanganan di setiap

SKPD, kita buat akun per-SKPD, serta notifikasi ke level Kepala Seksi, sampai level kasi," ucapnya.

Pengembangan lebih lanjut

Melihat efektivitas kehadiran Gencil bagi masyarakat dan *stakeholder*, membuat Gencil akan dikembangkan lebih jauh. Pengembangan tersebut tidak hanya sebatas kuliner, tempat, info harga pangan, serta pengaduan. Namun juga info cuaca, info darah, sumber data, dan yang lainnya.

"Info stok darah untuk memudahkan masyarakat khususnya ketika mencari stok darah. Selama ini kebutuhan darah memunculkan isu negatif traksasional kantong darah di rumah sakit yang sering dikuasai mapia darah selama ini. Sehingga dengan info darah akan diketahui dari siapa darah tersebut didapat, kemudian riwayat pendonor, serta kesepakatan di antara kedua belah pihak," ungkap Akbar.

Inovasi memang membutuhkan dukungan pemerintah setempat. Bukan soal anggaran, tetapi keberanian dalam mengambil keputusan dan komitmen menciptakan *e-government* dalam mendukung reformasi birokrasi. Karena, pengembangan Gencil sebagai *platform smart city* kota Pon-



tianak, tidak memerlukan anggaran besar.

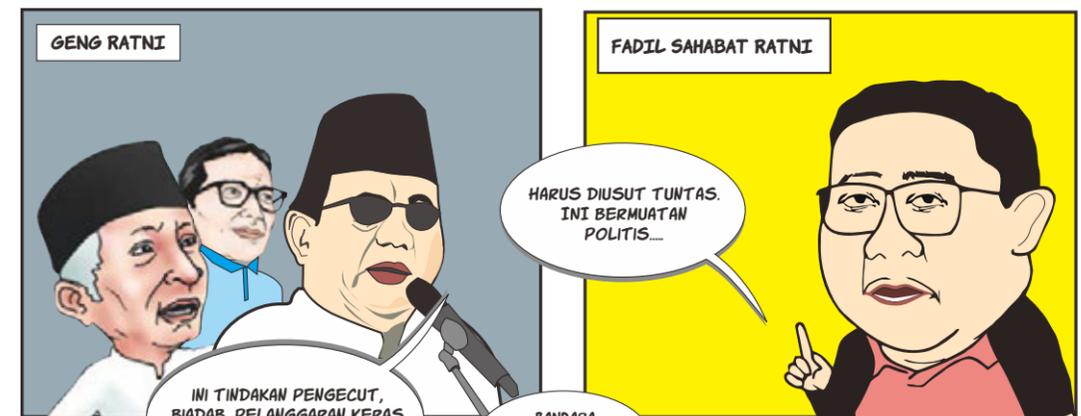
Menurut Plt. Sekda Kota Pontianak Urai Indra Mulya, Gencil diciptakan dan dikembangkan dengan memanfaatkan potensi anak-anak muda Pontianak yang memiliki *passion* di bidang teknologi informasi. Mereka yang memiliki rasa ingin membangun daerah asal mereka kemudian bekerja sama dengan pemerintah untuk mendukung pengembangan *smart city* tersebut secara gratis.

Bahkan setelah selesai dibuat, Pemerintah dalam hal ini Diskominfo juga harus mencari cara agar inovasi tetap berlanjut tidak hanya dari sisi pemilihan, namun juga nasib anak-anak muda yang telah menciptakan inovasi tersebut.

"Akhirnya dengan kesepakatan, dua fitur Gencil dimanfaatkan oleh pengembang lokal yang terdiri dari anak-anak muda tersebut untuk mencari penghasilan seperti info kuliner dan beberapa kolom iklan di fitur tersebut. Kalau orang masuk ke sini mereka akan bayar, pemilik toko hanya perlu memberikan penjelasan, dan beberapa foto tentang tokonya. Kemudian kita mengundang penilaian atau *review* dari *netizen* dan para pengguna aplikasi tentang toko tersebut. Mereka tinggal pasang iklan saja," kata Urai.

Kepala Daerah termasuk perangkat daerah tidak boleh takut untuk berinovasi. Dalam beberapa kesempatan Mendagri selalu mengingatkan, inovasi bukan hanya mampu menjadi solusi berbagai permasalahan di daerah, tapi juga menjadi kunci untuk meningkatkan daya saing bangsa di tingkat dunia. Selain itu, inovasi saat ini dianggap menjadi faktor pendorong keberhasilan dalam upaya mengimplementasikan Industri 4.0. (MSR)

KOMIK BANG PEPE
CUCI TANGAN



LEBIH DEKAT

Syarif Hidayat, Profesor Riset LIPI

MEMBACA KONSEP 20 TAHUN OTONOMI DAERAH

Otonomi Daerah mulai digaungkan sejak tumbangnya Orde Baru, tapi jauh sebelum Orde Baru seorang pemuda bernama Syarif Hidayat sudah memperkirakan konsep desentralisasi menjadi isu yang penting dalam agenda reformasi bangsa Indonesia pasca Orde Baru dan tumbangnya rezim Presiden Soeharto.

Mengawali karier di LIPI, sejak 1985 berbekal ijazah SMA, Syarif begitu ia disapa, bergabung di lembaga penelitian ini, sebagai staf administrasi. Dari situ, Syarif mulai mengenal dunia penelitian. Di LIPI ia tidak hanya bekerja, tetapi sambil kuliah S1 di jurusan Politik Pemerintahan di UNAS (Universitas Nasional), Jakarta.

Lulus dari UNAS, Syarif menjajal menjadi peneliti LIPI, bukan mudah untuk masuk menjadi peneliti LIPI, meskipun dia juga karyawan LIPI. Ia harus mengikuti kembali berbagai seleksi ketat layaknya peserta lainnya, membuat proposal penelitian dan hasil publikasi selama mahasiswa. Beruntung bekal-bekal itu telah banyak ia kumpulkan selama menjadi mahasiswa di UNAS. "Saya pernah dimuat artikelnya di beberapa jurnal, dan artikel opini di koran-koran pada masa itu, sehingga itu menjadi modal saya masuk ke LIPI," terangnya.

Masuk ke LIPI dengan status yang berbeda, membuat Syarif tidak puas begitu saja dengan posisinya yang sekarang, dari 'tukang administratif' yang tugasnya hanya sebatas membantu peneliti LIPI kini ia telah resmi menjadi peneliti LIPI.

Syarif banyak melakukan penelitian terkait desentralisasi di Indonesia. Menurut pria kelahiran Kota Agung, Lampung 1964 itu Presiden Soeharto kala itu (1990) tidak akan sampai menjabat 1 periode lagi setelah masa itu, karena banyak pergerakan massif yang menentang rezim Orde Baru. "Dan pembahasan mengenai desentralisasi akan menjadi topik yang digaungkan setelah rezim Soeharto, saya yakin sekali pada saat itu," katanya.



Sebenarnya saat mengatakan hal tersebut, Syarif sedang melanjutkan studi magisternya di Flinders University, ia mendapatkan beasiswa saat menjabat sebagai peneliti di LIPI untuk melanjutkan studinya pada 1999. Ramalan soal desentralisasi rupanya benar. Agenda reformasi pasca Soeharto yang lengser lebih cepat dari sebelumnya cenderung masif dibicarakan di Indonesia, keluarlah UU No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Pada saat itu wacana yang beredar adalah relasi kewenangan pemerintahan pusat dan daerah. "Soal pembagian urusan dan sebagainya. Namun yang saya amati, isu otonomi daerah (otda) memang mengalami pasang surut pembahasan sejak reformasi lahir," terangnya.

Syarif melihat perkembangan masalah otda selama 20 tahun reformasi ini masih dibicarakan secara parsial atau musiman. Seperti pada 1999 sampai dengan 2007 otonomi daerah secara masif menjadi diskusi masyarakat, banyak publikasi tentang otda, tidak jarang pula muncul banyak istilah seperti otonomi kebablasan, otonomi setengah hati, 'kepala dipegang, ekor dilepas', dan lain sebagainya.

Sebetulnya menurut Syarif, jika digambarkan secara terperinci pasang surut obrolan otda terjadi antara tahun-tahun yang berbeda, terutama sejak UU Pemerintah Daerah mengalami banyak sekali revisi berkali-kali. Sebut saja antara 2001-2004 isu relasi pembagian kewenangan pemerintah pusat dan daerah digaungkan. "Tapi

yang jelas pasca revisi UU No 22 Tahun 1999 menjadi UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, ketegangan ini relatif mengendur. Masih ada ketegangan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Namun di tahun berikutnya, yakni 2005 muncul isu baru, yakni isu Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) yang juga menjadi agenda *setting* dalam UU tersebut," terangnya.

Pilkada yang semestinya menjadi produk otonomi daerah mulai dikritisi, ada istilah-istilah yang kemudian muncul kembali, seperti istilah raja-raja kecil. "Masalah kewenangan sudah tidak semasih dulu, meskipun begitu isu tersebut lantas bergandengan tangan

“
MENJADI
PROFESSOR
BUKAN AJANG
PRESTIGE
SEMATA, TAPI
ADA TANGGUNG
JAWAB DAN
BEBAN MORAL
PENDIDIKAN
YANG BERAT.”

dengan Pilkada. Semestinya masalah kewenangan ini juga menjadi fokus, karena otonomi daerah yang baik sejatinya akan menghasilkan pilkada yang baik pula," ungkapnya.

Sebelum mencuat isu Pilkada, isu pemekaran daerah juga dibaca oleh Syarif terjadi pada 2000. Seperti di Banten, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Gorontalo. "Isu ini lantas mencuat antara 2000-2010 pada pemerintahan

SBY, lalu muncullah sistem otonomi khusus," katanya.

Setelah UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah direvisi menjadi UU No 23 Tahun 2014, isu daerah pemekaran tidak dianggap menjadi isu yang panas lagi, karena UU yang baru menyaratkan sejumlah syarat yang tidak mudah bagi daerah yang ingin melakukan pemekaran. "Bagi daerah yang ingin melakukan pemekaran, tidak bisa langsung dikatakan daerah pemekaran, tetapi daerah administratif terlebih dahulu. Dan tidak bisa langsung mengadakan pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota maupun DPRD, tetapi dilihat dulu progresnya selama 5-10 tahun mendatang terkait kemandirian dan administratifnya. Hal itu yang membuat sebagian elit politik enggan mendirikan daerah pemekaran, karena dinilai terlalu panjang dan rumit," jelasnya.

Melihat perjalanan otonomi daerah selama 20 tahun tersebut itulah, Syarif menilai selama ini masyarakat Indonesia cenderung parsial, atau sepotong-potong dalam memahami masalah konsep otonomi daerah yang sesungguhnya. "Sehingga terkesan musiman, bukan dalam konsep kepentingan bangsa, namun kepentingan kuasa pribadi atau kelompok," terangnya.

Solusi masalah otda

Lantas bagaimana seharusnya? Syarif menyarankan sebaiknya pemerintah mengidentifikasi akar permasalahannya terlebih dahulu, menurut bapak dari dua orang anak itu, ada tiga hal yang menjadi akar persoalan otonomi daerah kita. "Pertama soal prinsip relasi kewenangan pemerintah pusat dan daerah," terangnya.

Baginya, sebagai negara kesatuan, persoalan prinsip kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah bukanlah prinsip pemisahan kekuasaan tapi prinsip berbagi kekuasaan. "Berbagi artinya kekuasaan tetap dimiliki peme-

rintah pusat, agar tidak ada lagi upaya pemisahan-pemisahan daerah. Kita bukan negara federal dengan kekuasaan penuh, tapi hanya sebatas pembagian wewenang saja,” imbuhnya.

Hal itu dinilai karena masih banyak pemikiran dan kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang cenderung tidak berjalan beriringan. Masih banyak kelompok kepentingan partai tiap-tiap kepala daerah yang cenderung acuh dan mengabaikan kebijakan yang semestinya didorong dari daerah kesatuan Republik Indonesia. “Semestinya memang harus ada sistem berjenjang, dari Pemerintah Pusat ke Provinsi, lalu Provinsi ke Kabupaten/Kota, tidak Pemerintah Pusat juga langsung ke Kabupaten/Kota, ini juga yang nantinya akan memengaruhi sikap saling keterkaitan, sehingga implikasinya juga ke Pilkada. Apabila ini ditata dengan benar, maka hasil Pilkada pun bukan hasil yang berjalan masing-masing dengan pemerintah Pusat/Provinsi,” bebernya.

Lalu yang kedua terkait model otonomi daerah, menurut pria yang baru dilantik menjadi profesor riset itu, sebaiknya pemerintah membagi atau mengklasifikasikan kewenangan daerah secara berbeda, mengingat setiap daerah mempunyai karakternya masing-masing. Ada daerah yang sudah maju, berkembang, dan keterbelakang. “Model otda tidak boleh seragam, pemerintah sebaiknya mempunyai *road map* antara daerah dengan otonomi luas, otonomi terbatas, dan otonomi khusus. Otonomi luas untuk daerah yang secara SDM (Sumber Daya Manusia), keuangan, dan demografis bisa dikatakan maju dan mandiri, sementara untuk otonomi terbatas dilakukan bagi daerah yang sedang berkembang dan sulit secara SDM dan keuangan, sedangkan otonomi khusus untuk daerah yang mempunyai SDA (Sumber Daya Alam) yang khas. Namun sayangnya UU kita hanya memenuhi perihal Otsus saja, dua daerah yang sebenarnya bisa diatur secara dinamis saya rasa ini bisa menjadi bahan



pertimbangan untuk mengevaluasi dan meninjau perkembangan otonomi daerah, dengan sendirinya daerah akan lebih kompetitif lagi dalam memajukan bangsa,” jelasnya.

Terakhir, Syarif menyarankan agar pemerintah perlu mendudukkan agenda reformasi yang jelas, jangan bias agenda reformasi yang hanya membangun lembaga negara tanpa dibarengi kapasitas negaranya. “Bias ini karena konsep dasar demokrasi sejak awal hanya membangun sebuah lembaga saja, dan produk dari otonomi daerah seperti Pilkada dan UU Pemerintah Daerah. Mengapa? Karena dua hal ini lebih terlihat dan terukur sebagai capaian kerja mereka. Sedangkan soal kapasitas SDM dan konsep otonomi yang sesungguhnya tidak dipersiapkan secara baik, makanya berulang kali re-

visi selama 20 tahun. Jadi yang dibahas hanya isu parsial saja, tidak untuk jangka panjang,” terangnya.

Peran BPP dalam otda

Menurut Syarif, di tengah permasalahan otonomi daerah itulah semestinya peran penelitian dan pengembangan hadir. Menganalisa penyebab akar permasalahan dan menjadi pusat data dari segala potensi dan kendala di daerah. “Namun sayangnya kerjasama LIPI dan BPP tidak semulus kelihatannya, ada faktor internal dan eksternal yang begitu birokratis. Semestinya, BPP bisa keluar dari unsur birokratis itu, menjadi lembaga yang berani memberikan berbagai rekomendasi ‘liar’ tidak hanya untuk jangka pendek tapi juga jangka panjang,” ungkapnya.

Syarif juga menyayangkan selama ini

target BPP Kemendagri hanya sebatas secarik rekomendasi revisi Peraturan Menteri, bukan pada konsep besar otonomi itu sendiri. “Ada berbagai faktor ya, masalah SDM juga saya rasa BPP perlu mereformasi birokrasi, agar penelitiannya benar-benar kompeten, punya kemauan untuk meneliti bukan hanya sebagai profesi batu loncatan saja, apalagi anggapan peneliti BPP adalah orang-orang buangan, saya rasa perekrutan ini yang harus diubah,” paparnya.

Apalagi terkait hasil pelaksanaan penelitian yang selama ini cenderung ibarat ‘gendang’ yang nyaring di depan dan di belakang dengan posisi kayu di tengah. “Konsep proposal awal matang, namun di tengah tidak jelas bagaimana pembahasan dan metodenya, tiba-tiba timbul hasil penelitian A misalnya, inilah yang seharusnya dibenahi,” bebernya.

Menjadi Profesor

Berbicara selama satu setengah jam mengenai konsep dasar otonomi daerah bersama Syarif, membuat *Media BPP* penasaran akan sosok profesor yang menamatkan studi doctoral di Flinders University tersebut. Ternyata menurut pengakuannya, Syarif sudah mencapai

Peneliti Golongan IV E sejak 2011 (sudah layak dinyatakan profesor), namun suami dari Nur Hanyda ini sempat menolak orasi ilmiah sebagai bentuk resmi pengukuhan profesornya. Barulah pada 2018 ia mau memenuhi undangan LIPI yang ke-4 kali untuk mengukuhkan status profesornya melalui orasi ilmiah. “Pada pengukuhan 26 Juli lalu itu sebenarnya sudah panggilan ke-4 saya diminta untuk orasi, sebelumnya atas pertimbangan prinsip dan idealisme saya selalu menolak untuk orasi ilmiah,” ceritanya.

Baginya, orasi ilmiah bisa dilakukan kapan saja, meski sudah banyak yang memanggilnya dengan sebutan profesor. “Waktu itu pertimbangan saya menolak adalah, saya merasa menjadi professor bukan ajang *prestige* semata, tapi saya merasa ada tanggungjawab dan beban moral pendidikan yang berat. Pada saat itu saya merasa belum siap kalau belum menghasilkan sesuatu yang layak disebut profesor,” tandasnya.

Kini telah ratusan karya yang telah ia buat, mulai dari buku, artikel yang dimuat dalam jurnal nasional maupun internasional, dan berbagai *fellowship* di luar negeri pun telah ia jajal. Karierinya kini telah resmi menjadi profesor, bukan hanya gelar semata, tapi tanggung jawab akademik yang setara dengan jabatan yang telah diembannya. (IFR)

“
PEMERINTAH PERLU
MENDUDUKKAN
AGENDA REFORMASI
YANG JELAS, JANGAN
BIAS AGENDA
REFORMASI YANG
HANYA MEMBANGUN
LEMBAGA NEGARA
TANPA DIBARENGI
KAPASITAS
NEGARNYA



Obsesi Makanan Sehat Berlebih Ternyata Berbahaya bagi Tubuh

Menjalani hidup dengan menjadi diri sendiri itu lebih baik. Jangan pernah terobsesi dengan hal apapun karena bisa membuat tak nyaman. Salah satunya dengan obsesi terhadap makanan sehat atau yang disebut dengan *orthorexia nervosa*.

Untuk mendapatkan tubuh yang sehat banyak orang berlomba-lomba memperbaiki kualitas hidupnya dengan menjalani program hidup sehat. Banyak program diet yang bisa membantu kita untuk bisa mendapatkan tubuh yang sehat. Seperti diet sehat, diet mayo, diet GM, diet paleo, vegetarian, alkali, hingga ketogenik. Lalu bagaimana seseorang melakukan beragam diet di atas tanpa adanya bantuan dari ahlinya?

Selain diet, ada juga orang-orang yang hanya memakan sayuran karena dianggap sehat untuk tubuh, bahkan level ekstremnya mereka mengonsumsinya dengan cara mentah. Namun ternyata ada sebuah sindrom di mana seseorang sangat terobsesi dengan makanan sehat. Diketahui sindrom ini bernama *orthorexia nervosa*.

Sindrom ini dialami oleh seseorang yang merasa tertekan karena wajib untuk makan makanan yang bersih, mentah, dan ketika diolah tidak terlalu matang. Penderita sindrom ini benar-benar akan

memakan makanan tanpa dipanaskan lebih dari 44 derajat Celcius.

Tentu saja enzim serta mikroba yang ada di dalam makanan itu tetap akan hidup. Seseorang yang mengalami sindrom ini juga tidak akan memakan makanan yang mengandung gluten. Padahal diketahui jika gluten merupakan protein yang secara alami terkandung dalam hampir di semua jenis serelia atau biji-bijian.

Tak hanya itu, mereka juga tidak mengonsumsi susu, daging, dan juga gula. Ketika mengidap *orthorexia nervosa*, seseorang akan lebih memilih makan di rumah daripada di luar. Karena mereka bisa mengontrol pola makannya dibandingkan ketika makan di luar rumah.

Orang yang mengalami sindrom ini akan terpaku dengan definisi sehat menurut dirinya sendiri tanpa mepedulikan kata-kata dari para ahli gizi. Inilah salah satu hal yang paling berbahaya. Obsesi hidup sehat bisa jadi justru membuat seseorang membatasi asupan gizi pada tubuh mereka tanpa disadari.

Dengan begitu *orthorexia nervosa* atau terobsesi makanan sehat bisa membahayakan diri. Sebaiknya jika ingin menjalani program hidup sehat atau diet, cobalah diimbangi dengan konsultasi ke dokter atau ahlinya agar tidak salah. (IFR/Nova.grid.id)

ILMUWAN GUNAKAN BERAS UNTUK MENEGAH HIV

Penelitian terbaru menyatakan bahwa beras hasil modifikasi genetik dapat menyediakan cara untuk mencegah HIV. Dalam studi yang dipublikasikan pada *Proceedings of the National Academy of Sciences*, para ilmuwan dari AS, Inggris, dan Spanyol, mengembangkan teknik modifikasi genetik padi untuk memproduksi protein yang menetralkan HIV. Ini adalah temuan terbaru dari pertempuran panjang melawan epidemi virus tersebut.

Menurut World Health Organization (WHO), pada akhir 2017, ada sekira 37 juta orang di dunia yang hidup dengan HIV, dengan usia antara 15-49 tahun. Afrika menyumbang hampir 2/3 dari total tersebut. Artinya, satu dari 25 orang di sana mengidap HIV.

Sementara itu, masih di tahun yang sama, sekitar 940 ribu orang meninggal akibat penyakit yang berkaitan dengan HIV. Meskipun jumlahnya tinggi, namun banyak kemajuan yang sudah dilakukan untuk melawan HIV. Di AS misalnya, infeksi HIV menurun dari 135 ribu pada 1985, menjadi 50 ribu di 2010.

Vaksin, bagaimana pun juga, belum tersedia untuk HIV. Oleh karena itu, obat-obatan oral dan peningkatan pengetahuan mengenai penularan virus ini menjadi pertahanan diri terbaik. Namun, obat-obatan oral tidak terlalu tersedia di negara berkembang sehingga pilihan lain tetap dibutuhkan.

Jenis beras yang baru dikembangkan peneliti ini, mengandung protein penetral HIV yang

hampir sama dengan obat oral. Kemungkinan menjadi potensi baru untuk memberantas HIV. Di dalamnya, terdapat dua tipe protein dan satu antibodi yang dapat mengikat virus HIV. Beras dapat dibuat menjadi krim -- dapat dioleskan ke kulit sehingga protein menyerap ke dalam tubuh dan melindungi individu dari HIV.

Ini merupakan opsi yang baik bagi negara-negara berkembang, terutama pada wilayah agraris. Dengan begitu, pengidap HIV tidak perlu ke luar negeri hanya untuk mendapatkan obat-obatan (yang kadang tidak tersedia). Nantinya, wilayah dengan tingkat infeksi yang tinggi memiliki pilihan untuk mengembangkan perawatan HIVnya sendiri tanpa bergantung dengan suplai obat-obatan dari negara maju.

Sebelum beras hasil modifikasi genetik ini digunakan, para ilmuwan perlu memastikan bahwa ia benar-benar tidak berbahaya bagi tubuh. Selain itu, mereka juga harus menyusun peraturan sebelum beras ini diperkenalkan. (IFR/ National Geography)

KONSTRUKSI SOSIAL DAN POLITIK PENCITRAAN

Dalam dunia global saat ini, bagaimanapun tidak ada organisasi yang stabil. Masyarakat berubah dengan cepat, begitu juga dengan fenomena sosial, karena orang-orang setiap saat terus berubah dan dinamis membentuk nilai-nilai baru, makna baru, struktur baru dan jaringan baru.

Pembentukan lembaga baru pemerintah dan kebijakan publik, misalnya, memiliki tujuan konstruksi sosial. Karena banyak pejabat dari eksekutif dan legislatif yang terlibat dalam desain perubahan dari undang-undang dan kebijakan baru. Contoh lainnya, kebijakan pemerintah dalam pergantian kabinet, merupakan adaptasi dari perubahan masyarakat Indonesia reformatif.

Menurut Burhan dalam bukunya ini (hal. 110), konstruksi sosial administrasi publik adalah suatu proses yang dapat digunakan sebagai strategi atau metode menyampaikan pesan-pesan pemerintah kepada masyarakat. Namun konstruksi sosial administrasi publik bukan sekedar strategi corong pemerintah, atau strategi hubungan masyarakat, melainkan lebih dari itu. Dengan konstruksi tersebut tujuan-tujuan bernegara terbangun dan dapat menjalankan tugasnya dengan baik.

Konstruksi sosial adalah buatan manusia dengan berbagai kepentingan. Karena itu sesungguhnya konstruksi sosial ini adalah

pedang bermata dua. Apabila digunakan untuk kebaikan, maka konstruksi akan bermanfaat bagi masyarakat. Begitu juga ketika konstruksi sosial digunakan untuk tindakan menyerang kelompok tertentu, maka konstruksi sosial menjadi alat yang mematikan.

Maraknya iklan berbau politik yang terpampang di berbagai media bukan lagi hal hal tabu dalam hal konstruksi sosial. Secara otomatis, masyarakat menyadari, sebagai penanda penyelenggaraan pemilihan umum. Jelang pemilu, semua pemimpin berusaha melakukan berbagai upaya peningkatan pencitraan demi meningkatkan elektibilitasnya. Ajang pemilihan ini begitu ramai dan juga menjadi ajang bagi setiap partai untuk memperkenalkan diri di hadapan publik dengan maksud tertentu.

Setiap kesempatan, sering kali dimanfaatkan anggota partai untuk menciptakan citra yang baik di mata publik. Dengan cara blusukan, maupun slogan iklan yang terlihat menjamin janji. Namun, pencitraan yang dilakukan partai politik hanyalah euforia tahunan.

Peningkatan citra jelang pemilu juga dilakukan berbagai cara. Salah satunya dengan menyebarkan berita *hoax* kepada lawan politik. *Hoax* semakin hari semakin bertebaran, tak hanya di media sosial yang membuat banyak orang



KOMUNIKASI POLITIK PENCITRAAN

Penulis : Burhan Bungin
Penerbit : Pernada Media Group
Cetak : April 2018
Tebal : 310 hlm
ISBN : 978-602-422-297-0
Harga : Rp 110.000

terprovokasi dan mengguncang situasi politik.

Menurut Burhan (hal. 151) *Hoax* adalah salah satu persoalan serius dalam etika komunikasi politik, karena selain memiliki efek hiburan, *hoax* dapat merusak citra lawan politik. Semua berita *hoax* tidak saja merugikan subjek *hoax*, namun juga menyerang dan merusak tatanan etika politik masyarakat. *Hoax* juga dapat menjadi mesin pembunuhan karakter seseorang.

Di lingkungan masyarakat yang belum tumbuh kesadaran literasi media yang baik, *hoax* menjadi medium tumbuh kembangnya secara dinamis dalam spektrum yang luas. Baik untuk menyerang kelompok orang, lawan politik maupun menyerang tokoh agama, kelompok, etnis maupun institusi melalui delegitimasi kebenaran dan rekonstruksi kebenaran subjektif.

Media sosial merupakan sarana yang penting bagi kehidupan publik khususnya anak muda yang menjadikan media sosial sebagai tempat untuk mengonsumsi berita, mengembangkan jati diri, dan identitas politik. Konten yang ditulis di media sosial diciptakan untuk mengetahui respons *netter* yang saling berteman pada media sosial tersebut.

Pengguna media sosial (*netizen*) saat ini tidak semuanya murni menyuarakan aspirasi politik dari diri sendiri. Ada juga *netizen* yang memang dibayar untuk mem-*viral*-kan balik suara yang mereka lontarkan dalam sebuah status atau cuitan. Munculnya *Hastag* (#) seperti #2019tetap-jokowi, #2019prabowopresidenten

ataupun #2019gantipresidenten merupakan *personal branding* yang dilakukan masing-masing Tim kampanye.

Burhan menyinggung masalah *Hastag* (#) politik (hal. 178). Sebagai contoh #saveKPK yang begitu saja membanjiri media-media sosial, menyebar dari HP ke HP lainnya dan menyebar dari pelosok kota sampai ke kampung-kampung, dari berbagai usia, latar belakang etnis. Pendukung #saveKPK misalnya memuji-muji kebenaran pe-



DI LINGKUNGAN MASYARAKAT YANG BELUM TUMBUH KESADARAN LITERASI MEDIA YANG BAIK, HOAX MENJADI MEDIUM TUMBUH KEMBANGNYA SECARA DINAMIS DALAM SPEKTRUM YANG LUAS.

san mereka, namun tidak sedikit juga masyarakat yang meragukan gerakan ini sebagai suatu ketidakmampuan masyarakat Indonesia untuk menerjemahkan kemarahan kedalam tindakan politik yang konkret. Sehingga gerakan ini dapat secara nyata ditindaklanjuti oleh pemerintah melalui parlemen. Tagar politik merupakan berita politik yang dilepaskan sebagai bola api, bergulir tidak menentu. Hal itu sesuai dengan hukum-hukum politik, bahwa berita politik dan bergulir ke arah mana muara kesalahan politik akan diarahkan.

Media juga menciptakan Hiperrealitas, seperti yang marak terjadi saat ini di mana kampanye politik yang hanya dihadiri oleh sejumlah kecil orang, dapat dibuat oleh media seakan-akan kampanye itu dihadiri ribuan orang. Realitas ini dibuat dengan cara menggunakan pengambilan gambar pada sudut-sudut penonton tertentu, atau melalui *close-up* kamera.

Buku ini sangat lengkap karena mengulas tentang administrasi modern hingga komunikasi politik, beserta cara yang harus dilakukan untuk menghadapi permasalahan tersebut. Burhan memberikan pemahaman yang lebih besar tentang pemerintahan, situasi, realita, usaha organisasi, desain sosial, tindakan dan perilaku, diri, etika, dan lain-lain. Dilihat dari pengalamannya sebagai penulis, Burhan sukses membawa pembaca dengan mudah memahami apa yang dituliskannya. Burhan mengambil contoh persoalan politik yang tengah terjadi di Indonesia sehingga pembaca mendapat gambaran dan mudah memahami.

Namun alangkah lebih baiknya jika buku ini juga banyak membahas tentang administrasi beserta contoh yang mudah dipahami, beserta penjelasan lebih mendalam mengenai istilah asing agar lebih mudah dimengerti bagi orang yang awam dalam berpolitik. Terlepas dari itu, buku ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi pembaca yang sedang mempelajari administrasi publik, komunikasi dan pencitraan politik. Buku ini juga sangat berguna bagi praktisi politik, anggota partai, anggota legislatif dan siapa saja yang ingin belajar tentang pencitraan politik.

● Feby Yunita Noerisman

MENANG KAMPANYE DI ERA DEMOKRASI DIGITAL

Pesta demokrasi merupakan ajang kompetisi bagi para politikus, baik mereka yang mencalonkan diri sebagai legislatif maupun eksekutif tentu harus berupaya keras agar mendapati kursi sang juara. Berbagai cara akan diupayakan para calon kandidat, ibarat produk komersial, mereka dituntut menjual dirinya kepada masyarakat agar layak dipilih.

Konsumennya ialah konstituen yang menjadi target “penjualan” para politikus tersebut. Mereka pasti akan melakukan berbagai cara untuk mencapai target tersebut. Berbagai pemasangan spanduk, baliho, poster dilakukan sebagai upaya iklan agar namanya dikenal dan meraup suara sebanyak-banyaknya. Sebagai produk, tentu itu semua membutuhkan modal yang harus merogoh kocek dalam-dalam untuk mengarahkan persepsi pemilih ke suara masing-masing kandidat.

Jika salah strategi, bukan untung dan kemenangan yang didapat, tapi kantong jebol dan gangguan jiwa bisa mengancam. Untuk itu, dalam buku *Political Personal Branding* yang ditulis oleh Silih Agung Wasesa bisa menjadi panduan bagi para politikus untuk memenangi pemilu dengan biaya relatif terjangkau dan tepat sasaran. Sebagai orang yang berpengalaman di bidang komunikasi pemasaran, penulis cukup jeli menguraikan strategi pemasaran di jagat politik. Dia menuturkan cara mengaplikasikan pemasaran merek komersial di politik. Bukti-bukti empirisnya dipaparkan-

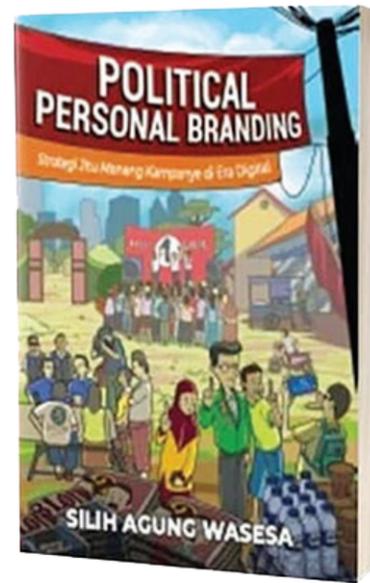
nya sebagai perbandingan. Alhasil, para pembacanya bisa mendapati perspektif yang segar dalam memasarkan politikus

Cara memenangi pemilu ditulisnya dengan lugas tanpa banyak teori. Dia menguraikan cara kampanye yang kreatif dan tidak konvensional, ramah kantong, dan memunyai nilai tambah yang berbeda dibandingkan dengan kompetitor lainnya. Hal ini yang disebut mengawali dengan *personal branding*

Selanjutnya, politikus harus melengkapinya dengan kemampuan komunikasi verbal, visual, memaksimalkan media sosial, dan kerja lapangan. Sebagai contoh, penulis memaparkan cara mendulang suara berbasis komunitas yang bisa dikonversi menjadi promosi gratis. Itu bisa terealisasi jika pendekatannya tepat.

Lantas, apakah setelah membaca buku ini seorang politikus bisa merebut kursi juara? Atau minimal tidak bangkrut dan stres menghadapi pergulatan pemilu? Politikus dapat seterusnya mengabdikan meski kalah dalam kompetisi. Maksudnya, sekalipun kalah politikus bisa berpeluang di pemilu selanjutnya. Penulis lagi-lagi menguraikan strategi yang efektif dalam buku ini. Caranya dengan beradaptasi dan bertransformasi menjadi politikus modern yang terus bekerja untuk masyarakat tanpa menutupi rahasia apapun.

Secara menyeluruh, buku ini begitu modern untuk menghadapi tantangan pemilu yang serba modern. Divisualisasi secara bagus,



POLITICAL PERSONAL BRANDING, STRATEGI JITU MENANG KAMPANYE

Penulis : Silih Agung Wasesa
Penerbit : Ekspose
Cetak : Agustus 2018
Tebal : 224 hlm
ISBN : 9786027829442
Harga : Rp 94.000

“

MENGURAIKAN CARA KAMPANYE YANG KREATIF DAN TIDAK KONVENSIONAL, RAMAH KANTONG, DAN MEMUNYAI NILAI TAMBAH YANG BERBEDA DIBANDINGKAN DENGAN KOMPETITOR LAINNYA.

sehingga pembaca tidak bosan dan lelah membaca buku penulis dari lembar ke lembar. Penulis banyak menuliskan tentang bagaimana menghadapi generasi *millennial* dalam demokrasi digital ini, ada berbagai cara yang disuguhkan penulis untuk berkampanye dan membangun *personal branding* melalui media sosial. Namun sayangnya, penulis tidak bicara mengenai fenomena *buzzer* yang marak saat ini. Bagaimana keterlibatan dan efektivitas *buzzer* dalam demokrasi digital saat ini.

Penulis hanya menulis secara ideal, menyarankan hal-hal yang patut digunakan politikus dalam membangun *personal branding* melalui media sosial, seperti membeli *follower*, memetakan *netizen*, *editor plan* (*copy writing*, konten lucu, info-grafis, kata-kata bijak), dan silaturahmi digital. Secara menyeluruh cara itu memang cukup ampuh bagi mereka yang sudah ‘terkenal’, tapi bagi pendatang baru, dalam media sosial membutuhkan peran *buzzer* sebagai alarm *netizen* akan sosok yang ingin dipasangkan.

Pada sosial media, *buzzer* yaitu orang yang memanfaatkan akun sosial media miliknya guna menyebar luaskan info atau dengan kata lain untuk melakukan promosi maupun iklan dari suatu produk maupun jasa pada perusahaan tertentu. Seorang *buzzer* di sosial media pada kenyataannya memiliki peran sebagai alarm. Maksudnya orang yang akan terus menerus sesuai jadwal yang telah ditetapkan

kan melakukan suatu promosi atau iklan mengenai suatu produk. Biasanya hanya akun dengan jumlah pengikut yang banyaklah yang bekerja pada profesi ini. Selain itu tentunya akun tersebut juga dapat memberikan pengaruh besar kepada para *followers*-nya. Maka dari itu biasanya akun-akun sosial media seorang *buzzer* adalah akun dari seorang publik figur itu sendiri, seperti tokoh publik, politisi atau artis.

Pada beberapa contoh kasus di Indonesia, *buzzer* sering kali efektif. Misalnya pada kampanye Gojo (Golkar Jokowi) yang mengenalkan sosok Airlangga Hartanto sebagai calon yang bakal digadang-gadangkan berpasangan dengan Jokowi sebelum ditetapkan cawapres Jokowi. Istilah Gojo yang semula adalah istilah awam, kini mulai melekat di pikiran masyarakat sebagai simbol kandidat Jokowi-Airlangga. Apalagi sebenarnya maknanya adalah nama partai bukan individual, namun *buzzer* mampu mengartikan sebagai istilah yang melekat pada Airlangga Hartanto.

Selain itu, bila dibandingkan dengan buku sejenis lainnya, buku ini sebenarnya merupakan pengembangan dari buku Marketing Politik karya Prof Firmanzah. Konsep memetakan pemilih, atau istilah SOP (*Sales Oriented Party*)/MOP (*Market Oriented Party*)/POP (*Product Oriented Party*) dan berbagai teori tokoh marketing politik lainnya dalam buku Firmanzah dikembangkan dengan bahasa modern dan situasi sekarang. Namun di balik itu semua, buku ini bisa dibalang ruh baru dalam dunia marketing politik, yang mengajarkan para politikus untuk cerdas dalam menghadapi demokrasi digital dan menekan biaya kampanye agar terselamatkan dari *mindset* ‘balik modal’.

● Indah Fajar Rosalina



Petualangan Kedua Newt Scamander

Fantastic Beast, The Crimes of Grindelwald

Sutradara: David Yates

Pemain: Eddie Redmayne,
Katherine Waterston,
Alison Sudol,
Johnny Depp,
Ezra Miller,

Zoë Kravitz, Jude Law,

Skenario: J.K. Rowling

Produksi: Warner Bros

Tayang: 16 November 2018
(Amerika)

Durasi: 133 menit



Kabar gembira bagi para penggemar dunia sihir Harry Potter! Warner Bros akhirnya memberi sedikit 'bocoran' mengenai sekuel film *Fantastic Beasts and Where to Find Them*, yang diberi judul *Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald*. Banyak hal dan pengetahuan baru mengenai sejarah dunia sihir Harry Potter yang akan terungkap melalui film kedua *Fantastic Beasts* ini.

Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald merupakan sekuel dari film pertamanya *Fantastic Beasts and Where to Find Them* yang tayang November 2016 lalu. Film pertamanya mendapatkan respon positif dari penonton hingga menghasilkan kurang lebih 800 juta USD, dan menjadikannya film dengan pendapatan terbesar pada tahun itu.

Kursi sutradara masih ditempati oleh David Yates dengan cerita yang tentunya masih berdasarkan buku yang ditulis oleh J.K. Rowling. Melanjutkan cerita film pertamanya. Cerita di film kedua ini

masih terjadi pada 1927, hanya berselang beberapa bulan setelah petualangan pertama Newt Scamander pada film pertama.

Spin-off dari film 'Harry Potter' ini akan kembali menampilkan Eddie Redmayne sebagai *magizoologist* bernama Newt Scamander. Katherine Waterston kembali memerankan Porpentina "Tina" Goldstein. Begitu juga Dan Fogler sebagai Jacob Kowalski, Alison Sudol sebagai Queenie Goldstein, dan Ezra Miller sebagai Credence Barebone. Film ini berfokus pada sejarah kehancuran dunia sihir yang disebabkan oleh ulah *dark wizard* terkuat sebelum lahirnya Lord Voldemort, yaitu Gellert Grindelwald.

Pada akhir film pertama, penyihir gelap yang kuat, Gellert Grindelwald (Johnny Depp) ditangkap oleh MACUSA (Kongres Sihir Amerika Serikat), dengan bantuan Newt Scamander (Eddie Redmayne). Dengan memanfaatkan ancamannya, Grindelwald berhasil melarikan diri.

Grindelwald menyusun rencana

untuk menguasai dunia *muggle* sebutan untuk mereka yang tidak bisa ilmu sihir dengan mengumpulkan penyihir-penyihir berdarah murni. Kepala sekolah Hogwarts, Albus Dumbledore, sadar akan hal itu. Dumbledore meminta bantuan Newt Scamander untuk melaksanakan rencananya. Dua tokoh inilah yang akan memegang peran penting dalam mengatasi ulah kriminal dari Gellert Grindelwald. Petualangan Newt mempertemukannya kembali dengan Tina, Queenie, dan Jacob.

Dumbledore tampak menggenggam sebuah tongkat sihir, namun tongkat tersebut bukanlah Elder Wand seperti yang digunakannya pada seri film Harry Potter. Pada masa tersebut, Dumbledore belum memiliki Elder Wand karena tongkat tersebut masih ada di tangan Grindelwald, yang mencurinya dari toko tongkat sihir Gregorovitch.

Karakter Nicholas Flamel, pencipta batu *Philosopher's Stone* yang namanya banyak disebut dalam buku maupun film Harry Potter,

muncul dalam film ini. Nicholas diketahui merupakan salah satu teman dekat dari Dumbledore. Kisah mereka di masa lalu akan terungkap untuk pertama kalinya pada film kedua ini. Selain Nicholas Flamel, karakter lain yang kemunculannya patut dinantikan adalah Theseus Scamander yang merupakan kakak dari Newt Scamander, Leta Lestrange yang diduga masih satu darah dengan Bellatrix Lestrange, serta karakter baru lainnya.

Satu hal yang paling mengejutkan penggemar pada poster *Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald* yang sudah dirilis adalah munculnya karakter Credence. Banyak penggemar yang mengira karakter Credence sudah tewas pada akhir cerita *Fantastic Beasts and Where to Find Them*, namun ternyata ia masih hidup. Produser *Fantastic Beasts*, David Heyman, pernah mengungkapkan bahwa sebenarnya pada film pertama, terdapat adegan yang menampilkan Credence berhasil selamat dari ledakan dan kemudian ia menempuh perjala-

nan ke suatu tempat menggunakan perahu. Namun tim produksi memutuskan untuk menghapus adegan tersebut untuk memancing rasa penasaran penonton.

Selain dibuat penasaran dengan keberadaan Credence, film kedua *Fantastic Beasts* ini juga akan menampilkan ketegangan dan kekacauan dunia sihir yang disebabkan oleh munculnya wabah kutukan sihir baru yang diciptakan oleh seorang penyihir yang belum diungkapkan namanya, dan akan diperankan oleh aktris Claudia Kim. Karakter penyebar kutukan tersebut diceritakan sebagai seorang '*Maledictus*', pembawa darah kutukan yang mampu merubah dirinya menjadi monster mengerikan.

The Crimes of Grindelwald sangat pantas dinanti. *The Crimes of Grindelwald* menawarkan cerita yang berbeda dari *Fantastic Beasts and Where to Find Them*. Banyak hal dan pengetahuan baru mengenai sejarah dunia sihir Harry Potter yang akan terungkap melalui film kedua *Fantastic Beasts* ini. Jika

film pertamanya fokus membahas makhluk-makhluk magis yang ada di dunia Harry Potter, film kedua ini akan bercerita tentang kemunculan Grindelwald sebagai Voldemort di awal abad 20. *The Crimes of Grindelwald* juga akan lebih baik dari segi sinematografi. Pengambilan gambar jauh lebih hidup dan mendalam, dibanding dengan film sebelumnya dimana pengambilan gambar terkesan statis.

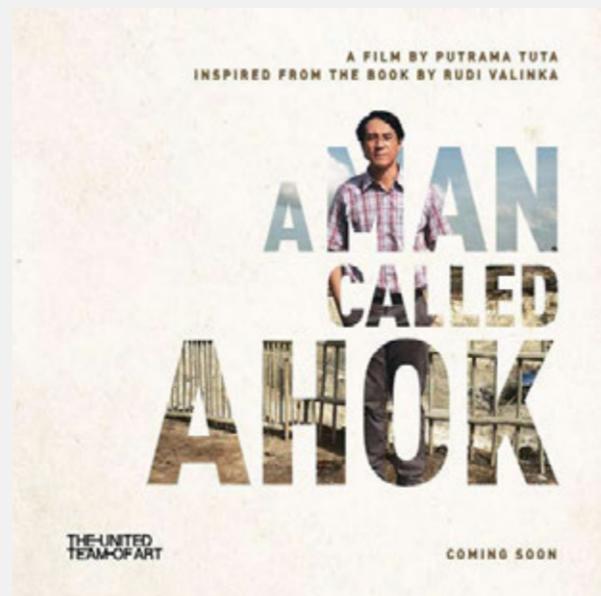
Penulis JK Rowling lebih mengeksplor dunia sihir di negara-negara lain, yaitu Paris, London dan New York dan menggali lebih dalam kedunia sihir pada film ke dua ini. Rowling juga membuat film ini sedikit lebih panjang dengan skenario yang rumit serta membuat benang penghubung yang membawa ke dalam dunia *Harry Potter*. Rowling mengembangkan unsur

petualangan dari film pertama dan akan menciptakan sesuatu yang lebih kaya, dalam, dan menegangkan.

Eddie Redmayne dan Katherine Waterston merasa kecewa ketika mereka kali pertama membaca naskah untuk sekuel terbaru *Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald*. Karena, film tidak menyertakan kisah romansa untuk karakter mereka berdua. Bagian terpenting dari film ini adalah ketika mereka bertemu kembali, setelah sebelumnya pada sekuel pertama mereka harus berpisah. Namun dalam film ini JK Rowling tidak banyak menampilkan hubungan antara Eddie Redmayne dan Katherine Waterston seperti pada film sebelumnya. Namun terlepas dari hal tersebut, film ini wajib ditunggu.

Fantastic Beasts The Crimes of Grindelwald ini, diproduksi dan diedarkan oleh Rumah Produksi Film: Warner Bros. Film ini dijadwalkan rilis pada 16 November 2018 (Amerika). Untuk dibeberepa negara film ini, juga dikenal dengan nama judul yang berbeda yaitu seperti di Argentina berjudul *Animales Fantásticos y dónde encontrarlos 2*, di Brazil berjudul *Animais Fantásticos e Onde Habitam 2*, di Spanyol berjudul *Animales fantásticos y dónde encontrarlos 2*, di Portugal (literal title) berjudul *Monstros Fantásticos e Onde Encontrá-los 2*, di Swedia berjudul *Fantastiska vildunder och var man hittar dem 2*, di Turki berjudul *Fantastik Canavarlar Nelerdir Nerede Bulunurlar 2*, dan Vietnam berjudul *Sinh Vat Huyen Bi 2*. (FYN)

Karier Politik Basuki Tjahaja Purnama



Sebuah film biopik karya anak negeri akan segera tayang, dengan judul *A Man Called Ahok*. Film ini diangkat dari adaptasi buku karya Rudy Valinka dengan judul yang sama. Bercerita tentang kisah perjuangan karir Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mulai dari kariernya di Belitung hingga ke Jakarta.

Trailer Film ini dimulai dengan disorotnya alam Belitung yang indah. Dengan lahan hijau yang luas dan danau kecil di sekitarnya. Kisah ini dimulai dengan sebuah wejangan Denny Sumargo yang berperan sebagai Ayah Ahok (Kim Nam). "Kalau nak berburu harimau, ajak saudara sekandung. Kalau kau berburu dengan saudara sekandung, walau berhadapan dengan harimau ganas, dia *ndak* akan lari," ujar Deni kepada Daniel Mananta yang berperan sebagai Ahok Dewasa.



Wejangan lain sang ayah juga terngiang-ngiang kepada Ahok kecil (Eric Febrian) untuk menjadi laki-laki yang berprinsip. Bukan tanpa alasan, wejangan semacam ini rupanya juga dipegang teguh oleh sang ayah. Sebuah cuplikan sikap tegas sang ayah melawan kecurangan di wilayahnya yang menunjukkan betapa sang ayah tidak hanya menyuruh tapi memberi teladan bagi anak-anaknya.

Suatu ketika, sang ayah di masa tua (Cew Kin Wah) diceritakan berpulang ke rumah Tuhan. Tapi tidak dengan nilai-nilai kehidupan yang ia tanamkan pada anak-anaknya, termasuk Ahok. Nilai-nilai ini dipegang teguh oleh Ahok.

A Man Called Ahok

Sutradara: Putrama Tuta
Pemain: Daniel Mananta, Denny Sumargo, Edward Akbar, Eriska Rein

Skenario: Rudy Valinka
Produksi: The United Team of Art

Tayang: Desember 2018

Ia berjuang keras untuk melawan sistem busuk yang berlangsung di daerahnya, Belitung, persis seperti yang dilakukan oleh ayahnya semasa hidup. Tujuannya jelas, membuat perubahan. Sebuah *quote* yang menunjukkan betapa tegasnya Ahok dalam menumpas sistem birokrasi yang buruk terlihat dalam secuplik percakapan Ahok dengan tegas mengatakan, "Gue yang sikat itu maling-maling!" katanya.

Tidak berhenti sampai di situ. Ucapannya ini ia buktikan dengan sungguh-sungguh. Hingga suatu saat ia berjuang untuk membangun tanah kelahirannya, Belitung, dengan jalan menjadi politisi yang tidak segan terjun ke lapangan langsung.

Sebuah kutipan dari orang terdekatnya yang diperankan oleh Edward Akbar, mengatakan. "Aku *ndak* akan pilih kau sebagai pemimpin, Hok. Tapi untuk jadi pelayan Belitung Timur, kau *lah* orang pertama yang akan kupilih," jelasnya.

Dan lagi, wejangan sang ayah mengingatkannya untuk terus berjuang dengan tulus. Ahok terngiang nasihat almarhum ayahnya, "Jangan pernah berhenti mencintai negeri ini, Hok," kata sang Ayag

Benar saja, Ahok terus berjuang

hingga akhirnya menapakkan kakinya di Jakarta. Lalu bagaimanakah kelanjutan cerita dari film yang disutradarai oleh Putrama Tuta ini?

Diperankan oleh Daniel Mananta, Denny Sumargo, Edward Akbar, Eriska Rein hingga Sita Nursanti sebagai (Buniarti/Ibunda Ahok), film *A Man Called Ahok* diakui oleh sang sutradara tidak ada sama sekali unsur politisnya. Malahan, film Ahok lebih menceritakan kisah hidup Ahok dan hubungannya dengan sang ayah beserta saudara-saudaranya sendiri sewaktu di Belitung Timur. "Film ini dibuat tanpa unsur politis, dan murni mengajarkan nilai kejujuran Ahok yang ditularkan melalui sang ayah yang dikisahkan sejak 1976 hingga 2005," kata sutradara *A Man Called Ahok* disadur dalam *tempo.co*

Riset dan naskah film ini digarap hampir setahun sejak Februari hingga Desember 2017. Sutradara menulis langsung naskah bersama Ilya Sigma dari tim Tujuh Ratus Kata. Praproduksi berlangsung empat bulan. Syuting berjalan hampir dua bulan mulai Maret hingga April 2018. Sebagian besar mengambil lokasi Belitung. Rencananya film ini akan segera tayang di bioskop-bioskop kesayangan Anda pada akhir 2018 nanti. Jadi, jangan lupa nonton *ya!* (IFR)

Koma

Oleh: Muhammad Harya
Ramdhoni

SOLO di musim kemarau 1967. Panggil saja namaku Tik. Tak perlu kalian tahu siapa nama lengkapku. Tak ada faedahnya dan tak kepentingannya untuk kalian. Kutulis kisah ini dua tahun setelah peristiwa saling membantai yang mengharubiru pulau Jawa dan sebagian besar wilayah Indonesia.

Segerombolan tentara berhaluan kiri menculik dan menembak mati enam jenderal angkatan darat dan seorang perwira pertama di sekitar Ibu Negeri Jakarta. Kemudian, bagaikan serbuan air bah, susul menyusul tentara dengan dukungan rakyat jelata yang kalap dan gelap mata membantai saudara sebangsa yang dicurigai sebagai tokoh, anggota dan simpatisan pe-ka-i.

Selama hampir dua tahun, sejak dua kali musim hujan hingga musim kering di tahun ini, Bengawan Solo dan kali Brantas dipenuhi mayat-mayat yang didakwa sebagai kaum merah. Saat dua sungai besar itu meluap maka dapat kausaksikan tubuh-tubuh malang yang telah membusuk muncul ke permukaan.

Wajah mereka tak dapat dikenali lagi. Sebagian telah kehilangan tangan atau kaki. Desas-desus yang kudengar menyebutkan sering ditemukan jari tangan dan bola mata manusia di dalam perut ikan yang dibeli dari pasar-pasar pelelangan ikan. Ibu-ibu jadi enggan belanja ikan selepas mendengar cerita itu. Termasuk di rumah kami di mana Bu Lik Koem yang biasanya rajin menyajikan ikan kali di meja makan terpaksa menggantinya dengan lauk lainnya. Akibat dari semua itu penjualan ikan menurun drastis.



Siapa lagi yang dirugikan oleh merebaknya isu ini selain para nelayan dan penjual ikan di darat. Penghidupan mereka yang miskin semakin terpuruk. Ramai di antara mereka yang menganggap sia-sia turun ke sungai karena ikan tak lagi laku.

Sebagian dari mereka beralih profesi menjadi kuli bangunan atau bekerja serabutan. Huru-hara ini bukan hanya merenggut ratusan ribu nyawa yang belum tentu berdosa tetapi juga mematikan sumber penghidupan kaum nelayan.

Saat itu aku hanyalah perempuan muda yang awalnya tak peduli dengan politik. Aku cuma

perempuan biasa alumnus sekolah kebidanan negeri di tepi kota bengawan. Rutinitasku sehari-hari tak lebih dari rumah Bu Likku di jalan Sindoro ke rumah sakit. Kehidupanku hanya berkutat pada persoalan ibu hamil, kelahiran bayi prematur, kelahiran bayi tak diinginkan, kematian bayi atau kematian seorang ibu yang mati mendadak setelah melahirkan.

Itulah sebabnya mengapa segala hal yang kutulis di dalam naskah ini bukan mengenai tindakan saling membantai antara kaum kiri melawan kaum kanan atau pergolakan politik yang mengakibatkan pemimpin revolusi kami, Bung Besar, dimakzulkan secara paksa oleh oknum-oknum idiot berseragam hijau lumut.

Semua ini berkaitan dengan seorang lelaki yang pernah singgah di hatiku untuk sekian lama. Aku dan dia pernah memadu kasih dan memimpikan rumah tangga bersahaja seperti layaknya muda-mudi sederhana di zaman ini. Kami telah bertukar cincin dan berencana menikah dalam waktu dekat.

"Kupinang dirimu ke hadapan Pak Lik dan Bu Likmu setelah aku kembali dari medan tempur Irian, Tik," bisiknya seraya mencium keningku dan memeluk tubuh mungilku.

Pipiku basah oleh tangis yang haru. Berbarengan dengan hujan deras yang tiba-tiba jatuh dari langit membasahi Markas Batalyon Banteng Raider di Sronдол. Lelaki itu bernama Kusman. Aku memanggilnya dengan sebutan sayang "Mas Kus."

Setelah peristiwa pembantaian para jenderal, rakyat negeri ini mengenalnya sebagai Untung, lelaki keji yang tega menculik dan menembak mati para jenderal. Untung? Nama yang asing bagiku. Seakan-akan dia tak pernah singgah walau sekejap pun di dalam alur kehidupanku. Siapakah sebenarnya Mas Kus-ku yang punya nama alias? Betulkah ia seorang komunis ortodoks yang tega membunuh sesama anak bangsa demi kemenangan sebuah ideologi yang dipujanya? Ataukah ia hanya si pandir yang kebetulan memakai seragam hijau lumut, seperti rekan-rekannya yang idiot itu, dan entah sadar atau tidak, ia biarkan dirinya diperalat oleh segelintir tuan culas untuk kepentingan politik sesaat dan sesat?

Sekalipun aku telah menikah dengan Mas Kirno satu tahun sebelum meletus peristiwa saling membantai, dan kini aku tengah mengandung anak kedua, namun pertanyaan besar mengenai siapa sebenarnya Kusman alias Untung tetap menggeliat menembus ruang dan waktu.

Mungkinkah diam-diam cintaku padanya masih hidup? Tak tahulah aku. Bertahun-tahun aku mencari tahu perihal dirinya. Segala cara kutempuh untuk mengetahui tentang masa lalunya, jauh sebelum ia berjumpa denganku. Kudapati masa lalu seorang Kus yang separuh gelap separuh terang seperti kebanyakan tokoh-tokoh kiri yang sok misterius.

Kuputuskan menulis semua tentang dirinya di pagi ini ketika matahari belum sepenuhnya terbit dan kelelawar dan burung-burung malam masih dalam perjalanan pulang ke peraduan. Malangnya, seperti kubaca di koran nasional beberapa hari lalu, inilah pagi hari yang naas bagi dirinya.

Sepagi ini Mas Kus mesti berhadapan dengan regu tembak di suatu tempat nan sunyi di luar kota Bandung.

Sebuah tempat berjarak ratusan mil dari kampung kelahirannya di Kedung Bajul, Kebumen. Kubayangkan Mas Kus-ku tegap berjalan menuju barisan regu tembak, yang mungkin di antara mereka pernah menjadi anak buah atau rekan sejawatnya, dengan gagah berani.

Tapi engkau tak dapat menipu diri sendiri, Mas. Aku tahu sejatinya dirimu. Hatimu kecut, bukan? Siapa yang tak ngeri dipaksa mati dan terberai dari orang-orang tercinta. Seminggu sebelum keberangkatanmu ke medan laga Irian, kau mengeluh kepadaku betapa mengerikan perang ini. Merebut sejenkal tanah yang entah hak milik siapa.

"Prajurit sepertiku tak lebih dari bidak catur bagi pemimpin besar yang gila perang," keluhmu.

Saat itu aku hanya dapat membesarkan nyalimu.

"Ibu Pertiwi meminta dharma baktimu, Mas. Berangkatlah dengan restuku. Engkau seorang ksatria, dan akan pulang dengan kemenangan." Mas Kus tergamam mendengar ucapanku. Mengingat percakapan itu aku pun mahfum.

Betapa seorang lelaki pemberani yang dielu-elukan hidup tanpa syaraf rasa takut dan didaulat sebagai penerima Bintang Sakti dari Bung Besar sebagai simbol keberaniannya, tetap memendam ciut nyali yang bersifat laten.

Seperti pagi ini ketika burung bangkai secara ajaib muncul dan berkaok-kaok di atas atap rumahku, kauterima ajalmu dengan pasrah namun penuh ketakutan ketika butir demi butir peluru membobol kening dan jantungmu. Aku tak sanggup membayangkan hal ini terjadi padamu, Mas Kus tersayang. Aku tersedak dalam tangis menghiba.

Mengapa engkau mesti mati mengenaskan dan terbuang dari Tanah Bumi Mataram yang kaucintai? Apakah ini hukuman bagi seorang prajurit yang kaku, patuh kepada atasan secara membuta-tuli dan taat azas? Entahlah. Tapi aku yakin bukan mati seperti itu yang kaupinta kepadanya.

Janin di rahimku menggeliat. Ia turut merasakan kesedihan yang tengah melanda ibunya.

Bandar Lampung, 4 Agustus 2018

BETAPA SEORANG LELAKI
PEMBERANI YANG DIELU-ELUKAN
HIDUP TANPA SYARAF RASA
TAKUT DAN DIDAULAT SEBAGAI
PENERIMA BINTANG SAKTI
DARI BUNG BESAR SEBAGAI
SIMBOL KEBERANIANNYA, TETAP
MEMENDAM CIUT NYALI YANG
BERSIFAT LATEN.



MENDAGRI: KEPALA DAERAH TERJERAT KORUPSI HARUS JADI WARNING BAGI YANG BARU TERPILIH

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, merasa prihatin dengan masih terjadinya operasi tangkap tangan yang menjerat para kepala daerah. Harusnya, kepala daerah yang terjerat kasus korupsi jadi warning bagi kepala daerah yang lain. Khususnya, bagi kepala daerah yang baru dilantik. Sehingga mereka tidak jatuh dan terjerat kasus yang sama.

Tjahjo mengatakan itu di Jakarta, saat diwawancarai para wartawan di sela-sela pertemuan dengan Dewan Perwakilan Daerah di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (10/10). Tjahjo sendiri mengaku prihatin sampai saat ini masih ada kepala daerah yang kena jerat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia minta, kasus kepala daerah terjerat operasi tangkap tangan (OTT) dijadikan *warning*. Terutama bagi kepala daerah yang baru terpilih. "Ini warning," kata Tjahjo.

Tjahjo pun kemudian bercerita tentang inisiatifnya mengajak para gubernur yang baru dilantik Presiden Jokowi bertemu dengan pimpinan KPK. Di KPK, para kepala daerah diberi pemahaman utuh dan rinci tentang area rawan korupsi dan tentang segala hal yang terkait dengan pencegahan korupsi. Ia berharap, langkahnya membawa para kepala daerah yang baru dilantik berdiskusi dengan pimpinan KPK bisa memberi efek positif. Terutama dalam membangun semangat serta komitmen anti korupsi di daerah.

"Teman-teman gubernur yang baru dilantik oleh Bapak Presiden, kemari kami ajak untuk bertemu KPK. Setidaknya mari sama-sama melakukan pencegahan. Fungsi pencegahan diutamakan. Saya ajak dengan KPK supaya teman-teman gubernur paham area rawan korupsi yang berkaitan

dengan perencanaan anggaran, perizinan, pajak dan retribusi mekanisme pembelian barang dan jasa dan lain-lain," kata Tjahjo panjang lebar.

Tjahjo juga dalam wawancara tersebut sempat menjelaskan tentang kasus yang menjerat Bupati Pasuruan, Jawa Timur. Kata Tjahjo, kementeriannya telah mengambil langkah menunjuk wakil bupati sebagai pelaksana tugas bupati. Langkah ini semata untuk menjamin agar roda pemerintahan di Pasuruan tetap berjalan normal. Pertimbangannya memang karena Bupati Pasuruan telah berstatus tersangka dan sudah ditahan KPK.

"Untuk Malang karena yang bersangkutan sedang dalam proses penyelidikan walaupun statusnya tersangka yang masih belum kami tunjuk Plt-nya sampai nanti dengan proses penyelidikannya sampai dimana," kata Tjahjo.

Tjahjo sendiri mengaku sedih dengan masih banyaknya kepala daerah yang kena jerat kasus korupsi. Terlebih dari tahun ke tahun, kepala daerah yang kena kasus korupsi kecenderungannya meningkat. Padahal, dari sisi sistem pengawasan dan pencegahan sudah baik. Komisi anti rasuah pun aktif memberikan supervisi. Mestinya, ini jadi perhatian bersama. Khususnya bagi para kepala daerah.

"Sistemnya sudah bagus, fungsi pencegahannya terus ditingkatkan. Memahami area rawan korupsi sudah terus. Seluruh kementerian/ lembaga juga sudah bekerja sama dengan KPK. Jadi kembali ke manusianya," kata Tjahjo. (Puspen Kemendagri)

INDONESIA DAN MALAYSIA SEPAKATI PENYELESAIAN OBP SEKTOR TIMUR PADA 2020



BANDUNG – Tim Delegasi Indonesia bersama Tim Delegasi Malaysia telah menyelesaikan acara *Signing The 42nd Meeting of The Joint Indonesia-Malaysia (JIM) Boundary Committee on Demarcation and Survey of International Between Indonesia and Malaysia*.

Ketua Tim Delegasi Indonesia, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Hadi Prabowo mendapat kepercayaan menjadi pimpinan Persidangan JIM ke-42 atas persetujuan Ketua Delegasi Malaysia. Pertemuan ini pun berlangsung dengan semangat persaudaraan, suasana bersahabat, komunikatif, dan tanpa ada hambatan.

"Kami antara Indonesia dan Malaysia sudah berupaya saling menguntungkan kedua negara. Hingga sepakat Sektor Timur untuk dua *Outstanding Boundary Problem (OBP)* telah dapat terselesaikan. OBP ini yaitu sungai Simantipal dan OBP C 500 C 600," ujar Hadi, di eL Royale Hotel Bandung, Rabu (10/10/2018).

Sebelumnya persidangan JIM ke-42 tersebut menjadwalkan memiliki sembilan rangkaian agenda, yaitu antaranya terdapat tiga agenda prioritas yang menjadi capaian kinerja antara Indonesia dan Malaysia dalam proses penegasan batas dan survei bersama.

Ketiga agenda tersebut membahas laporan kegiatan bersama

Survei tahun 2016-2018, perkembangan Penyelesaian Outstanding Boundary Problem (OBP), dan penandatanganan MoU ke-21 pada tiga segmen area prioritas di Sabah (Kalimantan Utara) dan Sarawak (Kalimantan Barat).

Selanjutnya, Hadi juga menyampaikan penyelesaian segmen OBP di sektor Timur yang sudah disepakati tersebut, kedua negara telah sepakat melakukan pengesahan terhadap dokumen OBP yaitu Resolusi, Rencana Aksi, dan SOP.

"Malaysia sudah memahami bahwa mereka sudah tidak jadi OBP. Hari Rabu 10 Oktober 2018 MoU sudah ditandatangani. Dan dua OBP itu dinyatakan selesai," sambungnya.

Hadi juga mengapresiasi kegiatan yang telah dilaksanakan. Ia pun berharap ke depan kegiatan survei bersama dan dapat lebih diintensifkan agar optimal hasilnya.

"Tentunya kita harapkan penyelesaian juga ada di sektor Barat. Karena sektor timur telah selesai disepakati termasuk peta sesuai kesepakatan dua negara. Makanya Target semua OBP antara Indonesia-Malaysia bisa tercapai di 2020," katanya.

"MoU ini manfaatnya buat masyarakat jadi adanya kepastian hukum. Jelas, OBP ini sudah milik Indonesia secara penuh sehingga bisa digunakan aturan dan ketentuan yang berlaku di Republik Indonesia," ungkapnya.

Di sisi lain, kedua negara pun telah menyepakati hasil-hasil persidangan yang ditandatangani pada Persidangan JIM ke-42 oleh kedua Ketua Delegasi, baik Indonesia maupun Malaysia. Bahkan disaksikan seluruh anggota delegasi Malaysia dan delegasi Indonesia.

Langkah selanjutnya berupaya menyelesaikan sisa dari *Outstanding Boundary Problems (OBP)* dengan targetan antara Indonesia dan Malaysia di Tahun 2020. "Namun kita berupaya menyelesaikan lebih awal dari targetan tersebut," Pungkasnya. (Puspen Kemendagri)

Membangun Sinergitas Antarkomponen Kemendagri

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) merupakan salah satu dari tiga Kementerian Triumvirat (Kemendagri, Kemenlu, dan Kemenhan), yang mempunyai tugas sangat penting dan strategis, yaitu menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kemendagri didukung oleh 11 unit kerja eselon IA, yang terdiri atas Sekretariat Jenderal, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum, Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan, Ditjen Otonomi Daerah, Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Ditjen Bina Pemerintahan Desa, Ditjen Bina Keuangan Daerah, Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Inspektorat Jenderal, Badan Penelitian dan Pengembangan, serta Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Unit kerja eselon IA tersebut di lingkungan Kemendagri disebut “komponen”.

Permasalahan utama dari pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri adalah masih rendahnya *sinergitas antarkomponen*. Masing-masing komponen berjalan sendiri-sendiri, belum secara maksimal bersinergi untuk menghasilkan kinerja Kemendagri yang baik dibandingkan dengan kementerian/lembaga lainnya. Beberapa indikasinya: *pertama*, nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Kemendagri belum mencapai nilai yang diharapkan; *kedua*, tingkat realisasi penyerapan anggaran belum optimal, sesuai data yang bersumber dari Biro Perencanaan Kemendagri (2018), pada 2017 sampai akhir triwulan IV, tingkat rata-rata realisasi penyerapan anggaran Kemendagri hanya 82,7%, dan terdapat perbedaan (*gap*) kinerja realisasi penyerapan anggaran yang besar diantara komponen, yaitu komponen dengan penyerapan anggaran terendah sebesar 69,56%, dan komponen dengan penyerapan anggaran tertinggi sebesar 94,36%, atau selisih antara nilai penyerapan anggaran tertinggi dan terendah sebesar 23,70%. Perbedaan kinerja realisasi penyerapan anggaran tersebut juga terjadi pada Semester I 2018, yaitu rata-rata penyerapan anggaran seluruh komponen baru 41,7%, dengan perbedaan (*gap*) antara komponen dengan penyerapan anggaran terendah dengan yang tertinggi cukup besar, yaitu komponen penyerapan anggaran terendah sebesar 27,81%, dan penyerapan tertinggi sebesar 74,35%, atau selisih perbedaan nilai tertinggi dan terbesar 45,54%.

Masih rendahnya sinergitas antarkomponen dan belum mak-



simalnya nilai kinerja Kemendagri tersebut, belum secara optimal menggambarkan motto yang telah dicanangkan oleh Pemerintahan Jokowi-JK “*Kerja, Kerja, Kerja*”, yang menghasilkan “*Kinerja*”. Oleh karena itu, peningkatan kinerja Kemendagri melalui membangun sinergitas antarkomponen menjadi penting untuk dilakukan. Namun demikian, pelaksanaan sinergitas tersebut tidaklah mudah, diperlukan berbagai upaya perbaikan dan penyempurnaan, mulai dari sinergitas program, sinergitas sasaran, dan sinergitas kelembagaan.

Konseptual sinergitas

Sinergi bukanlah sesuatu yang dapat dipegang oleh tangan, tetapi suatu istilah yang berarti melipatgandakan pengaruh (*multiplier effect*)

yang memungkinkan energi pekerjaan atau jasa individu berlipat ganda secara eksponensial melalui usaha bersama. Sinergitas dalam capaian hasil berarti kerja sama berbagai unsur atau bagian atau kelompok atau fungsi atau instansi atau lembaga untuk mendapat capaian hasil yang lebih baik dan lebih besar.

Berkaitan dengan sinergitas tersebut, Presiden Jokowi menginginkan agar pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota berada pada satu garis lurus, dan setiap kebijakan-kebijakan yang ada di pemerintah pusat bisa dikerjakan secara sinergi bersama-sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pada kesempatan sebelumnya, Beliau juga mengatakan bahwa sinergi adalah kunci.

Mencermati beberapa definisi yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan pengertian sinergitas dalam kaitannya dengan pembahasan ini adalah memadukan program, sasaran dan lembaga setiap komponen untuk mendapatkan kinerja terbaik Kemendagri.

Membangun sinergitas antarkomponen

Upaya untuk membangun sinergitas antarkomponen dalam rangka meningkatkan kinerja Kemendagri dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan sinergitas, yaitu sinergitas program, sinergitas sasaran, dan sinergitas kelembagaan.

Sinergitas program, adalah upaya terpadu dalam bentuk perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan untuk mencapai target dan sasaran kinerja kemendagri, yaitu “*Kemendagri sebagai POROS jalannya pemerintahan dan politik dalam negeri, meningkatkan pelayanan publik, menegakkan demokrasi dan menjaga integrasi bangsa*”. Sehingga dapat menjamin keber-

langsungan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, pembangunan daerah, demokrasi, penegakan hukum dan kesatuan bangsa.

Dengan demikian, dalam penyusunan rencana program/kegiatan masing-masing komponen tidak hanya merencanakan program/kegiatan untuk melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing, tetapi rencana program/kegiatan tersebut harus bersinergi dalam upaya pencapaian target dan sasaran kinerja kemendagri sebagaimana tersebut di atas.

Keterpaduan pelaksanaan program adalah program/kegiatan antarkomponen dilaksanakan dalam langkah dan waktu yang terpadu, sehingga diantara komponen tidak ada kinerja pelaksanaan programnya yang rendah satu sama lain. Salah satu indikator keterpaduan pelaksanaan program ini adalah “persentase daya serap anggaran” setiap komponen dalam setiap triwulannya. Apabila setiap komponen berpikir harus ada keterpaduan dalam pelaksanaan program/kegiatan, tidak mungkin akan terjadi ketimpangan daya serap anggaran antarkomponen, yang selama ini terus menerus terjadi. Oleh karena itu, harus diupayakan agar setiap komponen minimal rata-rata daya serap keuangannya meningkat 25% setiap triwulannya, dan sampai dengan akhir triwulan IV dapat mencapai angka rata-rata 95- 98%.

Keterpaduan pelaksanaan program/kegiatan ini merupakan salah satu indikator yang penting untuk penilaian “baik atau jeleknya” kementerian/lembaga. Hal ini karena setiap triwulan akan dilaksanakan pertemuan oleh Kementerian Keuangan, Kantor Sekretariat Presiden, bahkan oleh Presiden RI dalam Sidang Kabinet, untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan program/kegiatan dari masing-masing kementerian/lembaga. Kinerja daya serap anggaran ini merupakan salah satu komponen untuk nilai akuntabilitas kinerja kementerian/lembaga oleh Kempan-RB. Dengan demikian target kinerja LAKIP A Kemendagri dengan mudah akan dapat dicapai.

Sinergitas sasaran, adalah upaya terpadu antarkomponen untuk membangun hubungan tatakelola pemerintah pusat dan daerah yang lebih efektif, efisien, taat kepada hukum, mempercepat reformasi birokrasi, dalam upaya penguatan otonomi daerah. Sinergitas sasaran tersebut menjadi tanggungjawab seluruh pejabat di lingkup kemendagri untuk mencapainya. Dalam pelaksanaannya, sasaran kinerja tersebut dicantumkan dalam “Perjanjian Kinerja” setiap tahunnya, yang disepakati dan ditandatangani oleh para pejabat eselon I, II, III, dan IV di lingkungan Kemendagri.

Sinergitas kelembagaan, adalah upaya terpadu dalam bentuk

regulasi, pengembangan sumber daya manusia, dan peran setiap komponen dalam memfasilitasi, membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintah daerah, baik dalam bidang politik dan pemerintahan umum, bidang pembinaan administrasi kewilayahan, bidang penyelenggaraan otonomi daerah, bidang urusan pemerintahan dan pembinaan pembangunan daerah, bidang pembinaan pemerintahan desa, maupun dalam bidang pembinaan keuangan daerah, serta bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

Keterpaduan regulasi merupakan upaya terpadu dari setiap kebijakan yang diterbitkan oleh komponen, dan tidak ada yang tumpang tindih atau saling bertolak belakang satu sama lain. Keterpaduan dalam pengembangan sumber daya manusia dilakukan dengan memberikan peran kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan serta pengembangan kapasitas aparatur sumber daya manusia pemerintah daerah. Selama ini, dirasakan, peran BPSDM sangat lemah, karena materi pelajaran tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan daerah. Sedangkan keterpaduan peran lembaga merupakan memberikan peran yang sama kepada setiap komponen untuk dapat meningkatkan kinerja kemendagri. Sebagai contoh adalah lebih ditingkatkan pemanfaatan hasil “kelitbangan” sebagai rekomendasi perumusan kebijakan kemendagri dan pemerintah daerah, yang telah dihasilkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri.

Untuk itu, sinergitas antarkomponen diperlukan untuk dapat meningkatkan kinerja Kemendagri secara keseluruhan. Untuk dapat mewujudkan sinergitas tersebut, komitmen dan kerja sama antarkomponen akan menjadi penting. Hal ini karena apabila setiap komponen hanya berpikir mengerjakan tugas dan fungsi sendiri-sendiri yang sudah dianggap “benar”, maka peningkatan kinerja Kemendagri secara keseluruhan tidak akan dapat dicapai.

Peran Sekretariat Jenderal Cq Biro Perencanaan sangat penting agar koordinasi pencapaian pelaksanaan program/kegiatan dan sasaran kinerja yang diharapkan dapat terwujud. Setiap komponen di bawah koordinasi Sekretariat Jenderal wajib bekerja untuk dapat memastikan terlaksananya program/kegiatan tepat pada waktunya, dengan target minimal realisasi keuangan program/kegiatan meningkat 25% setiap triwulan sampai dengan akhir tahun anggaran mencapai rata-rata 95-98%. Dengan demikian, secara total prestasi kinerja Kemendagri akan tinggi dalam setiap waktu evaluasi triwulanan yang dilakukan oleh kementerian/lembaga terkait.

Bachril Bakri

Bekerja di Direktorat Jenderal Otonomi Daerah
Kementerian Dalam Negeri



Digital Career Chromosome

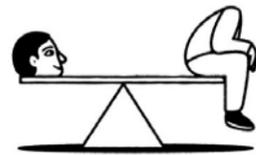
Sudah efektifkah sistem lelang jabatan yang dilakukan di Kementerian Dalam Negeri? Apakah Kementerian Dalam Negeri sudah memilih orang yang tepat saat melakukan promosi jabatan?

Pertanyaan-pertanyaan sejenis seringkali terdengar di lingkungan kerja kita. Tidak jarang banyak pegawai lantas mempertanyakan keabsahan dan kemurnian kedua proses tersebut. Memang hasil dari setiap keputusan tidak akan mampu menyenangkan semua orang. Namun pada titik mana keputusan tersebut dilakukan atas pertimbangan yang sebenar-benarnya demi kepentingan terselenggaranya kinerja kementerian yang baik?

Pada saat ini, terdapat lebih dari empat juta Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia. Sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10 UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, fungsi dari pegawai ASN adalah sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat pemersatu bangsa. *Jika banyak pegawai yang tidak kompeten menduduki jabatan-jabatan strategis di kementerian, apakah fungsi-fungsi tersebut dapat terlaksana?*

Dalam menyikapi pertanyaan-pertanyaan tersebut, terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan dan dikembangkan di Kementerian Dalam Negeri dan bahkan secara luas dapat direplikasi baik di kementerian lain maupun di daerah. Hal tersebut antara lain adalah penyusunan standar kompetensi kerja masing-masing jabatan dan pengembangan sistem informasi kompetensi pegawai.

Karier seorang ASN dimulai pada saat yang bersangkutan menerima Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Namun, kadangkala kenyataan di lapangan tidak berjalan sesuai dengan alur ideal. Tidak jarang para calon pegawai ditempatkan pada posisi yang berbeda dengan latar belakang pendidikan mereka. Kondisi tersebut akan berakibat pada kesenjangan kompetensi antara para calon pegawai dengan pekerjaan yang harus diselesaikan. Para calon pegawai memiliki keharusan yang tidak tertulis untuk berlari mengejar ketertinggalan pengetahuan dan keterampilan yang dipersyaratkan dalam melaksanakan tugas dan fungsi mereka. Kemampuannya yang cepat dalam menyerap pengetahuan dan sikap di awal masa kerjanya, belum tentu menjamin terbangunnya pondasi yang kuat terhadap kompetensi kerja mereka di bidang tersebut. Dalam kasus yang berat, bisa



saja mereka tersandung permasalahan yang tidak sederhana dikarenakan ketidakpahaman secara holistik terhadap tugas dan fungsinya.

Tidak berhenti disitu, pola karir ASN pun tidak jarang memiliki alur yang serupa. Seringkali seseorang dipromosikan dalam jabatan yang tidak dipahaminya sama sekali. *Lalu bagaimana dampaknya terhadap kinerja dan kebijakan?*

Dalam skala kecil, seringkali kita menemukan program yang tidak tepat sasaran dan bahkan tidak tepat guna. Kejadian tersebut salah satu

tunya diakibatkan oleh ketidakpahaman berbagai pihak, seperti dari sisi bidang yang mengajukan program dan bagian yang menganggarkan program. Kesalahan sistemik berskala kecil ini saja sudah berimplikasi pada pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Bagaimana jika hal tersebut terjadi dalam skala yang lebih besar?

Pernahkah dahi kita mengernyit saat membaca sebuah aturan perundangan? Ketidakpahaman akan substansi dan/atau tidak kuatnya pondasi pengetahuan menjadi beberapa alasan kemungkinan terjadinya hal tersebut. Sayangnya, karena sudah disahkan dalam bentuk aturan perundangan maka aturan tersebut tetap harus dilaksanakan sampai adanya revisi dari aturan tersebut. Kesalahan dalam peraturan perundangan maupun pembuatan revisi dari peraturan tersebut, besar-kecilnya, juga akan mempengaruhi neraca APBN.

Lalu, bagaimana untuk menyikapi kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan dan penyelesaian tugas dan fungsi suatu jabatan?

Pada awal 2018, telah disahkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 11 Tahun 2018 tentang Sistem Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah. Di dalam Permendagri tersebut terdapat bab-bab yang membahas tentang Kerangka Kualifikasi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri (KKA-PDN) dan Standar Kompetensi Kerja Pemerintahan Dalam Negeri (SKK-PDN). Kedua bab ini memberikan gambaran yang cukup jelas mengenai kompetensi yang harus dimiliki seorang ASN dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi jabatannya. Pada Pasal 7 Permendagri tersebut, dijelaskan, kompetensi seorang pegawai dihasilkan melalui pendidikan formal, pengembangan kompetensi, dan pengalaman kerja dalam bentuk sertifikat. Namun, permasalahan tidak akan berakhir di situ.

Setiap jabatan yang tercantum dalam Organisasi dan Tata Kerja Kemendagri maupun Jabatan Fungsional Tertentu, berdasarkan Pasal 16, harus memiliki SKK-PDN. SKK-PDN pada dasarnya merupakan rumusan kemampuan dan karakteristik yang harus dimiliki seorang ASN yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pengelolaan sesuai dengan jenjang dan jabatannya. Berdasarkan pada pasal tersebut, seharusnya Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri (BPSDM Kemendagri) bersama dengan komponen Kemendagri terkait menyusun SKK-PDN sesuai dengan kebutuhan jabatan pada masing-masing komponen.

Tidak hanya itu, BPSDM Kemendagri bersama-sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota pun harus segera menyusun SKK-PDN dari setiap jabatan yang terdapat pada masing-masing SKPD tersebut. Melalui SKK-PDN, seorang pegawai dapat dinilai dengan lebih objektif terhadap kompetensi yang dimilikinya dan jabatan yang diembannya sehingga diharapkan pegawai tersebut dapat mencapai dan menunjukkan kinerja terbaiknya.

Lebih jauh lagi, selain sebagai acuan kerja, penyusunan SKK-PDN dari masing-masing jabatan dapat menjadi acuan dari pemenuhan tunjangan kinerja seseorang. Jika selama ini persentase perolehan tunjangan kinerja didasarkan pada akuntabilitas keuangan dari kementerian, pemenuhan kompetensi seseorang dalam melaksanakan jabatannya berdasarkan SKK-PDN dapat dijadikan pertimbangan yang lebih adil. Contohnya, seseorang yang telah memenuhi 17 Unit kompetensi yang dipersyaratkan dalam jabatannya dapat diberikan tunjangan kinerja sebesar 100% dengan alasan, pegawai tersebut telah memenuhi standar yang dipersyaratkan dalam jabatannya.

Sebaliknya, jika seorang pegawai hanya memenuhi 12 dari 17 Unit Kompetensi yang dipersyaratkan dalam jabatannya maka pegawai tersebut hanya berhak memperoleh 70.6% dari tunjangan jabatannya. Begitu besarnya potensi yang dimiliki SKK-PDN dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pegawai dalam jabatan.

Namun pada kenyataannya, SKK-PDN belum juga disusun secara benar. Tugas pokok dan fungsi setiap jabatan yang terdapat pada Permendagri No 43 Tahun 2015 dan beberapa perubahannya masih belum dirumuskan ke dalam dokumen SKK-PDN.

Idealnya, setelah SKK-PDN setiap jabatan telah terumuskan dengan baik, Kemendagri akan memiliki kekuatan sumber daya manusia yang efektif dan efisien dalam menyelesaikan tugas dan fungsinya. Kinerja masing-masing komponen, pada khususnya, dan Kemendagri, pada umumnya, dapat terpenuhi

Oktavia Hutagalung

Bekerja di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kementerian Dalam Negeri (BPSDM Kemendagri)



dan tercapai dengan baik. Begitu pula ketika hal ini terimplementasi dengan baik pada pemerintah daerah maupun Kementerian/Lembaga lainnya. Langkah untuk masuk ke dalam pintu gerbang kemerdekaan Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD Republik Indonesia tentu bukan sekadar angan-angan.

SKK-PDN dapat terlihat lebih jelas perannya saat didukung dengan sistem informasi terstruktur berupa basis data kompetensi pegawai. Setiap pegawai, sejak berstatus sebagai CPNS akan direkam jejak kompetensinya dan dicatatkan dalam sistem basis data tersebut sebagai DNA kariernya secara digital. Susunan DNA ini pada akhirnya akan membentuk kromosom karier digital (*digital career chromosome*) pegawai. Setelah kromosom karier ini teridentifikasi, tentunya menentukan siapa yang harus dipromosikan dalam jabatan tertentu tidak lagi menjadi hal yang sulit. Dengan bantuan sistem informasi digital, *sorting* informasi yang dibutuhkan dapat dilakukan dalam hitungan milidetik saja.

Calon-calon pegawai yang patut dipromosikan akan semakin mengerucut pada orang yang tepat. Daftar calon pejabat yang akan diundang dalam lelang jabatan pun akan semakin memendek, sehingga secara tidak langsung akan memangkas anggaran untuk lelang jabatan. Setiap pos jabatan pun akan diisi oleh pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dan siap untuk langsung bekerja.

Tentunya pekerjaan besar ini tidak dapat dilakukan sendiri. BPSDM Kemendagri sebagai salah satu komponen yang bertugas untuk mendukung pengembangan kompetensi pegawai harus bekerjasama dengan Biro Kepegawaian Kemendagri dan bahkan Badan Kepegawaian Nasional serta Badan Kepegawaian Daerah sebagai pemilik basis data Aparatur Sipil Negara se-Indonesia dan per Daerah. Sinergitas antar lembaga dalam pertukaran dan penambahan informasi dengan bantuan teknologi tentu bukan merupakan hal yang sulit. Hanya saja, terkadang ego sektoral yang menyulitkan perwujudan dari inovasi ini.

Berdasarkan tulisan di atas, dapat disimpulkan pentingnya pengembangan basis data kompetensi pegawai. Beberapa dampak besar dari pengembangan sistem informasi yang mendukung penemuan kromosom digital ini adalah tercapainya kinerja Kementerian/SKPD dengan baik dan peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat yang pada akhirnya diharapkan dapat pula turut mendukung pemenuhan kebutuhan akan pelayanan dasar yang lebih baik. Pada akhirnya Kementerian Dalam Negeri dapat mendukung Indonesia yang lebih baik melalui kinerja dan Sumber Daya Manusia.

DPD

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebanyak 807 orang. Mereka akan memperebutkan 136 kursi yang tersedia di 34 daerah pemilihan. Jumlah 807 caleg DPD itu terdiri dari 671 caleg pria dan 136 caleg perempuan. Keputusan itu tertuang dalam Surat Keputusan KPU RI No 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD RI Tahun 2019.

Dari persebaran jumlah DCT, tercatat DCT caleg DPD terbanyak ada di Jawa Barat, yakni 49 orang. Sedangkan caleg DPD paling sedikit ada di Papua Barat, yakni 10 orang. Di antara caleg itu ada beberapa nama terkenal di level nasional seperti, misalnya, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie yang akan bertarung di DKI Jakarta bersama mantan Cawagub DKI Sylviana Murni dan mantan Ketua KPU DKI Sumarno. Tokoh lain yang masuk rancangan DCT anggota DPD DKI Jakarta yakni politikus senior PDI-P Sabam Sirait. Selain itu, ada politikus senior Golkar Yorrys Raweyai yang ternyata juga memilih jalur senator sebagai caleg DPD RI.

Entah apa yang membuat para caleg itu begitu getol memburu kursi DPD. Padahal, dari sisi kewenangan, DPD tidak seperti DPR yang mempunyai kewenangan *full* dalam legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Meski lahir dari rezim reformasi melalui amendemen ketiga UUD 1945 pada 2002, konstitusi pascaamendemen setengah hati memberikan wewenang kepada DPD dalam upaya mendorong *strong bicameralism*. Pertama dari konstruksi jumlah keanggotaan DPD-DPR. Konstitusi membatasi jumlah keanggotaan DPD secara sama setiap provinsi (Pasal 22C ayat (2)).

Ini berbeda dengan Amerika Serikat yang membagi keanggotaan senat berdasarkan prinsip proporsionalitas (jumlah penduduk). California sebagai negara bagian terbesar di AS memiliki jumlah anggota senat terbanyak dari negara bagian lain. Diskriminasi konstitusi itu berkorelasi dengan syarat jumlah keanggotaan DPD yang tidak boleh melebihi sepertiga jumlah anggota DPR, 560 anggota DPR berbanding 132 anggota DPD. Kondisi itu sangat menyulitkan DPD dalam membangun *bargaining* setara dengan DPR.

Kedua, tidak seperti DPR yang fungsinya tegas dan jelas disebut dalam konstitusi, konstitusi pasca amendemen tidak menyebut DPD memiliki fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran, sebagaimana fungsi yang melekat pada umumnya

lembaga legislatif. Hal ini juga melemahkan posisi DPD dalam membangun *bargaining* seimbang dengan DPR.

Membedah konstitusi pasca amendemen dan UU No 2 Tahun 2018 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3), dari 3 fungsi legislatif yang umumnya melekat, DPD hanya menjalankan 2 fungsi; legislasi dan pengawasan, itu pun tidak utuh. Legislasi hanya terkait dengan RUU kedaerahan, termasuk pengawasan. Bahkan, fungsi anggaran tidak dimiliki DPD. Anggaran DPD yang tertera di APBN diusulkan dan ditentukan DPR melalui Anggaran.

Cacat konstitusi ini dilengkapi dengan problem lain yang juga berantai. Meski putusan MK sudah mengembalikan fungsi konstitusional DPD melalui permohonan uji materi UU MD3, DPR masih setengah hati menindaklanjuti dengan merevisi UU MD3. Pembangkangan DPR terhadap putusan MK itu semakin melengkapi krisis kewenangan DPD. Kondisi demikian membuat tafsir *bicameralism* menjadi rancu. DPR seakan memegang kuasa tunggal fungsi legislatif, DPD hanya menjadi 'badan pelengkap'.

Publik tentu berharap masuknya orang-orang seperti Yorrys, Jimly, Sabam dan lain-lain dapat memberi manfaat buat kelangsungan DPD yang berwibawa dan bermartabat. Mereka harus bisa membuat perubahan yang berarti bagi DPD. Jangan sampai mereka hanya memburu kursi kekuasaan saja di sana. Untuk itu, mereka harus memperjuangkan penguatan kewenangan DPD. Penguatan itu haruslah terkait dengan keseimbangan kekuatan.

Artinya, peran dan pengaruh politik yang perlu ditingkatkan agar DPD lebih berperan dan memiliki pengaruh politik lebih luas. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, misalnya, DPD dioptimalkan fungsinya sebagai *check and balances* DPR, sehingga UU yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tidak bertentangan dengan Pancasila. DPD juga harus punya hak menolak atau menyetujui sebuah RUU menjadi UU.

Anggota DPD sebagai senator pun perlu lebih banyak mengangkat persoalan mendesak masyarakat daerah yang diwakilinya. Tidak itu saja, problema masyarakat daerah harus terangkat dan terselesaikan berkat peran senator. Ini untuk mendapatkan kepercayaan publik bahwa senator-lah yang lebih berperan dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di daerah.

● Moh Ilham A Hamudy

Indeks Sumber Daya Manusia 2017

World Economic Forum memberi peringkat pada 130 negara tentang seberapa baik mereka mengembangkan sumber daya manusia mereka dalam skala dari 0 (terburuk) sampai 100 (terbaik) melalui subindeks.



NEGARA	INDEKS TOTAL		SUBINDEKS KAPASITAS		SUBINDEKS PARTISIPASI		SUBINDEKS PENGEMBANGAN		SUBINDEKS PENGETAHUAN & KEMAMPUAN	
	Skor	Rank	Skor	Rank	Skor	Rank	Skor	Rank	Skor	Rank
Norwegia	77,12	1	80,46	13	73,18	24	82,63	6	72,22	6
Finlandia	77,07	2	81,05	9	65,09	68	88,51	1	73,62	2
Swiss	76,48	3	76,36	28	69,12	42	84,87	2	75,57	1
Amerika Serikat	74,84	4	78,18	22	68,72	43	83,45	4	68,99	13
Denmark	74,40	5	79,37	16	71,41	34	78,65	14	68,18	17
Selandia Baru	74,14	7	78,92	18	72,76	27	80,38	8	64,50	22
Swedia	73,95	8	76,21	31	69,60	39	77,10	16	72,89	3
Slovenia	73,33	9	81,10	7	65,90	64	79,21	13	67,10	18
Austria	73,29	10	73,71	45	68,00	44	81,53	7	69,92	11
Indonesia	62,19	65	69,72	64	61,58	82	67,24	53	50,21	88



Sumber: World Economic Forum

Infografik: FEBY

CALL FOR PAPERS

JURNAL BINA PRAJA

THEME

HOME AFFAIRS GOVERNANCE

SUBTHEME

Regional Autonomy and Bureaucracy
Politics and Public Administration
Territorial Administration
and Rural Governance
Population and Civil Registration
Regional Election and Regional Innovation
Regional Fiscal Policy and Development
Other Issues in Public Administration



Submit
a scientific paper
on the theme of
Home Affairs Governance
to jurnal.kemendagri.go.id



RESEARCH AND
DEVELOPMENT AGENCY
MINISTRY OF HOME AFFAIRS

Published
**MAY &
NOVEMBER**

TERMS & CONDITIONS

Open to the public | Manuscripts may contain the results of empirical or nonempirical research | Manuscripts should address the theme and subthemes set by the Jurnal Bina Praja Editorial Team | Submitted manuscripts have not been published in other media | Manuscripts should have a minimum of 38000-40000 character in Indonesian or English (preferably in English) |

For the writing systematics and format, see jurnal.kemendagri.go.id | A minimum of 10 references taken from primary sources (scientific journals articles, dissertations, master's theses, undergraduate theses, and/or other research reports) | Attach biodata along with complete mailing address and contact number.

**FOR MORE INFORMATIONS
CONTACT US**

Jl. Kramat Raya, No 132, Senen, Jakarta Pusat
0821 1139 3927 (Whatsapp Only)
jurnalbinapraja@yahoo.com



Accredited No 21/E/KPT/2018